



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# LAPORAN KINERJA

2025

PUSAT DATA DAN SISTEM  
INFORMASI PERTANIAN



## KATA PENGANTAR



**INTAN RAHAYU S.SI.,  
M.T.  
Kepala Pusat Data dan  
Sistem Informasi Pertanian**

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang mencakup pencapaian tugas dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dengan kebutuhan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan statistik dan sistem informasi pertanian secara terus menerus berusaha melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Adapun perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2026  
Kepala Pusat,

Intan Rahayu S.Si., M.T.  
NIP. 197110211991102001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSDATIN 2025-2029.

Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mewujudkan Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2025-2029.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian secara komprehensif.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2025 melaksanakan Sasaran Strategis (SS) yaitu Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal dan 6 (enam) Indikator Kinerja (IKK) yaitu: (1) Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (2) *Service Level Agreement* (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral; (4) Indeks SPBE Kementan; (5) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE; (6) Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan Bagian Umum.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tercapai 3,60 dari target 3,54 (101,69%).

- 2) *Service Level Agreement* (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tercapai 99,01% dari target 95% (104,22%).
- 3) Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral tercapai 3,67 dari target 3,28 (111,89%).
- 4) Indeks SPBE Kementan tercapai 4,23 dari target 4,26 (99,30%).
- 5) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE tercapai Level 3 dari target Level 3 (100,00%).
- 6) Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum tercapai 3,64 dari target 3,56 (102,25%).

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 berupa laporan SPI Penerimaan Umum bulan Desember 2025 sebesar Rp 114.563.494,- dengan estimasi target penerimaan Rp 10.000.000,- sedangkan Pengembalian Belanja sebesar Rp 1.409.611,- dan Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan (UP) Dana Rupiah (815111) sebesar Rp 86.269.622,-.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memperoleh alokasi pagu DIPA sebesar Rp. 60.103.105.000,-. Selama pelaksanaan anggaran hingga akhir Desember 2025 terdapat Blokir Anggaran sebesar Rp 4.054.510.000,-, sehingga Pagu Aktif (pagu yang dapat dilaksanakan) sebesar Rp 56.048.595.000,-. Sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi anggaran Pusdatin sebesar Rp 42.446.007.088,- sehingga realisasi sampai akhir Desember sebesar 75,73%.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2025 sebesar 89.85% yang menunjukkan pengelolaan anggaran pada satker Pusdatin telah telaksana dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	5
1.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis .....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>19</b>
3.1. Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025 .....	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025 .....	21
3.2.1 Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian .....	21
3.2.2 Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .....	29
3.2.3 Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Terhadap Layanan Umum .....	36
3.2.4 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral .....	42
3.2.5 Indeks SPBE Kementan .....	45
3.2.6 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE .....	49
3.3 Realisasi Anggaran .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1 Permasalahan .....	61
4.2 Tindak Lanjut .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Pusdatin .....	5
Gambar 2	Fungsi Pusdatin.....	6
Gambar 3	Pengelolaan data dan Informasi Pertanian.....	6
Gambar 4	Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian .....	7
Gambar 5	Pengelolaan dan Pelaksanaan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi .....	7
Gambar 6	Layanan Internal.....	8
Gambar 7	Layanan Perkantoran .....	8
Gambar 8	Sumber Daya Manusia Pusdatin.....	9
Gambar 9	Sumber Daya Manusia Statistisi Pusdatin .....	9
Gambar 10	Sumber Daya Manusia Pranata Komputer .....	10
Gambar 11	Sumber Daya Manusia Fungsional Lainnya .....	11
Gambar 12	Sumber Daya Manusia Fungsional Umum.....	11
Gambar 13	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Pendidikan.....	12
Gambar 14	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	12
Gambar 15	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
Gambar 16	Ruang Layanan Pusdatin .....	27
Gambar 17	Aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin .....	28
Gambar 18	Indeks Penilaian Setiap Domain EPSS.....	45
Gambar 19	Indeks SPBE Kementan 2021-2025 .....	49
Gambar 20	Hasil Evaluasi SPBE Kementan 2025 .....	50
Gambar 21	Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA-SPBE .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja.....	17
Tabel 2	Revisi Perjanjian Kinerja .....	18
Tabel 3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan 2024 .....	20
Tabel 4	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2025 .....	22
Tabel 5	Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025.....	23
Tabel 6	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2025 Dengan Tahun 2024.....	24
Tabel 7	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah .....	24
Tabel 8	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	26
Tabel 9	SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, dan SLA Layanan Keamanan Siber .....	30
Tabel 10	Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)Tahun 2025.....	33
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja SLA Layanan TIK Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	34
Tabel 12	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	35
Tabel 13	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	35
Tabel 14	Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum Tahun 2025 .....	37
Tabel 15	Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum Tahun 2025 Dengan Tahun 2024.....	38
Tabel 16	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	39
Tabel 17	Predikat penilaian tingkat kematangan.....	43
Tabel 18	Capaian Indeks Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2025 .....	44
Tabel 19	Nilai indeks pembangunan statistik dan nilai indeks domain EPSS .....	44
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....	47
Tabel 21	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	47
Tabel 22	Capaian Indeks SPBE Kementan Tahun 2025.....	49
Tabel 23	Hasil Evaluasi SPBE Kementan 2025 .....	50
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Kementan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah .....	51
Tabel 25	Nilai efisiensi penggunaan anggaran.....	52
Tabel 26	Capaian Indeks Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Tahun 2025.....	55
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah .....	56
Tabel 28	Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....	57
Tabel 29	Rincian Anggaran berdasarkan Pagu DIPA dan Pagu Dikurangi Blokir .....	59
Tabel 30	Realisasi anggaran berdasarkan pagu DIPA dikurangi blokir .....	59

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mendukung agenda Pembangunan Pertanian tahun 2025, Kementerian Pertanian menetapkan visi yaitu “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnya Kesejahteraan Petani, (2) Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas, (3) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat, (4) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Produk Hewan, (5) Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2025. Dalam Renstra 2025-2029 itu terdapat tujuh sasaran strategis untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi petani di Indonesia, adapun ketujuh sasaran strategis tersebut adalah (1) Meningkatnya Pendapatan Petani, (2) Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, (3) Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, (4) Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, (5) Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, (6) Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia, (7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Isu-isu strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 adalah:

##### **a. Satu Data Pertanian Mendukung Satu Data Indonesia**

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah harus membenahi tata kelola data pemerintah agar menghasilkan data yang berkualitas. Tindak lanjut atas Perpres tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun walidata yang disebutkan pada Bab III pasal 3, mempunyai tugas 1)

mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 2) menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal Satu Data Indonesia; dan 3) membantu pembina data dalam membina Produsen Data. Sedangkan Kepmentan Nomor 756 Tahun 2020 menetapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Walidata lingkup Kementerian Pertanian. Satu Data Pertanian telah menjadi isu strategis yang menempati peran sentral dalam pengelolaan pembangunan sektor pertanian. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan kebijakan yang tepat sasaran, cepat, dan berbasis bukti, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin Pertanian) memegang peran strategis sebagai pengampu utama dalam mewujudkan tata kelola data pertanian yang terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini, tantangan utama sektor pertanian adalah adanya perbedaan angka dan definisi data antarunit kerja maupun antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pertanian. Oleh karena itu, kebijakan Satu Data Pertanian menjadi instrumen strategis untuk menyatukan standar data, metadata, metodologi, serta mekanisme berbagi data dalam satu sistem yang terkoordinasi. Melalui penguatan Satu Data Pertanian, Pusdatin Pertanian tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai pengarah dan penjaga kualitas data (data steward) sektor pertanian. Data yang terintegrasi dan terpercaya akan menjadi fondasi dalam mendukung pencapaian ketahanan dan swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, Satu Data Pertanian bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan agenda strategis yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan pertanian Indonesia.

#### **b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamatkan setiap instansi pemerintah menerapkan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tindak lanjut atas Perpres tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 33 Tahun 2023

tentang Penerapan SPBE lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Permentan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE lingkup Kementerian Pertanian. Permentan ini mengamatkan Pusdatin untuk 1) mengkoordinasikan Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian; 2) Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian Pertanian; 3) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian Pertanian, jaringan intra Kementerian Pertanian, dan sistem penghubung layanan Kementerian Pertanian; 4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; 5) Penyelenggaraan keamanan SPBE; 6) Pelaksanaan manajemen Data; 7) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; 8) Pelaksanaan manajemen pengetahuan; 9) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE; dan 10) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian.

Oleh karena itu melalui pelaksanaan DIPA Pusdatin tahun 2025 diharapkan Pusdatin mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh stakeholders serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pertanian.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi dan statistik pertanian dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan pada semua sub sektor pertanian agar menjadi lebih produktif dan efisien, mempercepat peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta mempercepat proses pembaharuan.

Tantangan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di bidang statistik adalah layanan penyediaan data yang cepat, lengkap dan akurat dengan teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap kecenderungan pembatasan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik pertanian, dalam menghadapi tantangan global yaitu sebagai penyedia data dan informasi bagi stakeholders (pengambil kebijakan, dunia

usaha dan masyarakat). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah memiliki ruang layanan data yang berfungsi untuk melayani kebutuhan data baik dari dalam maupun dari luar instansi.

Kondisi umum yang merupakan permasalahan dan perlu dukungan kebijakan pimpinan sebagai perbaikan kedepan:

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung kerja;
2. Peningkatan kemampuan SDM Statistik (pemahaman metode statistik), Pranata Komputer (microservices technology, sertifikasi keamanan sistem informasi);
3. Kurangnya akselerasi antara pusat dan daerah dalam komunikasi perstatistikan dan sistem informasi pertanian;
4. Perlunya secara konsisten melakukan integrasi aplikasi dan penyederhanaan jumlah aplikasi;
5. Mengingat masih besarnya potensi serangan siber, perlu tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka menjaga keamanan informasi dan keamanan siber;
6. Perlu terus melakukan peremajaan perangkat TIK untuk menjaga kinerja layanan TIK;
7. Belum optimalnya dalam membangun networking terkait tugas dan fungsi Pusdatin baik ke lingkup dalam dan luar negeri.

Tantangan ke depan yang dihadapi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian:

1. Perkembangan teknologi terkini yang didukung oleh sumber daya yang memadai;
2. Potensi serangan siber yang akan semakin tinggi, optimalisasi pemanfaatan Pusat Komputasi Kementan yang terintegtrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) serta penyederhanaan aplikasi dan integrasinya dengan kebijakan digitalisasi nasional;
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan keragaman data di tengah tingginya kebutuhan pemanfaatan/pengguna data untuk berbagai kepentingan kebijakan;

- Persaingan antar negara atau global terhadap kebutuhan data dan sistem informasi modern yang semakin kompetitif dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan pangan.

## 1.2 Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 tahun 2025, struktur organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri dari satu eselon II berkedudukan sebagai Kepala Pusat, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disajikan bagan berikut ini:



Gambar 1 Bagan Organisasi Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian.

**Fungsi yang dilaksanakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mencakup:**

Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;

Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;

Pelaksanaan keamanan informasi dan siber serta perlindungan data pribadi;

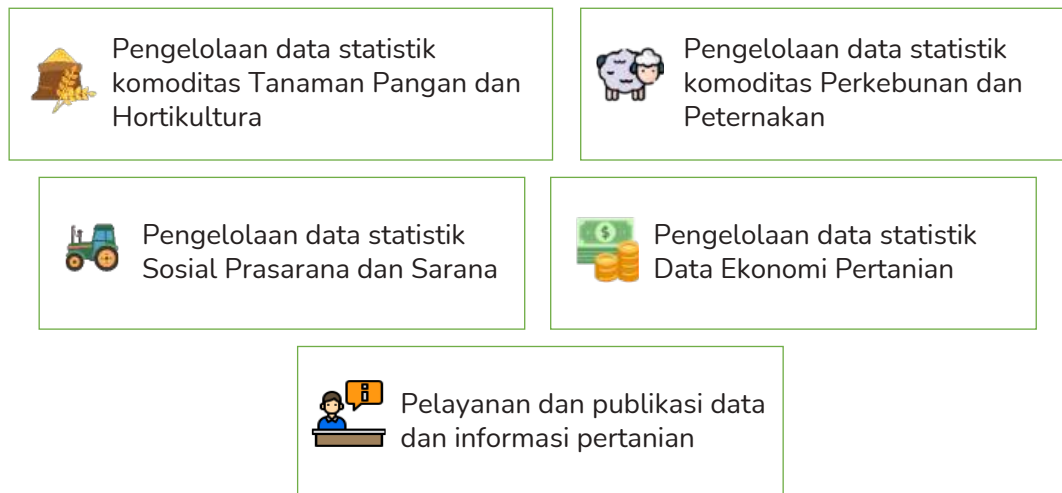
Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi pertanian;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian.

Gambar 2 Fungsi Pusdatin

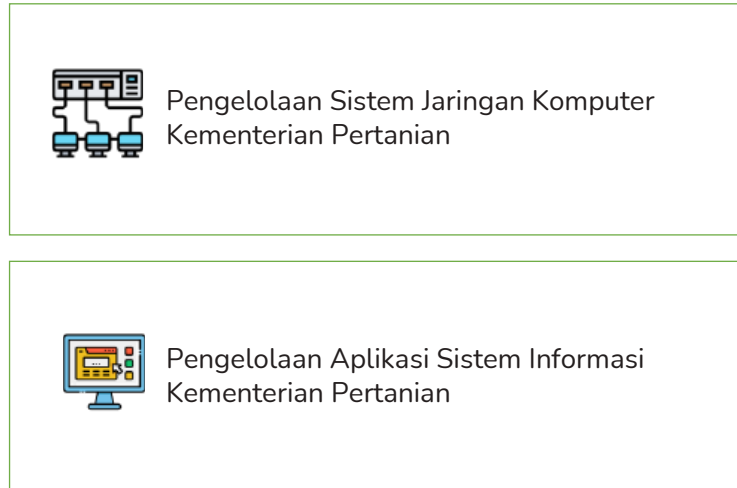
**Kegiatan Utama**

**1. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian**



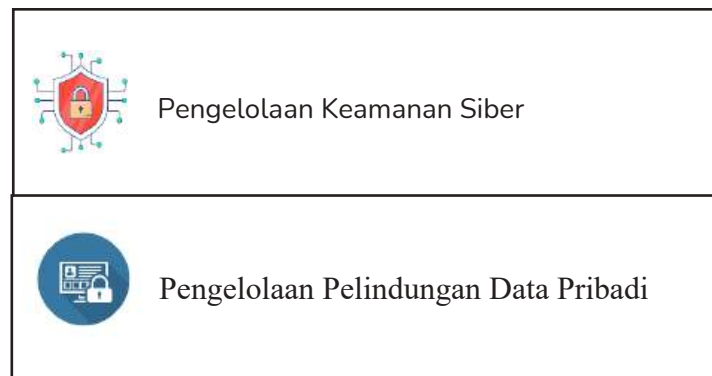
Gambar 3 Pengelolaan data dan Informasi Pertanian

## 2. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian



Gambar 4 Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian

## 3. Pengelolaan dan Pelaksanaan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi



Gambar 5 Pengelolaan dan Pelaksanaan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi

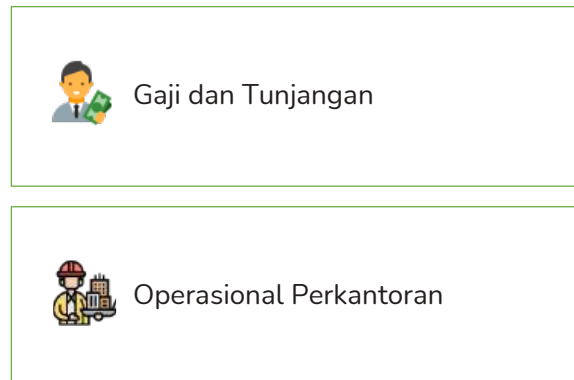
## Kegiatan Penunjang

### 1. Layanan Internal



Gambar 6 Layanan Internal

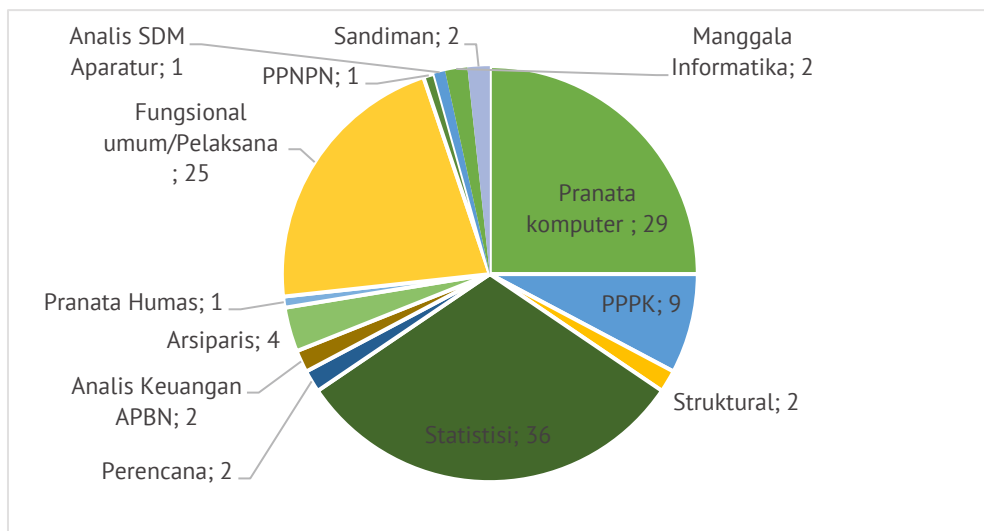
### 2. Layanan Perkantoran



Gambar 7 Layanan Perkantoran

### 1.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian

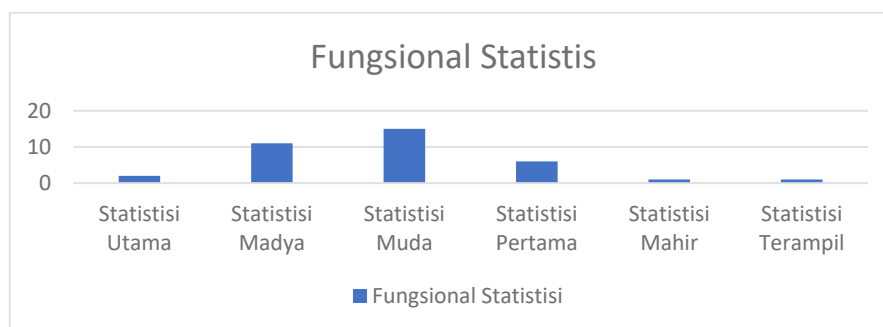
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memiliki 106 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 97 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 orang. Berdasarkan jabatan terdiri atas 2 orang Struktural, 29 orang Pranata Komputer, 36 Orang Statistisi, 2 orang fungsional Perencana, 2 orang Analis Keuangan APBN, 4 orang Arsiparis, 1 orang Pranata Humas, 1 orang Analis SDM Aparatur, 2 orang Manggala Informatika, 2 orang Sandiman, dan 25 orang Fungsional Umum/Pelaksana. Selain ASN, juga terdapat 1 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 8 Sumber Daya Manusia Pusdatin

#### 1. Fungsional Statistisi

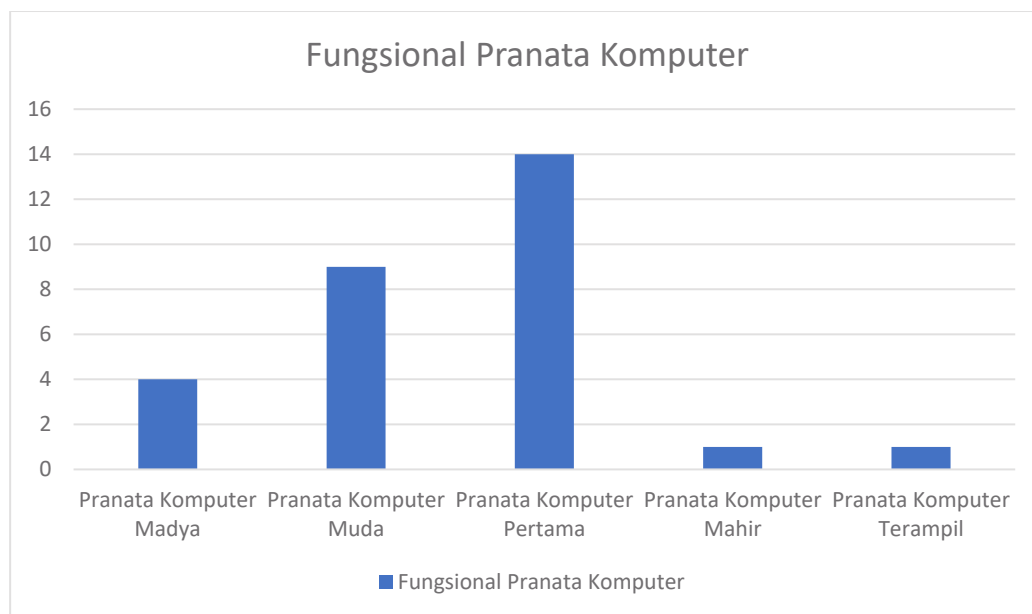
Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional statistisi yang terdiri dari: 2 orang statistisi utama, 11 orang statistisi madya, 15 orang statistisi muda, 6 orang statistisi pertama, 1 orang statistisi mahir, dan 1 orang statistisi terampil



Gambar 9 Sumber Daya Manusia Statistisi Pusdatin

## 2. Fungsional Pranata Komputer

Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional pranata komputer yang terdiri dari: 4 orang pranata komputer madya, 9 orang pranata komputer muda, 14 orang pranata komputer pertama, 1 orang pranatan komputer mahir, dan 1 orang pranata komputer terampil.



Gambar 10 Sumber Daya Manusia Pranata Komputer

## 3. Fungsional Lainnya

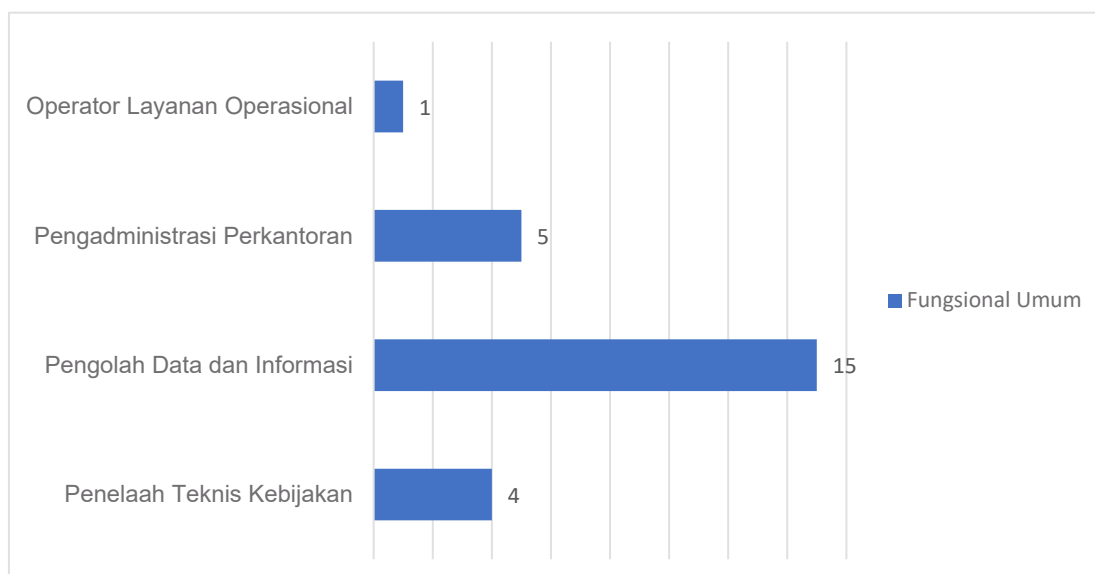
Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional lainnya yang terdiri dari: 1 orang pranata humas muda, 1 orang analis pengelola keuangan APBN muda, 1 orang analis pengelola keuangan APBN pertama, 1 orang perencana muda, 1 orang perencana pertama, 1 orang analis SDM Aparatur pertama, 1 orang arsiparis pertama, 1 orang arsiparis mahir, 2 orang arsiparis terampil, 2 orang manggala informatika pertama, dan 2 orang sandiman pertama.



Gambar 11 Sumber Daya Manusia Fungsional Lainnya

#### 4. Fungsional Umum

Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional lainnya/umum yang terdiri dari: 4 orang penelaah teknis kebijakan, 15 orang pengolah data dan informasi, 5 orang pengadministrasi perkantoran dan 1 orang operator layanan operasional.

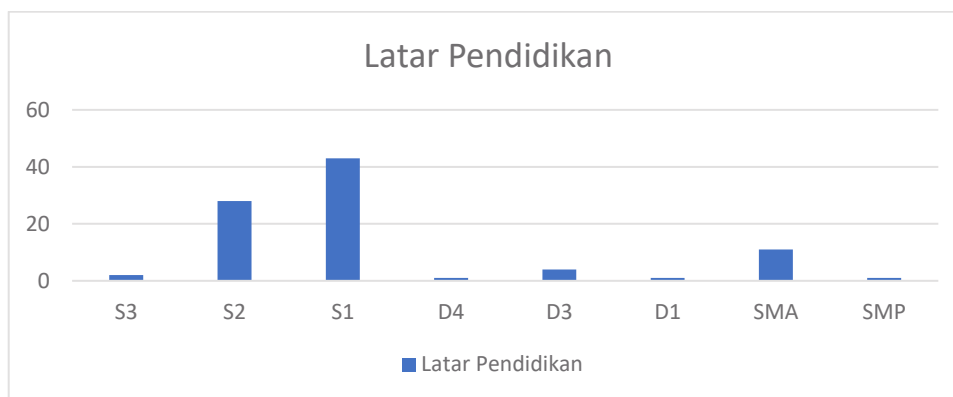


Gambar 12 Sumber Daya Manusia Fungsional Umum

#### 5. Berdasarkan latar Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di Pusdatin sampai dengan bulan Desember 2025 mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yaitu 2 orang bergelar doktor, 28 orang bergelar master, 43 orang bergelar sarjana,

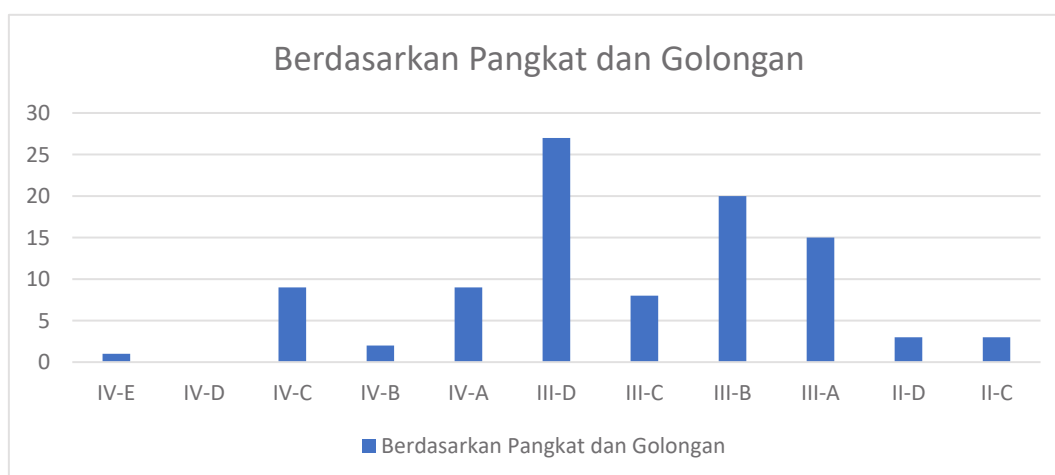
1 orang lulusan D4, 4 orang lulusan D3, 1 orang lulusan D1, 11 orang lulusan SMA, dan 1 orang lulusan SMP.



Gambar 13 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Pendidikan

## 6. Berdasarkan Pangkat/Golongan

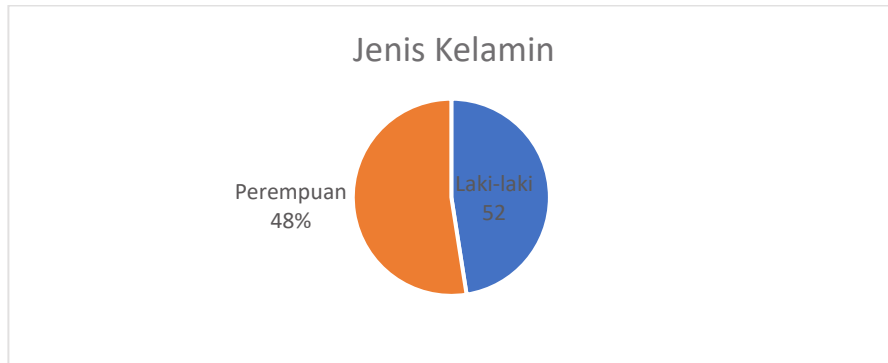
Jika dilihat dari tingkat pangkat/golongan di Pusdatin sampai dengan bulan Desember 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yaitu pembina utama IV-E 1 orang, pembina madya IV-D 0 orang, pembina muda IV-C 9 orang, Pembina tingkat I IV-B 2 orang, pembina IV-A 9 orang, penata tingkat I III-D 27 orang, penata III-C 8 orang, penata muda tingkat I III-B 20 orang, penata muda III-A 15 orang, pengatur tingkat II-D 3 orang, pengatur II-C 3 orang.



Gambar 14 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

## 7. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pegawai Pusdatin terdapat 55 orang laki – laki dan 51 orang perempuan.



*Gambar 15 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin*

## BAB II

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1 Rencana Strategis

Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) merupakan instrument pendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2025-2029 dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja lingkup Pusdatin.

Kementerian Pertanian menetapkan visi yaitu **“Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang mengandung makna: (1) Pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman, dan (2) Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mengacu pada kebijakan strategis yang telah dirumuskan, maka visi dan misi Pusdatin 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **Visi**

**Menjadi penyedia data, layanan data dan TIK yang berkualitas guna mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern”**

Untuk tercapainya visi tersebut di atas, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah membuat pernyataan misi, yang merupakan cita-cita dan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh keseluruhan anggota organisasi dan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan. Pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut:

### **Misi**

1. Melakukan Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengolahan, Analisis, Penyajian dan Penyebarluasan Data dan Informasi Pertanian;
2. Mengembangkan dan Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Membina dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Sistem Informasi Pertanian.

Langkah strategis dan arah kebijakan merupakan penjabaran operasional misi, yang diwujudkan melalui program indikatif dan panduan tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah strategis meliputi analisis lingkungan (SWOT) untuk menentukan keunggulan, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan langkah tersebut secara efektif dan efisien dalam kurun waktu tertentu.

Langkah strategi dalam mewujudkan misi Pusdatin :

- Menyiapkan dukungan anggaran, SDM, dan sarana penunjang lainnya dalam upaya untuk meningkatkan layanan penyediaan serta publikasi data dan informasi pertanian
- Meningkatkan infrastruktur layanan TIK serta integrasi sistem informasi pertanian
- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM statistisi dan pranata komputer, serta fungsional lainnya sebagai pendukung layanan data dan informasi

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi Pusdatin :

- Penguatan penyelenggaraan kegiatan terkait data statistik dan geospasial melalui Permentan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian.
- Penguatan kebijakan internal SPBE Kementan melalui Permentan Nomor 05 Tahun 2025 tentang perubahan atas permentan no 33 tahun 2023 tentang ketentuan umum, tata kelola sistem berbasis elektronik kementerian, manajemen sistem elektronik berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara

teknologi informasi dan komunikasi kementerian, pemantauan dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi

- Komitmen peningkatan kualitas SDM didukung dengan anggaran Pusdatin.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 (lima) tahun (2025-2029). Oleh karena itu, penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Adapun tujuan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, andal (reliable), terkini (updated), dan mudah diakses (accessible)
2. Tersedianya Layanan TIK yang andal
3. Layanan internal yang prima

Dalam upaya mengukur pencapaian tujuan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, maka ditetapkan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan data dan informasi pertanian
2. Meningkatnya Service Level Agreement (SLA) layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan internal (layanan Bagian Umum)

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Komitmen Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya. Indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan relevan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusat yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2024.

Indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal	1. Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	3,54 Indeks
		2. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	95%
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,28 Indeks
		4. Indeks SPBE Kementan	4,26 Indeks
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3 Level (1-5)
		6. Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap Layanan Bagian Umum	3,56 Skala Likert (1-4)

Tabel 1 Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja telah dilakukan beberapa kali perubahan (revisi) yang disebabkan karena adanya perubahan pagu anggaran, pejabat, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja. Berikut merupakan histori perubahan:

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1.	PK Awal	30 Desember 2024	Rp. 44.425.360.000
2.	PK Revisi Ke-1	15 Mei 2025	Rp. 45.264.360.000
3.	PK Revisi Ke-2	01 Desember 2025	Rp. 60.103.105.000
4.	PK Revisi Ke-3	31 Desember 2025	Rp. 60.103.105.000

*Tabel 2 Revisi Perjanjian Kinerja*

### Bab III

#### Akuntabilitas Kinerja

Ukuran keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian TA. 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama 1 (satu) tahun.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian  $\geq$  100%); (2) berhasil (capaian 80 - 100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian  $\leq$ 60%) terhadap target yang telah ditetapkan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025

Hasil pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK) adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	IKSK/IKA	satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
SK1 Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal	1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Indeks	3,33	3,52	105,71	3,54	3,60	101,69 (Sangat Berhasil)
	2 Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	94,17	98,55	104,65	95	99,01	104,22 (Sangat Berhasil)
	3 Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum	Skala Likert (1-4)	3,55	3,56	100,28	3,56	3,64	102,25 (Sangat Berhasil)
	4 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	%	78,62	76,01	96,68	-	-	-

Sasaran Kegiatan		IKSK/IKA	satuan	Tahun 2024			Tahun 2025				
				Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja		
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	%	96,98	<b>96,40</b>	<b>99,40</b>	-	-	-	
		6	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks	-	-	-	3,28	<b>3,67</b>	<b>111,89 (Sangat Berhasil)</b>	
		7	Indeks SPBE Kementan	Indeks	-	-	-	4,26	<b>4,23</b>	<b>99,30 (Berhasil)</b>	
		8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Level (1-5)	-	-	-	3	<b>3</b>	<b>100,00 (Sangat Berhasil)</b>	
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>101,34</b>			<b>103,23</b>	

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan 2024

Dari Tabel 3 rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 adalah **103,23%** dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria "**Sangat Berhasil**". Rata-rata realisasi fisik capaian kinerja kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 dan 2025 lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai sumber daya untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 rata-rata realisasi fisik capaian kinerja mencapai 101,34% dan rata-rata realisasi fisik capaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025 adalah 103,23% atau naik sebesar 1,87% dari tahun 2024.

## **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025**

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **3.2.1 Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian**

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu Indikator Kinerja Organisasi Pemerintahan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Unit Kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Wali Data sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian, dan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022, yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan bertanggung jawab memberikan pelayanan serta publikasi data dan informasi pertanian pada Kementerian Pertanian melalui situs Kementerian Pertanian, media cetak, media elektronik, dan media publikasi resmi lainnya.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pusdatin. Pengukuran IKM melalui capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan data dan informasi komoditas, data dan informasi non komoditas, sistem informasi, keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta kepegawaian (jabatan fungsional statistisi dan pranata

komputer). Pada tahun 2025, telah ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 3,54 (indeks).

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pusdatin dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember 2025 terhadap layanan yang terdapat di Pusdatin. Responden adalah penerima pelayanan Pusdatin yaitu PNS/TNI/POLRI, swasta, wiraswasta, pelajar/mahasiswa.

Kuesioner survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di Pusdatin disusun berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan. Unsur-unsur pengukuran IKM tersebut adalah 1) Kemudahan persyaratan administrasi; 2) Kemudahan alur proses pelayanan; 3) Kecepatan waktu penyelesaian; 4) Pelayanan tanpa dipungut biaya/tarif; 5) Layanan yang sesuai kebutuhan; 6) Kompetensi/Kemampuan Petugas; 7) Kesopanan dan keramahan petugas; 8) Penanganan pengaduan; dan 9) Sarana dan prasarana yang tersedia.

Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2025 berdasarkan survei pengguna layanan sebesar 3,60 dari target sebesar 3,54. Hal ini berarti capaian kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 101,69% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Secara rinci hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	3.54 Indeks	3.60 Indeks	101,69%

Tabel 4 Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2025

No.	Unsur	Tahun 2025		
		Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur	Nilai Indeks
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	1.560	3,36	0,37
2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	1.611	3,47	0,39
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1.611	3,47	0,39
4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	1.856	4,00	0,44
5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	1.562	3,37	0,37
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	1.856	4,00	0,44
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	1.576	3,40	0,38
8	Penanganan Pengaduan	1.761	3,80	0,42
9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	1.640	3,53	0,39
<b>Nilai Indeks</b>				<b>3,60</b>
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				<b>90,00</b>
<b>Kinerja Pusdatin</b>				<b>(A) Sangat Baik</b>

Tabel 5 Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025

### 3.2.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai IKM Pusdatin Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebesar 95,84%. Meskipun capaian IKM tahun 2025 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun karena adanya kenaikan target IKM yang cukup tinggi di tahun 2025 menyebabkan perbandingan persen realisasi tahun 2025 dengan persen realisasi rata-rata tahun sebelumnya dibawah 100%. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Target Realisasi Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	% Rata-rata tahun 2021-2024	% Realisasi 2025 thd rata-rata realisasi tahun sebelumnya
Target Indeks Kepuasan	3,09	3,1	3,11	3,33	3,54	3,16	95,84
Realisasi Indeks Kepuasan	3,26	3,29	3,33	3,52	3,6	3,35	
% Realisasi Terhadap Target	105,5	106,13	107,07	105,71	101,69	106,10	

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

### 3.2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Pusdatin tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Kementan tahun 2025-2029 pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target Realisasi Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi 2025 thd target jangka menengah
Target Indeks Kepuasan	3,54	3,56	3,57	3,59	3,61	101,69
Realisasi Indeks Kepuasan	3,6	-	-	-	-	
% Realisasi Terhadap Target	101,69	-	-	-	-	

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dari Tabel 7 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memperoleh nilai **101,69%** yang menunjukkan capaian realisasi sudah melebihi target dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria **“Sangat Berhasil”**.

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target tahun 2029 pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memperoleh nilai **99,72%** yang dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria "**Berhasil**".

### **3.2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Berdasarkan prinsip pelayanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi indikator penilaian kualitas pelayanan, yaitu: 1) Kemudahan persyaratan administrasi; 2) Kemudahan alur proses pelayanan; 3) Kecepatan waktu penyelesaian; 4) Pelayanan tanpa dipungut biaya/tarif; 5) Layanan yang sesuai kebutuhan; 6) Kompetensi/kemampuan petugas; 7) Kesopanan dan keramahan petugas; 8) Penanganan pengaduan; dan 9) Sarana dan prasarana yang tersedia.

Sebagai unit pelayanan publik Pusdatin selalu berbenah diri dan terus meningkatkan mutu pelayanan. Berbagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan terus dilakukan oleh Pusdatin baik dari sisi kesederhanaan alur pelayanan, waktu pelayanan dan biaya layanan. Beberapa regulasi/kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan terus dilakukan review dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Pelayanan dan publikasi data pertanian merupakan pelayanan data yang ada di Pusdatin. Seluruh pelayanan data pertanian satu pintu berada di Pusdatin. Pelayanan berupa pelayanan yang bersifat langsung yaitu dengan mengunjungi ruang layanan data yang telah disediakan dan dikelola oleh Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data Pusdatin. Pengunjung atau pemohon data dapat datang ke ruang layanan dan mengisi form layanan yang sudah tersedia.

Pelayanan data dapat juga melalui online menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin dengan mengakses alamat <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id/>.

Demi terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan; serta terwujudnya kepuasan pelanggan/pengguna atau pemangku kepentingan, ISO 9001:2015 merupakan salah satu standar internasional untuk menilai kemampuan organisasi dalam memenuhi;

- 1) Persyaratan/harapan pelanggan/pengguna;
- 2) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk produk dan persyaratan organisasi sendiri (tata kelola yang baik).

Sejalan dengan tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penerapan SNI ISO 9001 dibutuhkan oleh Pusdatin Pertanian dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, penerapan ISO 9001:2015 melalui persyaratan *continual improvement* nya (peningkatan berkelanjutan) sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*).

### 3.2.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar Rp. 23.888.624.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.792.993.625,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 8.

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
12	12	23.888.624.000	23.792.993.625	1.982.749.469	1.990.718.667	0,996	0,40	50,01

Tabel 8 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \left( 1 - \frac{RAK / RVK}{PAK/TVK} \right) \times 100 \\ &= \left( 1 - \frac{23.792.993.625/12}{23.888.624.000/12} \right) \times 100 \\ &= (1 - 0,996) \times 100 \\ &= 0,40 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\ &= 50\% + \frac{0,40\% \times 50\%}{20} \\ &= 50,01\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,40% dengan nilai efisiensi 50,01% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.1.5 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pusdatin didukung dua komponen utama, yaitu komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kepuasan pengguna layanan Pusdatin antara lain :

#### a. Pelayanan dan Publikasi Data

Pelayanan dan publikasi data pertanian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan publikasi dan informasi data pertanian. Pelayanan dan publikasi data pertanian merupakan pelayanan data yang ada di Pusdatin. Seluruh pelayanan data pertanian satu pintu berada di Pusdatin.

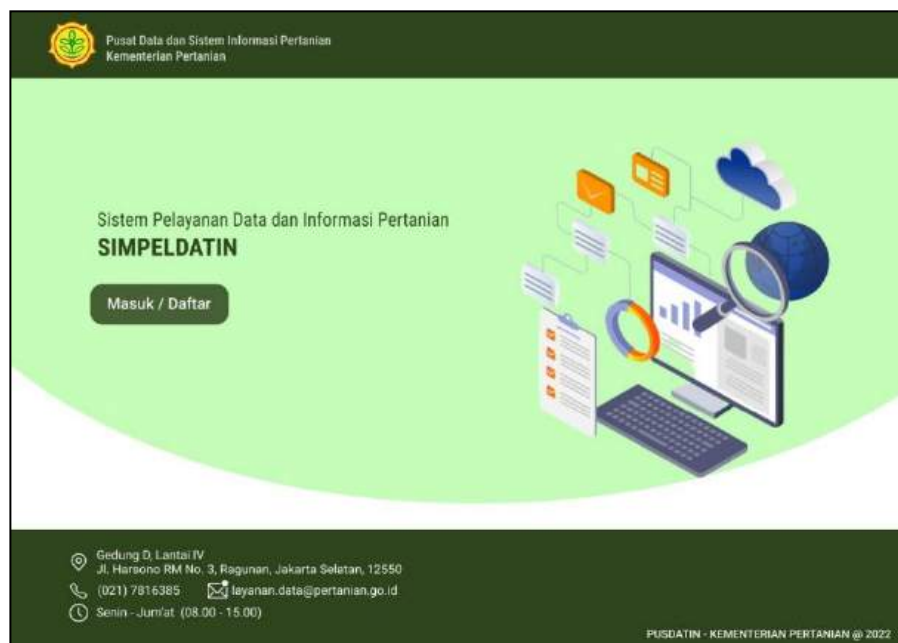
Pelayanan berupa pelayanan yang bersifat langsung yaitu dengan mengunjungi ruang layanan data yang telah disediakan dan dikelola oleh Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data Pusdatin. Pengunjung atau pemohon data dapat datang ke ruang layanan dan mengisi form layanan yang sudah tersedia.



Gambar 16 Ruang Layanan Pusdatin

Pelayanan data dapat juga melalui online menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin dengan mengakses alamat <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id/>.

Pada tahun 2025 telah dilakukan penyempurnaan aplikasi Simpeldatain serta penambahan petugas layanan data untuk mempercepat proses pelayanan terhadap pengguna layanan.



Gambar 17 Aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatain

- b. Rapat koordinasi bulanan terkait layanan data pertanian dengan melibatkan petugas layanan data di kelompok data komoditas dan non komoditas
- c. Penyajian data pada portal Satu Data Pertanian yang mudah diakses oleh publik (open access)
- d. Rapat koordinasi triwulanan dengan satker pembina survey kepuasan masyarakat (Biro OSDMA)

### 3.2.2 Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 297, salah satu fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) adalah pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelaksanaan keamanan informasi dan siber serta perlindungan data pribadi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, Pusdatin menyediakan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari:

1. Layanan Sistem Jaringan Komputer;
2. Layanan Aplikasi Sistem Informasi; dan
3. Layanan Keamanan Siber.

Service Level Agreement (SLA) adalah jaminan yang diberikan Pusdatin kepada pengguna dalam penyediaan Layanan TIK. Berdasarkan hasil identifikasi telah disepakati bahwa SLA Layanan TIK dipengaruhi oleh:

1. SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, yang terdiri dari:
  - a. Service Level Agreement (SLA) Layanan Internet (%)
  - b. Service Level Agreement (SLA) Layanan Data Center (%)
  - c. Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%)
2. SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, yang terdiri dari:
  - a. Pemenuhan atas permintaan layanan tim kerja Aplikasi Sistem Informasi (%)
  - b. Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%)
  - c. Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan
3. SLA Layanan Keamanan Siber, yang terdiri dari:
  - a. Service Level Agreement (SLA) Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%)

b. Service Level Agreement (SLA) Layanan Penanganan Keamanan Siber (%)

Pengukuran SLA dilakukan setiap bulan (Januari s.d Desember) untuk masing-masing indikator.

Target SLA Layanan TIK tahun 2025 adalah sebesar 95% yang diperoleh dari target rata-rata pengukuran SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, dan SLA Layanan Keamanan Siber, sebagaimana tabel berikut ini:

Layanan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
Layanan TIK	1.1	Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	95%	99.01%
1. Layanan Sistem Jaringan Komputer	1.1	Service Level Agreement (SLA) Layanan Internet (%)	95.00%	100%
	1.2	Service Level Agreement (SLA) Layanan Data Center (%)	95.00%	100%
	1.3	Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%)	95.00%	98.77%
2. Layanan Aplikasi Sistem Informasi	2.1	Pemenuhan atas permintaan layanan tim kerja Aplikasi Sistem Informasi (%)	95.00%	99.41%
	2.2	Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%)	95.00%	100.00%
	2.3	Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan	95.00%	98.15%
3. Layanan Keamanan Siber	3.1	Service Level Agreement (SLA) Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	95.78%
	3.2	Service Level Agreement (SLA) Layanan Penanganan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%

Tabel 9 SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, dan SLA Layanan Keamanan Siber

Berdasarkan hasil monitoring rata-rata pengukuran SLA Layanan TIK bulan Januari s.d Desember 2025, SLA Layanan TIK tahun 2025 adalah sebesar 99.01% melebihi target kinerja tahun 2025 yang ditargetkan yaitu sebesar 95% dengan rincian sebagaimana terlampir.

Analisis:

- Pencapaian SLA untuk Layanan TIK melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan TIK yang andal.
- Semua indikator kinerja Layanan Sistem Jaringan Komputer mencapai target yang ditetapkan, terendah pada indikator pemenuhan atas permintaan layanan sistem jaringan komputer yang mencapai 98,77%. Meskipun dibawah capaian indikator lainnya, angka tersebut masih menunjukkan tingkat pemenuhan yang baik.
- Service Level Agreement (SLA) Layanan Data Center (%): Target ketersediaan layanan Data Center adalah 95%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, ketersediaan layanan Data Center mencapai 100%, hal ini menunjukkan ketersediaan layanan data center yang sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan.
- Service Level Agreement (SLA) Layanan Internet (%): Target ketersediaan layanan Internet adalah 95%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, ketersediaan layanan Internet mencapai 100%, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap target SLA.
- Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%): Target pemenuhan permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer adalah 95%. Meskipun mencapai performa yang tinggi sebesar 98,77%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan terhadap permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer.
- Semua indikator kinerja layanan Aplikasi Sistem Informasi mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan layanan dan pemeliharaan aplikasi.
- Pemenuhan atas permintaan layanan tim kerja Aplikasi Sistem Informasi (%): Target pemenuhan permintaan layanan tim kerja Aplikasi Sistem Informasi adalah 95%. Meskipun mencapai kinerja di

atas target yaitu sebesar 99,41%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan permintaan terhadap layanan tim kerja Aplikasi Sistem Informasi.

- Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%): Target rasio ini adalah 95%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, 100% aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Pertanian selesai tepat waktu, melampaui target yang ditetapkan.
- Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan (%): Target rasio ini adalah 95%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, semua dokumentasi aplikasi memenuhi 7/9 standar yang ditetapkan, mencapai 98,15% melebihi target yang ditetapkan.
- Semua indikator kinerja layanan Keamanan Siber mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan layanan Keamanan Siber.
- Service Level Agreement (SLA) Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%): Target pemenuhan permintaan layanan Keamanan Siber adalah 95%. Meskipun mencapai kinerja di atas target yaitu sebesar 95,78%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan permintaan terhadap layanan Keamanan Siber.
- Service Level Agreement (SLA) Layanan Penanganan Keamanan Siber (%): Target layanan Penanganan Keamanan Siber adalah 95%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, layanan ini mencapai 100% melampaui target yang ditetapkan.
- Secara keseluruhan, kinerja Layanan TIK sudah sangat baik dengan tingkat pemenuhan di atas target selama periode yang diamati.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	95 %	99,01 %	104,22 %

Tabel 10 Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2025

### 3.2.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pusdatin Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebesar 97,52%. Meskipun capaian realisasi SLA tahun 2025 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun karena adanya kenaikan target SLA yang cukup tinggi di tahun 2025 menyebabkan perbandingan persen realisasi tahun 2025 dengan persen realisasi rata-rata tahun sebelumnya dibawah 100%. Secara rinci, capaian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target Realisasi Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	% Rata-rata tahun 2021-2024	% Realisasi 2025 thd rata-rata realisasi tahun sebelumnya
Target Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	90,94	91,94	91,94	94,17	95	92,25	97,52
Realisasi Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	98,31	98,8	98,61	98,55	99,01	98,57	

Target Realisasi Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	% Rata-rata tahun 2021-2024	% Realisasi 2025 thd rata-rata realisasi tahun sebelumnya
% Realisasi Terhadap Target	108,1	107,46	107,25	104,65	104,22	106,87	

Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya

### 3.2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusdatin, tetapi tidak terdapat dalam Renstra Kementan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra).

### 3.2.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Layanan diberikan menggunakan aplikasi layanan dan dilaksanakan sesuai SOP yang sudah ditetapkan
2. Pengecekan dan perawatan rutin perangkat penunjang layanan
3. Sosialisasi prosedur dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan TIK
4. Tersedianya layanan Security Operation Center 24x7 yang melakukan monitoring dan pelaporan insiden siber
5. Tersedianya Sebagian dari kebutuhan SDM bidang kompetensi keamanan siber dan kriptografi (Sandiman dan Manggala informatika)
6. Tersedianya ruang SOC untuk melakukan monitoring sensor keamanan seperti (firewall, ear, siem, ddos dan cdn)
7. Tersedianya lisensi platform keamanan siber yang terkelola (Firewall, Edr, Siem, Anti dos dan CDN)

### 3.2.2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp. 29.045.516.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 15.766.505.254,-. Pada penilaian SLA terdapat 2 jenis keluaran yaitu Layanan dan Sistem. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel.

#### A. Efisiensi Keluaran (Layanan)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
4	4	1.088.880.000	1.046.940.253	261.735.063	272.220.000	0,961	3,85	50,10

Tabel 12 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \left(1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}\right) \times 100 \\
 &= \left(1 - \frac{1.046.940.253/4}{1.088.880.000/4}\right) \times 100 \\
 &= (1 - 0,961) \times 100 \\
 &= 3,85\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{3,85\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,10\%
 \end{aligned}$$

#### B. Efisiensi Keluaran (Sistem)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
17	14	27.956.636.000	14.719.565.001	1.051.397.500	1.644.508.000	0,639	36,07	50,90

Tabel 13 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \left(1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}\right) \times 100 \\
 &= \left(1 - \frac{14.719.565.001/14}{27.956.636.000/17}\right) \times 100 \\
 &= (1 - 0,639) \times 100 \\
 &= 36,07\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{36,07\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,90\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Efisiensi Service Level Agreement (SLA)} = \frac{3,85 + 36,07}{2} = 19,96\%$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 19,96% dengan nilai efisiensi rata-rata sebesar 50,50% atau dapat dikatakan cukup efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### **3.2.2.5 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

1. Pemenuhan atas permintaan layanan keamanan siber
2. Kegiatan layanan Security Operation Center, layanan keamanan anti malware dan anti DDOS, dan sistem pra production sistem elektronik Kementan
3. Penyedia layanan internet dan pendukung layanan terkait TIK
4. Penerapan SOP Layanan TIK

### **3.2.3 Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Terhadap Layanan Bagian Umum**

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memiliki peran vital dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan kemajuan dalam penyediaan layanan terkait informasi. Adapun untuk mendukung capaian yang dimaksud perlu didukung aspek layanan yang berkaitan dengan unsur perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta sarana pendukung lainnya. Dalam hal fungsi tersebut Satker Pusdatin dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Usaha sesuai dengan Kepmentan No. 103/KPTS./OT.050/M/02/2025 tertanggal 26 Februari 2025 tentang Kelompok substansi dan Tim Kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan survei kepuasan layanan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah dilakukan survei Tingkat Kepuasan layanan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di mana meliputi unsur layanan lingkup fungsi ketatausahaan yang juga merupakan bagian dari tugas di Bagian Umum Pusdatin.

Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai tingkat kepuasan pegawai Pusdatin terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Survei ini dirancang untuk mengevaluasi persepsi dan pengalaman pegawai terhadap beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari

layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hingga layanan surat menyurat.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada para pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap setiap layanan yang disediakan dengan menggunakan skala penilaian tertentu.

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam menyusun perbaikan layanan yang lebih baik di masa mendatang. Melalui pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi pegawai, diharapkan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dapat mengoptimalkan kualitas layanan yang disediakan, sehingga dapat lebih responsif, efisien, dan memenuhi kebutuhan pegawai.

Pelaksanaan survey dilakukan di internal Pusdatin di mana dilaksanakan melalui link: <https://forms.gle/ajzxbvUpXRWZMyA9> kepada pegawai Pusdatin sebanyak 93 orang pegawai. Adapun pengisian kuesioner dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Indikator kinerja nilai Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pegawai Pusdatin atas layanan yang diberikan Sub Kelompok Tata Usaha, Bagian Umum Pusdatin. Pengukurannya Tingkat kepuasan melalui capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan di Tim Kerja Tata Usaha.

Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum pada tahun 2025 berdasarkan survei pengguna layanan sebesar 3,64 Skala likert dari target sebesar 3,56 Skala likert. Hal ini berarti capaian kinerja Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum sebesar 102,25% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Secara rinci hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan Bagian Umum tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum	3,56 Skala Likert	3,64 Skala Likert	102,25%

*Tabel 14 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum Tahun 2025*

### 3.2.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebesar 101,96% yang menunjukkan capaian tahun 2025 melebihi capaian tahun 2024. Secara rinci, capaian Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Target realisasi Indikator	2024	2025	% Realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024
Realisasi tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum	3,56	3,64	101,96%
Target Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum	3,55	3,56	
% Realisasi Terhadap Target	100,28	102,25	

Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

### 3.2.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap Layanan Bagian Umum pada tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusdatin, tetapi tidak terdapat dalam Renstra Kementan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra).

### 3.2.3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Berdasarkan hasil survei Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Rapat: 3,66

2. Ketersediaan dan Kebersihan Sarana Ibadah: 3,61
3. Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Kerja: 3,59
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor: 3,58
5. Layanan Perencanaan terkait Usulan RKA-KL: skor 3,62
6. Layanan Usulan Revisi Anggaran dan Kegiatan (Revisi POK/DIPA): 3,65
7. Layanan Keuangan Terkait Proses Pencairan LS: 3,60
8. Layanan Keuangan Terkait Verifikasi Dokumen Keuangan: 3,65
9. Layanan Keuangan Terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan: 3,85
10. Layanan Keuangan Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja: 3,76
11. Layanan Kepegawaian Terkait Proses Kenaikan Pangkat: 3,62
12. Layanan Kepegawaian Terkait Kenaikan Gaji Berkala: 3,60
13. Layanan Kepegawaian Terkait Kenaikan Jabatan: 3,57
14. Layanan Surat Menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar): 3,61

### 3.2.3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum sebesar Rp. 2.544.894.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.317.155.006,-. Pada penilaian ini terdapat 6 jenis keluaran yaitu Orang, Layanan, Kegiatan, Dokumen, Unit, dan m2. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

#### A. Efisiensi Keluaran (Orang)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
99	99	153.639.000	153.312.420	1.548.610	1.551.909	0,998	0,21	50,01

Tabel 16 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK}}{\text{RVK}}) \times \frac{\text{PAK}}{\text{TVK}} \times 100 \\
 &= (1 - \frac{153.312.420}{99}) \times \frac{153.639.000}{99} \times 100 \\
 &= (1 - 0,998) \times 100 \\
 &= 0,21\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi} \times 50\%)$$

$$= 50\% + \frac{20}{20} \times (0,21\% \times 50\%)$$

$$= 50,01\%$$

#### B. Efisiensi Keluaran (Layanan)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
2	2	155.000.000	154.794.330	77.397.165	77.500.000	0,999	0,13	50,00

$$\text{Efisiensi} = \left(1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}\right) \times 100$$

$$= \left(1 - \frac{154.794.330/2}{155.000.000/2}\right) \times 100$$

$$= (1 - 0,999) \times 100$$

$$= 0,13\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20}$$

$$= 50\% + \frac{0,13\% \times 50\%}{20}$$

$$= 50,00\%$$

#### C. Efisiensi Keluaran (Kegiatan)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
1	1	125.000.000	124.989.975	124.989.975	125.000.000	0,9999	0,01	50,00

$$\text{Efisiensi} = \left(1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}\right) \times 100$$

$$= \left(1 - \frac{124.989.975/1}{125.000.000/1}\right) \times 100$$

$$= (1 - 0,9999) \times 100$$

$$= 0,01\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20}$$

$$= 50\% + \frac{0,01\% \times 50\%}{20}$$

$$= 50,00\%$$

#### D. Efisiensi Keluaran (Dokumen)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
11	11	340.000.000	339.747.431	30.886.130	30.909.091	0,999	0,07	50,00

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK}}{\text{RVK}}) \times 100 \\
 &\quad \frac{\text{PAK/TVK}}{\text{PAK/TVK}} \\
 &= (1 - \frac{339.747.431/11}{340.000.000/11}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,999) \times 100 \\
 &= 0,07\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{0,07\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,00\%
 \end{aligned}$$

#### E. Efisiensi Keluaran (Unit)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK PAK/TVK	E (%)	NE (%)
37	37	1.671.255.000	1.447.724.000	39.127.676	45.169.054	0,866	13,38	50,33

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK}}{\text{RVK}}) \times 100 \\
 &\quad \frac{\text{PAK/TVK}}{\text{PAK/TVK}} \\
 &= (1 - \frac{1.447.724.000/37}{1.671.255.000/37}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,866) \times 100 \\
 &= 13,38\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{13,38\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,33\%
 \end{aligned}$$

#### F. Efisiensi Keluaran (m<sup>2</sup>)

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK PAK/TVK	E (%)	NE (%)
124	124	100.000.000	96.586.850	778.926	806.452	0,966	3,41	50,09

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK}}{\text{RVK}}) \times 100 \\
 &\quad \frac{\text{PAK/TVK}}{\text{PAK/TVK}} \\
 &= (1 - \frac{96.586.850/124}{100.000.000/124}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,966) \times 100 \\
 &= 3,41\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50\%)}{20} \\
&= 50\% + \frac{(3,41\% \times 50\%)}{20} \\
&= 50,09\%
\end{aligned}$$

$$\text{Capaian Efisiensi} = \frac{(0,21 + 0,13 + 0,01 + 0,07 + 13,38 + 3,41)}{6} = 2,87\%$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,87% dengan nilai efisiensi rata-rata sebesar 50,07% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.3.5 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai Pusdatin
2. Pemeliharaan dan renovasi ruang kerja dan mushola untuk meningkatkan kenyamanan kerja pegawai
3. Pelayanan kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jenjang jabatan, uji kompetensi, dan lain-lain
4. Pembayaran gaji dan tunjangan yang diberikan tepat waktu
5. Layanan koordinasi bahan perencanaan seperti penyusunan KAK, RAB, serta revisi anggaran (RKAKL) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di tiap tim kerja agar berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan

### 3.2.4 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan

kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Nilai IPS diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori sebagaimana berikut:

Nilai Indeks	Predikat
4,2 - 5,0	MEMUASKAN
3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK
2,6 - < 3,5	BAIK
1,8 - < 2,6	CUKUP
< 1,8	KURANG

*Tabel 17 Predikat Penilaian Tingkat Kematangan*

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor: B-236/02000/TS.160/2025 tersebut serta mengacu pada Keputusan Kepala BPS Nomor 605 tahun 2024, maka hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 Kementerian menggunakan hasil IPS Tahun 2024.

Indeks Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 3,67 dari target sebesar 3,28. Hal ini berarti capaian kinerja Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 111,89% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Secara rinci hasil Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,28 Indeks	3,67 Indeks	111,89%

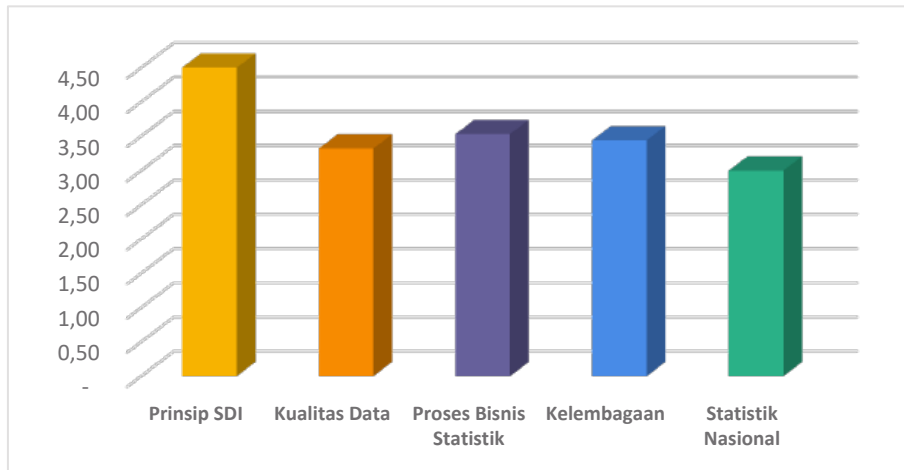
Tabel 18 Capaian Indeks Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025

Berikut rincian hasil IPS tahun 2025 Kementerian Pertanian:

Kegiatan Statistik Sektoral dinilai pada Kementerian Pertanian mencakup Pendataan Data Hortikultura dan Pendataan Data Ternak. Berdasarkan serangkaian pelaksanaan EPSS, Kementerian Pertanian memperoleh capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar **3,67** dengan predikat “**Sangat Baik**”. Atas capaian nilai tersebut menjadikan Kementerian Pertanian mendapatkan anugerah Anindhita Wistara Data, terbaik 1 untuk kategori Kementerian. Hasil penilaian EPSS ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024. Adapun rincian hasil indeks pembangunan statistik dan nilai indeks domain hasil penilaian EPSS Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 21.

No	Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
1.	Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	4,50
2.	Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,32
3.	Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,53
4.	Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,44
5.	Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	3,00
<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b>		<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>3,67</b>

Tabel 19 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain EPSS



Gambar 18 Indeks Penilaian Setiap Domain EPSS

Berdasarkan hasil penilaian seperti pada Gambar 1, domain Prinsip SDI memiliki nilai Indeks penilaian tertinggi yaitu mencapai 4,50. Domain Proses Bisnis berada di posisi kedua dengan Indeks sebesar 3,53. Domain Kelembagaan berada di urutan ketiga dengan nilai indeks 3,44. Adapun Domain Kualitas Data dengan capaian indeks 3,32 berada di urutan keempat. Di sisi lain, domain Statistik Nasional memiliki nilai indeks terendah, yaitu sebesar 3,00. Meskipun secara umum indeks penilaian domain EPSS berada di atas 3,00, hasil ini menunjukkan adanya domain yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam domain Statistik Nasional dan Kualitas Data. Adapun rincian hasil penilaian pada masing-masing Aspek dan juga Indikator EPSS seperti berikut.

Nilai Indeks Aspek EPSS

Domain / Aspek	Bobot <sup>1</sup>	Nilai Indeks
<b>Domain Prinsip SDI</b>		
Standar Data Statistik	25%	5,00
Metadata Statistik	25%	5,00
Interoperabilitas Data	25%	4,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	4,00
<b>Domain Kualitas Data</b>		
Relevansi	21%	4,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3,00
<b>Domain Proses Bisnis Statistik</b>		

Domain / Aspek	Bobot <sup>1</sup>	Nilai Indeks
Perencanaan Data	32%	3,33
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	4,00
Penyebarluasan Data	21%	4,00
<b>Domain Kelembagaan</b>		
Profesionalitas	35%	3,25
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	4,00
<b>Domain Statistik Nasional</b>		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3,00

Keterangan: <sup>1</sup>Bobot aspek pembentuk indeks domain

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2025 ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan lingkup Kementerian Pertanian. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebagai hasil dari EPSS merupakan salah satu indikator yang berkontribusi dalam RB Kementerian Pertanian. Pusdatin selaku penanggung jawab EPSS lingkup Kementerian Pertanian selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh produsen data untuk mencapai nilai IPS yang lebih baik setiap tahun.

#### 3.2.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Pusdatin tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Kementan tahun 2025-2029 pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilihat pada Tabel berikut :

Target Realisasi Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi 2025 thd target jangka menengah
Target tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,28	3,36	3,43	3,51	3,59	111,89
Realisasi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,67	-	-	-	-	

Target Realisasi Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi 2025 thd target jangka menengah
% Realisasi Terhadap Target	111,89	-	-	-	-	

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Dari Tabel 7 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral memperoleh nilai **111,89%** yang menunjukkan capaian realisasi sudah melebihi target dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria “**Sangat Berhasil**”.

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target tahun 2029 pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral memperoleh nilai **102,23%** yang menunjukkan capaian realisasi sudah melebihi target dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria “**Sangat Berhasil**”.

#### 3.2.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Pelibatan tim data (Komoditas dan Non Komoditas) dalam penyiapan bukti dukung penilaian
2. Koordinasi intensif dengan produsen data eselon I yang menjadi lokus penilaian
3. Pembinaan intensif dari pembina data (BPS)
4. Penyempurnaan evidence penilaian dari hasil penilaian di tahun sebelumnya

#### 3.2.4.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya capaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral sebesar Rp. 368.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 368.887.420,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
1	1	368.953.000	368.887.420	368.887.420	368.953.000	0,9998	0,02	50,00

Tabel 21 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK}}{\text{RVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{368.887.420}{368.953.000}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,9998) \times 100
 \end{aligned}$$

$$= 0,02\%$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50\%)}{20} \\ &= 50\% + \frac{(0,02\% \times 50\%)}{20} \\ &= 50,00\%\end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,02% dengan nilai efisiensi sebesar 50,00% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

#### 3.2.4.4 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

1. Membentuk tim penilai internal kementan
2. Rapat koordinasi dan pembinaan bulanan dgn pembina data (BPS) serta produsen data kementan
3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dgn pembina data (BPS)
4. Pengawasan penyelenggaraan statistik sektoral oleh BPS antara lain pengajuan rekomendasi kegiatan statistik (Romantik), bagi pakai data melalui sistem pertukaran data statistik (trans data) BPS, permohonan data tidak dipungut biaya (nol rupiah) di aplikasi Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK) BPS, dan lain-lain.

#### 3.2.5 Indeks SPBE Kementan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan terpadu, sehingga penerapannya efektif, efisien, berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

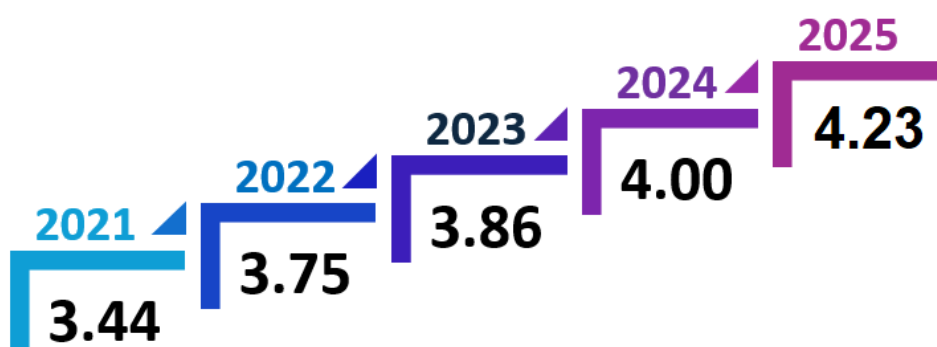
Pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE dilakukan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Indeks SPBE Kementan pada tahun 2025 sebesar 4,23 dari target sebesar 4,26. Hal ini berarti capaian kinerja Indeks SPBE Kementan sebesar 99,30% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Berhasil. Secara rinci, hasil kinerja Indeks SPBE Kementan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Indeks SPBE Kementan	4,26 Indeks	4,23 Indeks	99,30%

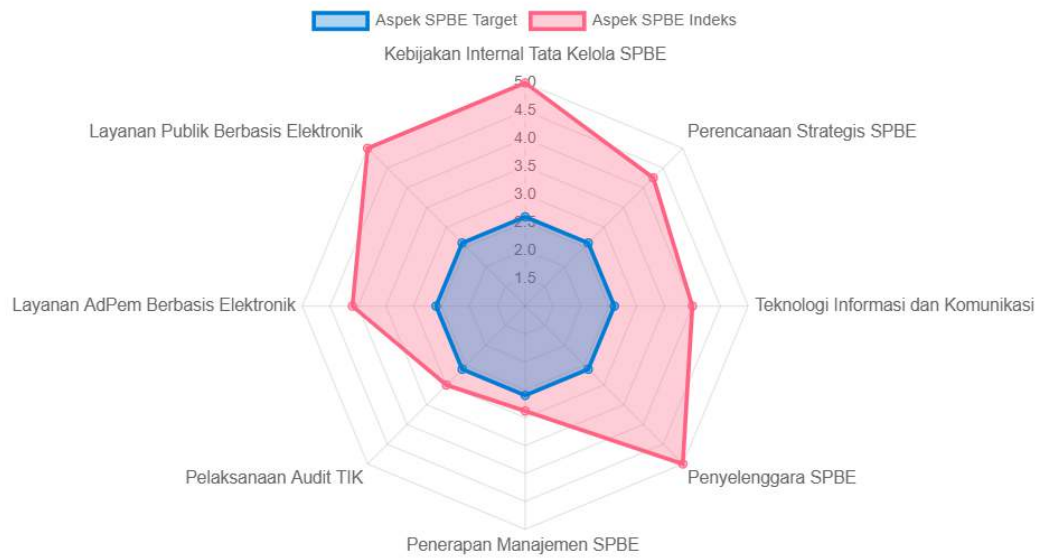
Tabel 22 Capaian Indeks SPBE Kementan Tahun 2025

Indikator Indeks SPBE Kementan menjadi indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) hanya pada tahun 2025. Meskipun demikian, penilaian Indeks SPBE sudah ada sejak tahun 2021. Capaian Indeks SPBE Kementan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025 ini, tingkat kematangan penerapan SPBE Kementan telah mencapai predikat **Memuaskan** dengan Indeks SPBE mencapai **4,23**. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam penerapan SPBE di Kementan. Pada tahun 2026 dan seterusnya indeks SPBE berubah menjadi indeks Pemerintah Digital (Pemdi).



Gambar 19 Indeks SPBE Kementan 2021-2025

## Hasil Evaluasi SPBE 2025



Gambar 20 Hasil Evaluasi SPBE Kementan 2025

Tabel 23 Hasil Evaluasi SPBE Kementan 2025

<b>Kementerian Pertanian</b>	
K/L/D	: Kementerian
Indeks SPBE	: 4.23
Predikat SPBE	: Memuaskan
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>: 5.00</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 5.00
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>: 4.30</b>
Perencanaan Strategis SPBE	: 4.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 4.00
Penyelenggara SPBE	: 5.00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>: 2.91</b>
Penerapan Manajemen SPBE	: 2.88
Pelaksanaan Audit TIK	: 3.00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>: 4.46</b>
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 4.10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 5.00

### 3.2.5.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Pusdatin tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Kementan tahun 2025-2029 pada indikator kinerja Indeks SPBE Kementan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target Realisasi Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi 2025 thd target jangka menengah
Target Indeks SPBE Kementan	4,26	-	-	-	-	99,30
Realisasi Indeks SPBE Kementan	4,23	-	-	-	-	
% Realisasi Terhadap Target	99,30	-	-	-	-	

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Kementan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Dari Tabel 7 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator Indeks SPBE Kementan memperoleh nilai **99,30%** yang menunjukkan capaian realisasi belum melebihi target, namun demikian untuk penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria “**Berhasil**”.

### 3.2.5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Meskipun indeks SPBE Kementerian Pertanian menunjukkan tren positif—meningkat dari 4.00 pada tahun 2024 (Predikat Sangat Baik) menjadi 4.23 pada tahun 2025 (Predikat Memuaskan)—capaian tersebut masih belum memenuhi target penilaian mandiri sebesar 4.26. Kesenjangan (gap) ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan serta komitmen kolaboratif dari stakeholders yang berdampak pada belum seragamnya kualitas implementasi SPBE di seluruh unit kerja, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target kematangan SPBE yang telah ditetapkan secara internal.

Berikut beberapa penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator indeks SPBE Kementan :

1. Koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan

2. Penyusunan target dan rencana aksi yang melibatkan pemangku kepentingan
3. Melaksanakan kegiatan dan menyiapkan eviden sesuai rencana aksi yang sudah disusun
4. Penyusunan eviden dilakukan sesuai pedoman yang diberikan
5. Penerapan SPBE di Kementan dilakukan sesuai kebijakan internal
6. Melakukan komunikasi intensif melalui forum kolaborasi SPBE Kementan
7. Pelibatan tim koordinasi SPBE (unit eselon 1, biro dan pusat) sebagai pengampu indikator
8. Koordinasi dan verval terjadwal untuk melakukan penyusunan evidence pemenuhan indikator
9. Koordinasi intensif dengan Menpan RB dan Brin untuk melakukan internalisasi kriteria pemenuhan evidence SPBE
10. Komitmen tim koordinasi SPBE yang tinggi dalam menyiapkan pemenuhan kriteria evidence di masing-masing indikator

### 3.2.5.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya Indeks SPBE Kementan sebesar Rp. 100.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.232.892,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
1	1	100.304.000	100.232.892	100.232.892	100.304.000	0,999	0,07	50,00

Tabel 25 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK/TVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{100.232.892/1}{100.304.000/1}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,999) \times 100 \\
 &= 0,07\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{0,07\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,00\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,07% dengan nilai efisiensi sebesar 50,00% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

#### **3.2.5.4 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

1. Pelaksanaan forum kolaborasi SPBE yg melibatkan seluruh unit kerja eselon I
2. Penerapan manajemen SPBE
3. Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kementan
4. Sosialisasi dan pendampingan dari kemenpan RB selaku pembina
5. Pengawasan dari inspektorat jenderal

#### **3.2.6 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian (Kementan) adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Kementan terdiri dari Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE sedangkan Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menguraikan/mendeskripsikan substansi arsitektur itu sendiri.

Domain Arsitektur terdiri dari:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan;
4. Domain Arsitektur Aplikasi;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Kementan diatur dalam Permentan Nomor 33 Tahun 2023 yang sebagian telah diubah dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2024. Kebijakan ini memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Penilaian tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE dilakukan berdasarkan rentang Level 0 hingga Level 5 dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Level	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	sudah memiliki arsitektur as-is
2	memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reuiu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan

Realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kematangan implementasi Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian telah mencapai Level 3, sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat dari Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA-SPBE.

Gambar 21 Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA-SPBE

Instansi	Arsitektur As-Is					Arsitektur To-Be					Peta Rencana	Clearance	Reviu dan Evaluasi	Tingkat Kematangan	Aksi		
	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi	Infra	Keamanan	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi						Infra	Keamanan
Kementerian Pertanian	6	103	174	228	507	21	0	6	34	12	5	0	Sudah Ada	Belum	Belum	3	Refresh

Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian sebesar level 3 dari target sebesar level 3. Hal ini berarti capaian kinerja Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE sebesar 100% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Secara rinci hasil Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3 (level)	3 (level)	100,00%

Tabel 26 Capaian Indeks Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian berada pada Level 3, yang menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah berhasil mengintegrasikan aspek arsitektur ke dalam tata kelola digitalnya.
2. Pencapaian Level 3 mengonfirmasi bahwa Kementerian Pertanian telah memenuhi kriteria, yaitu:
  1. Tersedianya dokumentasi arsitektur kondisi eksisting (As-Is).
  2. Tersedianya arsitektur kondisi target (To-Be).
  3. Telah dilakukannya analisis kesenjangan (Gap Analysis).
  4. Telah disusunnya Peta Rencana SPBE yang selaras dengan dokumen arsitektur tersebut.
3. Seluruh bukti dukung dan proses penyusunan arsitektur telah terdokumentasi serta dapat diverifikasi melalui aplikasi SIA-SPBE. Hal ini mencerminkan pengelolaan data arsitektur yang tertib dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

4. Dengan tercapainya Level 3, Kementerian Pertanian telah memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah ke level selanjutnya, yaitu Level 4, dengan mengintegrasikan Arsitektur SPBE ke dalam proses perencanaan dan penganggaran (evaluasi belanja TIK) di masa mendatang.

### 3.2.6.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Pusdatin tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Kementan tahun 2025-2029 pada indikator kinerja Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dapat dilihat pada Tabel berikut:

Target Realisasi Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi 2025 thd target jangka menengah
Target Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	4	5	5	5	100,00
Realisasi Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	-	-	-	-	
% Realisasi Terhadap Target	100,00	-	-	-	-	

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Dari Tabel 7 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE memperoleh nilai **100,00%** yang menunjukkan capaian realisasi sudah sama dengan target, dengan demikian penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria "**Sangat Berhasil**".

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target tahun 2029 pada indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE memperoleh nilai **60,00%**.

### 3.2.6.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Beberapa faktor pendukung yang menjadi penyebab keberhasilan capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE antara lain adalah:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE di lingkup Kementerian Pertanian;
2. Secara bertahap, perencanaan SPBE dilaksanakan secara terpadu sesuai regulasi yang ada;
3. Pengembangan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Didukung dengan Infrastruktur SPBE yang memadai;
5. Tata kelola SPBE yang efektif dan efisien.

### 3.2.6.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE sebesar Rp. 100.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.232.892,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E (%)	NE (%)
						PAK/TVK		
1	1	100.304.000	100.232.892	100.232.892	100.304.000	0,999	0,07	50,00

Tabel 28 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \left(1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}\right) \times 100 \\
 &= \left(1 - \frac{100.232.892/1}{100.304.000/1}\right) \times 100 \\
 &= (1 - 0,999) \times 100 \\
 &= 0,07\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{0,07\% \times 50\%}{20} \\
 &= 50,00\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,07% dengan nilai efisiensi sebesar 50,00% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

#### 3.2.6.4 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

1. Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kementan
2. Penerapan arsitektur dan peta rencana dalam proses clearance TIK

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2025 sesuai DIPA awal sebesar **Rp 44.425.360.000,-**. Seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan total anggaran yang terblokir sebesar **Rp 4.054.083.000,-**, serta terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sampai akhir Desember 2025 menjadi **Rp 60.103.105.000,-** dengan total Pagu Aktif (pagu yang dapat dilaksanakan) sebesar **Rp 56.048.595.000,-**.

Adapun rincian pagu per belanja adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Pagu DIPA anggaran per belanja terdiri dari: (1) Belanja pegawai sebesar **Rp 8.463.044.000,-**; (2) Belanja barang operasional **Rp 12.456.650.000,-** dan (3) Belanja barang non operasional **Rp 14.509.921.000,-** dan (4) belanja modal sebesar **Rp 24.673.490.000,-**.

Berdasarkan Pagu DIPA dikurangi blokir, anggaran per belanja terdiri dari: (1) Belanja pegawai sebesar **Rp 8.463.044.000,-**; (2) Belanja barang operasional **Rp 12.456.650.000,-** dan (3) Belanja barang non operasional **Rp 10.705.411.000,-** dan (4) belanja modal sebesar **Rp 24.423.490.000,-**.

Pagu Anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA. 2025

Program Dukungan Manajemen	Pagu DIPA (Rp)	Pagu DIPA dikurangi Blokir (Rp)
Layanan Manajemen SDM	153.639.000	153.639.000
Layanan BMN	9.870.000	9.870.000

Program Dukungan Manajemen	Pagu DIPA (Rp)	Pagu DIPA dikurangi Blokir (Rp)
Layanan Umum	265.130.000	145.130.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	240.000.000
Layanan Manajemen Keuangan	190.000.000	100.000.000
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	125.000.000	125.000.000
Layanan Data dan Informasi	8.218.091.000	4.627.371.000
Layanan Perkantoran	20.919.694.000	20.919.694.000
Layanan Sarana Internal	1.671.255.000	1.671.255.000
Layanan Prasarana Internal	100.000.000	100.000.000
Sistem Informasi Pertanian	28.210.426.000	27.956.636.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>60.103.105.000</b>	<b>56.048.595.000</b>

Tabel 29 Rincian Anggaran berdasarkan Pagu DIPA dan Pagu Dikurangi Blokir

Realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2025 per jenis belanja sebagaimana tabel berikut:

No	Per Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	8.463.044.000	15,10	8.392.174.683	99,16
2	Belanja Barang Operasional	12.456.650.000	22,22	12.432.619.622	99,81
3	Belanja Barang Non Operasional	10.705.411.000	19,10	8.643.723.932	80,74
4	Belanja Modal	24.423.490.000	43,58	12.977.488.851	53,14
	<b>Total</b>	<b>56.048.595.000</b>	<b>100</b>	<b>42.446.007.088</b>	<b>75,73</b>

Tabel 30 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA dikurangi blokir

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai institusi yang salah satu tugasnya memberikan layanan tentang informasi pertanian, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh para stakeholders. Oleh karena itu melalui pelaksanaan DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2025 diharapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh stakeholders serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pertanian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja oleh Kepala Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Berbagai capaian tercermin dalam capaian indikator utama maupun hasil analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal dengan Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, Indeks SPBE Kementan, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, dan Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum.

Pada tahun 2025 PUSDATIN melaksanakan 1 (satu) sasaran kinerja dengan 6 (enam) indikator kinerja. Secara keseluruhan, PUSDATIN telah berhasil melaksanakan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan capaian nilai sebesar 3,60 skala likert dari target sebesar 3,54 skala likert atau sebesar 101,69% (sangat berhasil); (2) Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan capaian nilai sebesar 99,01% dengan target sebesar 95% atau sebesar 104,22% (sangat berhasil); (3) Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dengan capaian nilai sebesar 3,67 dari target sebesar 3,28 atau sebesar 111,89% (sangat berhasil); (4) Indeks SPBE Kementan dengan capaian nilai sebesar 4,23 dari target 4,26 atau sebesar 99,30% (berhasil); (5) Tingkat

Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dengan capaian nilai sebesar Level 3 dari target Level 3 atau sebesar 100,00% (berhasil); (6) Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan bagian umum dengan capaian sebesar 3,64 skala likert dari target sebesar 3,56 skala likert atau sebesar 102,25% (sangat berhasil). Dengan demikian secara total kinerja Pusdatin adalah sebesar 103,23%, yang berarti sangat berhasil.

Untuk melaksanakan kegiatannya, pada tahun anggaran 2025 Pusdatin memperoleh alokasi pagu DIPA sebesar Rp. 60.103.105.000,-. Selama pelaksanaan anggaran hingga akhir Desember 2025 terdapat Blokir Anggaran sebesar Rp 4.054.510.000,-, sehingga Pagu Aktif (pagu yang dapat dilaksanakan) sebesar Rp. 56.048.595.000,-. Sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi anggaran Pusdatin sebesar Rp. 42.446.007.088,- sehingga realisasi sampai akhir Desember sebesar 75,73%.

Pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Pusdatin atas evaluasi pelayanan tahun 2025. Namun, selama tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang menghambat terkait dengan kinerja pelayanan Pusdatin. Beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut diantaranya:

#### **4.1 Permasalahan**

Berikut permasalahan umum yang terjadi di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025:

1. Masih kurangnya koordinasi Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian antara Pusat dan Daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.
3. Keterlambatan pemutakhiran data dan penyusunan publikasi karena keterlambatan perolehan data dari produsen data, baik di internal Kementerian Pertanian maupun eksternal Kementerian Pertanian.
4. Tidak adanya honor petugas pengumpul data di daerah yang semula dianggarkan di masing-masing Eselon I, berdampak pada penurunan presentase pemasukan data dari daerah.
5. Bimtek pemetaan lahan pada umumnya dilakukan secara zoom karena keterbatasan anggaran sehingga penguasaan dan pemahaman materi oleh peserta daerah kurang maksimal.

6. Kurangnya ketersediaan SDM Keamanan, sumberdaya infrastruktur dan keamanan TIK, serta banyaknya serangan siber yang semakin canggih terhadap sistem informasi yang menyebabkan layanan TIK di Kementan terganggu.
7. Banyaknya BMN yang sudah berstatus rusak berat sehingga menghambat proses pengadaan BMN untuk operasional para pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi.
8. Refocusing anggaran berdampak pada capaian target kegiatan.

Namun masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan. Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi saat ini, rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain;

#### **4.2 Tindak Lanjut**

1. Peran Setjen/Pusdatin dibidang perstatistikan adalah dengan pengembangan metoda pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan membangun, mengembangkan sistem informasi pertanian selain itu juga sebagai walidata Kementan (unit kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana otorisasi, verifikasi, otentifikasi dan penyebaran data dan informasi).
2. Mengingat program strategis Kementan yang fokus pada upaya swasembada pangan, maka Pusdatin juga perlu berbenah agar dapat menyajikan data tepat waktu dan akurat. Untuk menjamin ketersediaan data yang tepat waktu, telah disiapkan dan digunakan aplikasi yang dapat membantu mempercepat pelaporan data dari lapangan meskipun masih ada keterbatasan. Sedangkan untuk menjamin akurasi data, telah dilakukan verifikasi secara langsung ke lapangan dan meminta tim daerah untuk menyiapkan poligon lahan. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, upaya tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif di internal lingkup Pusdatin serta dengan produsen dan pembina data di luar Kementan termasuk dengan Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pusdatin sebagai pembina Sumber Daya Manusia dibidang statistik dan komputer (sistem informasi) ikut berperan aktif dengan mensosialisasikan dan mendukung

terselenggaranya jabatan fungsional statistisi maupun pranata komputer baik di Pusat maupun di daerah dalam mewujudkan data yang berkualitas.

4. Pusdatin telah melaksanakan pelatihan SDM untuk statistisi, pranata komputer dan fungsional lainnya.
5. Pusdatin sudah melakukan perekrutan SDM untuk pengembangan sistem informasi, keamanan siber dan perlindungan data pribadi serta untuk Bagian Umum.
6. Pusdatin telah berkoordinasi secara aktif dan intensif dengan produsen data lingkup Kementerian Pertanian dan BPS selaku pembina data sekaligus produsen data, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi keterlambatan rilis data lagi.
7. Pusdatin telah berupaya untuk menyusun draft regulasi dan Juklak terkait honor petugas pengumpul data di daerah untuk selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Keuangan melalui Biro Perencanaan Kementan.
8. Penyusunan Portal Pertanian Terintegrasi.
9. Penguatan sarana dan prasarana pusat komputasi Kementan dalam kerangka ekosistem Pusat Data Nasional.
10. Peningkatan Jaringan Intra Kementan dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
11. Perencanaan dalam penguatan sistem mulai infrastruktur sampai aplikasi yang memadai, dan penerapan roadmap yang telah disusun sebelumnya.
12. Sosialisasi Pemanfaatan TIK kepada unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian dengan sistem jaringan terpadu dan membangun infrastruktur yang menunjang kerja sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 33 tahun 2023 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No. 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No.51 tahun 2016 Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2217 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Pertanian, serta dokumen panduan dan SOP lainnya.
13. Penguatan SDM keamanan, infrastruktur keamanan, keamanan sistem elektronik Kementan, dan membangun budaya security awareness di Kementerian Pertanian.

14. Transformasi SPBE menjadi pemerintah digital
15. Penerapan UU PDP melalui pembentukan DPO, Data Protection Impact Assessment (DPIA) pada sistem informasi strategis untuk memetakan dan memitigasi risiko kebocoran data
16. Implementasi Arsitektur Pemerintah
17. Tindak lanjut refocusing anggaran:
  - a) Melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan seperti mengurangi jumlah sampel.
  - b) Melakukan sharing anggaran dengan daerah.

**LAMPIRAN 1**  
**Perjanjian Kinerja 2025**





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

GD. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550  
TELEPON : (021) 7822638, 7816384, FAKSIMILE : (021) 7822638, 7816385  
HOMEPAGE : <https://www.pertanian.go.id> - Email : [pusdatin@pertanian.go.id](mailto:pusdatin@pertanian.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Rahayu  
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suwandi  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

**Suwandi**

Pihak Pertama,

**Intan Rahayu**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	3,54 Indeks
		2. Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	95%
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,28 Indeks
		4. Indeks SPBE Kementan	4,26 Indeks
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3 Level (1-5)
		6. Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap Layanan Bagian Umum	3,56 Skala Likert (1-4)

**KEGIATAN**

1. Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian

**ANGGARAN**

Rp. 60.103.105.000

Pihak Kedua



**Suwandi**

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama



**Intan Rahayu**

**LAMPIRAN 2**  
**SK Tim Penyusun Laporan Tahun 2025**





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

GD. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550  
TELEPON : (021) 7822638, 7816384, FAKSIMILE (021) 7822638, 7816385  
HOMEPAGE : <https://www.pertanian.go.id> - Email : [pusdatin@pertanian.go.id](mailto:pusdatin@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor : 31 /Kpts/KU.110/A.8/01/2026

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGUMPUL DATA DAN  
PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) SERTA LAPORAN TAHUNAN  
2025**

**KEPALA PUSAT / KPA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025, maka perlu untuk menetapkan Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan Kinerja serta Laporan Tahunan Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- Mengingat** :
  1. Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  2. Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan** :  
DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-018.01.1.411925/2026 tanggal 01 Desember 2025
- Menetapkan** :  
**KESATU** : Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas selaku Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan Kinerja serta Laporan Tahunan Satker Pusdatin 2025.

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan Kinerja serta Laporan Tahunan
- a. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing Kelompok.
  - b. Menghimpun data dan informasi pemenuhan pencapaian IKU masing-masing Kelompok dan Bagian.
  - c. Menyusun bahan laporan kinerja dan laporan tahunan satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2022.
  - d. Menyajikan bahan laporan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum tertampung dalam Keputusan ini dan dipandang perlu akan diatur kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Pusat Data dan Sistem  
Informasi Pertanian selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran,



*Intan Rahayu*  
Intan Rahayu, S.Si., M.T.  
NIP. 197110211991102001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip

**Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan Kinerja Serta Laporan Tahunan 2025**

No.	Nama	NIP	Lingkup Kegiatan
1.	Andry Polos, S.Kom., M.Si.	198111062009101004	Koordinator
2.	Wibisono, S.E., M.M.	196808211992031001	Ketua
3.	Darmadi, S.E, M.M.	197806192009121001	Sekretaris
4.	Yanni Eria, S.E	199506152025052005	Anggota Tim Kerja Tata Usaha
5.	Iswadi	196809271992031002	Anggota Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data
6.	Siti Nur Sholihah, S.Si.	198311122011012020	Anggota Tim Kerja Data Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.	Yuliawati Rohmah, S.P., M.S.E.	198007112005012001	Anggota Tim Kerja Data Perkebunan dan Peternakan
8.	Kartika Indah Handayani, S.E.	197909282008122002	Anggota Tim Kerja Data Sosial, Prasarana dan Sarana
9.	Vira Desita Amara A.Md.Stat.	199712112022032001	Anggota Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian
10.	Ellis Elyani Shobarniaty, S.Kom.	197111262003122001	Anggota Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer
11.	Lilik Wulaningtyas, S.T.	198307182009012006	Anggota Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi
12.	Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom.	197611132001122002	Anggota Tim Kerja Keamanan Siber
13.	Derit Wirrya Fitri, Sst.	198705292015032002	Anggota Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Intan Rahayu, S.Si., M.T.  
NIP. 197110211991102001



## **LAMPIRAN 3**

# **Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025**



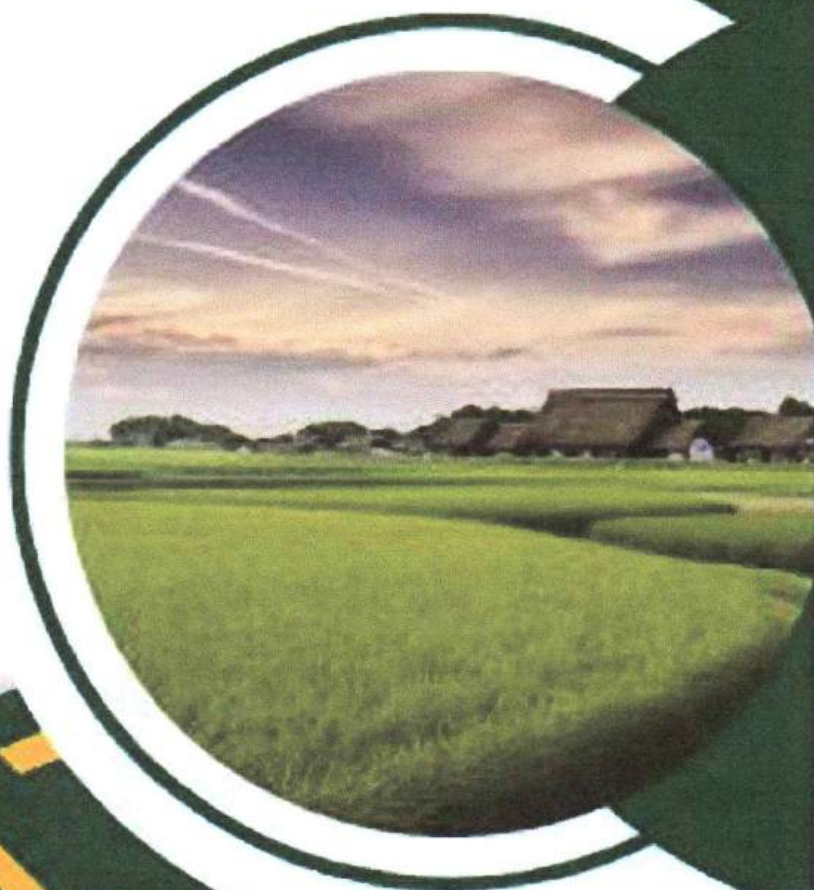


KEMENTERIAN  
PERTANIAN

# RENCANA AKSI KINERJA

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI  
PERTANIAN

2025



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025 dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, maka perlu disusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Upaya untuk mencapai Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan dalam Rencana Aksi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal yang telah diamanatkan pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Sehubungan dengan adanya perubahan Pagu Anggaran, maka disusun Revisi Rencana Aksi Kinerja.

Melalui penyusunan Rencana Aksi ini diharapkan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025-2029, dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

Jakarta, Desember 2025



Intan Rahayu, S.Si., M.T.

## DAFTAR ISI

I	RENCANA AKSI.....	4
	A. Latar Belakang.....	4
	B. Dasar Hukum.....	6
	C. Tujuan Rencana Aksi Kinerja.....	7
	D. Perjanjian Kinerja.....	7
	E. Rencana Aksi Kinerja Pusdatin.....	8
II	PENUTUP.....	8

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA**  
**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**  
**TAHUN 2025**

**I. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian. Dan dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;
- b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;
- c. pelaksanaan keamanan informasi dan siber serta perlindungan data pribadi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal 298, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 299, Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, urusan tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi, layanan publikasi data dan informasi pertanian lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Kementerian Pertanian mencanangkan Satu Data Pertanian sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI melalui Perpres Nomor 39 tahun 2019 untuk menuju Satu Data Indonesia. Dari hasil gagasan tersebut maka dibentuklah Kegiatan Satu Data Pertanian Mendukung Agriculture War Room (AWR). Satu Data Pertanian mendukung AWR ada untuk mewujudkan pelayanan yang diberikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai pengelola AWR dan sebagai walidata Satu Data di Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Satu Data Pertanian melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta instansi terkait meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemerintah Daerah dan Dinas yang membidangi pertanian, serta Kementerian/Lembaga terkait telah terlibat aktif dalam pembangunan Satu Data Pertanian.

Data Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Data Ekonomi Pertanian merupakan data-data yang mempunyai nilai strategis dalam mendukung perencanaan kebijakan sektor pertanian, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Data-data tersebut sangat diperlukan dalam rangka menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan pertanian.

Pengelolaan data pertanian tersebut perlu lebih ditingkatkan, baik dari sisi ketersediaan, ketepatan waktu maupun keakurasian datanya sehingga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna data, baik pengambil kebijakan di lingkup Kementerian Pertanian, di daerah, pelaku usaha pertanian, kalangan akademis maupun petani.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah pelaksanaan e-government yaitu setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan e-government dilingkungannya masing-masing. Untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government maka perlu disusun kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam rangka mewujudkan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut, maka Pusdatin pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem jaringan komputer yang meliputi pengelolaan jaringan intra pemerintah, pengelolaan Pusat Komputasi Kementan, Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi serta Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi .

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk semakin berinovasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholders di Kementerian Pertanian. Saat ini teknologi informasi bukan lagi sebagai alat akan tetapi menjadi sebuah enabler yang dapat menjembatani kebutuhan bisnis di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu posisi Pusdatin merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengintegrasikan aplikasi dan menerapkan eGovernment.

Permintaan layanan TI yang massif dan cepat menuntut Pusdatin untuk dapat mengakomodir layanan TI. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi sistem informasi yang saling terintegrasi. Pusdatin melakukan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sesuai permintaan masing-masing unit kerja. Aplikasi yang dikembangkan dituntut cepat dan saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga menghasilkan aplikasi yang efektif dan efisien.

Pusdatin telah menetapkan standar kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian kepada Sekretaris Jenderal atas target kinerja Pusdatin dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2025.

Dalam rangka mengawal dan memonitor pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, diperlukan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya yaitu Rencana Aksi Pencapaian Kinerja. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yaitu bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Oleh karena itu Pusdatin menyusun Rencana Aksi Kinerja Pusdatin Tahun 2025.

## II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 No.5 Tambahan Lembaran Negara No 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara No 4421);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2004 No. 74 Tambahan Lembaran Negara No 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara No 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara tahun 2010 No. 152, Tambahan Lembaran Negara No. 5178);
9. Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Nomor 3785/Kpts/KU.110/A8/12/2023 Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Nomor 1160/Kpts/KU.110/A8/05/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

### III. Tujuan Rencana Aksi Kinerja

1. Sebagai alat pengendalian pemantauan kinerja kegiatan secara berkala
2. Sebagai sarana alternatif perbaikan atas kendala/permasalahan pelaksanaan kegiatan
3. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan

### IV. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025, Pusdatin memiliki 1 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal	1. Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	3,54 Indeks
		2. Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	95%
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,28 Indeks
		4. Indeks SPBE Kementan	4,26 Indeks
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3 Level (1-5)
		6. Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan Bagian Umum	3,56 Skala Likert (1-4)

## V. Rencana Aksi Kinerja Pusdatin

Dalam rangka mengawal dan memantau keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja, maka Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**RENCANA AKSI  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)	KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU DIPA	PAGU DIPA DIKURANGI BLOKIR	TARGET	REALISASI	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)					
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
SK.1 Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal	<b>IKSK 1</b>	<b>Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian</b>	<b>25.874.644.000</b>	<b>23.888.624.000</b>									
	4577.EBA.963.111.A	Koordinasi awal kegiatan	209.444.000	169.444.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.A	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	462.728.000	342.728.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.B	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Peternakan dan Perkebunan	462.855.000	342.855.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.C	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Sosial, Prasarana dan Sarana Pertanian	554.475.000	434.475.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.D	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Ekonomi Pertanian	463.870.000	343.870.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.E	Pelaksanaan Pelayanan dan Publikasi Data Pertanian	464.665.000	344.665.000	1	1	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.F	Dukungan Data dan Dashboard AWR	203.348.000	0	1	0	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.G	Pembinaan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	1.444.520.000	0	1	0	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.112.L	Kebijakan Satu Peta Pertanian	694.180.000	0	1	0	Layanan	20	45	75	100		
	4577.EBA.963.113.A	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	993.865.000	990.893.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.463.044.000	8.463.044.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran	10.444.535.000	10.444.535.000	1	1	Layanan	20	40	70	100		
	4577.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	9.200.000	9.200.000	1	1	Layanan	20	40	70	100		
	4577.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.380.225.000	1.380.225.000	1	1	Layanan	20	40	70	100		
	4577.EBA.994.002.D	Perawatan Kendaraan Bermotor	622.690.000	622.690.000	1	1	Layanan	20	40	70	100		
	<b>IKSK 2</b>	<b>Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b>	<b>29.539.395.000</b>	<b>29.045.516.000</b>									
	4577.EBA.963.112.J	Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer	428.583.000	308.583.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.EBA.963.112.J	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi	632.367.000	512.367.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.EBA.963.112.N	Pengelolaan Keamanan Siber	79.750.000	79.750.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.EBA.963.112.O	Pengelolaan Pelindungan Data Pribadi	188.080.000	188.080.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	4577.FAB.001.114.B	Keamanan Siber Kementan	5.005.191.000	5.005.191.000	3	3	Sistem	25	50	75	100		
	4577.FAB.001.111.A	Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	964.220.000	734.220.000	7	5	Sistem	25	50	75	100		
	4577.FAB.001.112.A	Pemeliharaan Sistem Informasi Pertanian	153.000.000	149.210.000	3	3	Sistem	25	50	75	100		
	4577.FAB.001.114.A	Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TANPA SUB KOMPONEN)	22.068.015.000	22.068.015.000	4	3	Sistem	25	50	75	100		
	<b>IKSK 3</b>	<b>Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral</b>	<b>534.253.000</b>	<b>368.953.000</b>									
	4577.EBA.963.112.H	Satu Data Pertanian dan EPSS	534.253.000	368.953.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
	<b>IKSK 4</b>	<b>Indeks SPBE Kementan</b>	<b>200.304.000</b>	<b>100.304.000</b>									
	4577.EBA.963.112.K	Pengelolaan SPBE Kementan	200.304.000	100.304.000	1	1	Layanan	25	50	75	100		
<b>IKSK 5</b>	<b>Tingkat implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE</b>	<b>200.304.000</b>	<b>100.304.000</b>										
4577.EBA.963.112.K	Pengelolaan SPBE Kementan	200.304.000	100.304.000	1	1	Layanan	25	50	75	100			
<b>IKSK 6</b>	<b>Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan Bagian Umum</b>	<b>2.754.884.000</b>	<b>2.544.884.000</b>										
1749.EBC.954.112.A	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian	153.639.000	153.639.000	99	99	Orang	25	50	75	100			
4576.EBA.956.111.A	Pelaporan Barang Milik Negara	9.870.000	9.870.000	1	1	Layanan	25	50	75	100			
4576.EBA.962.112.A	Pengelolaan Layanan Kerumahaan	265.130.000	145.130.000	1	1	Layanan	25	50	75	100			
4577.AEA.111.111.A	Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Moveu dan Pelaporan	125.000.000	125.000.000	1	1	Kegiatan	25	50	75	100			
4576.EBO.953.111.A	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	240.000.000	1	1	Documen	25	50	75	100			
4576.EBO.955.112.A	Pelaksanaan Perbendaharaan Internal	190.000.000	100.000.000	10	10	Documen	25	50	75	100			
4577.EBB.951.112.A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.671.255.000	1.671.255.000	37	37	Unit	25	50	75	100			
4577.EBB.971.111.A	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	100.000.000	100.000.000	124	124	m2	25	50	75	100			

## VI. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan arah pencapaian sasaran indikator kinerja Pusdatin sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

**LAMPIRAN 4**  
**Realisasi SP2D Tahun Anggaran 2025**



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 1 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2025 Periode Ini	s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>56,048,595,000</b>	<b>0</b>	<b>28,897,739,229</b>	<b>13,548,267,859</b>	<b>42,446,007,088</b>	<b>75.73 %</b>	<b>13,602,587,912</b>
WA Program Dukungan Manajemen	56,048,595,000	0	28,897,739,229	13,548,267,859	42,446,007,088	75.73 %	13,602,587,912
WA.1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM	153,639,000	0	141,664,920	11,647,500	153,312,420	99.79 %	326,580
<b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>153,639,000</b>	<b>0</b>	<b>141,664,920</b>	<b>11,647,500</b>	<b>153,312,420</b>	<b>99.79 %</b>	<b>326,580</b>
<b>EBC.954 Layanan Manajemen SDM</b>	<b>153,639,000</b>	<b>0</b>	<b>141,664,920</b>	<b>11,647,500</b>	<b>153,312,420</b>	<b>99.79 %</b>	<b>326,580</b>
<b>112 Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian</b>	<b>153,639,000</b>	<b>0</b>	<b>141,664,920</b>	<b>11,647,500</b>	<b>153,312,420</b>	<b>99.79 %</b>	<b>326,580</b>
112.0A TANPA SUB KOMPONEN	153,639,000	0	141,664,920	11,647,500	153,312,420	99.79 %	326,580
521211 Belanja Bahan	20,374,000	0	8,400,000	11,647,500	20,047,500	98.40 %	326,500
000488. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	4,008,000	0	2,688,000	1,320,000	4,008,000	100.00	0
000489. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	16,366,000	0	5,712,000	10,327,500	16,039,500	98.01 %	326,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	129,665,000	0	129,664,920	0	129,664,920	100.00	80
000001. Pengembangan Kapasitas SDM Statistisi, Pranata Komputer, dan Manajerial lainnya	129,665,000	0	129,664,920	0	129,664,920	100.00	80
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000490. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
WA.4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	495,000,000	0	473,056,082	21,485,679	494,541,761	99.91 %	458,239
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>155,000,000</b>	<b>0</b>	<b>147,634,030</b>	<b>7,160,300</b>	<b>154,794,330</b>	<b>99.87 %</b>	<b>205,670</b>
<b>EBA.956 Layanan BMN</b>	<b>9,870,000</b>	<b>0</b>	<b>9,750,300</b>	<b>0</b>	<b>9,750,300</b>	<b>98.79 %</b>	<b>119,700</b>
<b>111 Pelaporan Barang Milik Negara</b>	<b>9,870,000</b>	<b>0</b>	<b>9,750,300</b>	<b>0</b>	<b>9,750,300</b>	<b>98.79 %</b>	<b>119,700</b>
111.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,870,000	0	9,750,300	0	9,750,300	98.79 %	119,700
521211 Belanja Bahan	1,620,000	0	1,580,300	0	1,580,300	97.55 %	39,700
000013. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	1,370,000	0	1,330,300	0	1,330,300	97.10 %	39,700
000014. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,990,000	0	7,910,000	0	7,910,000	99.00 %	80,000
000429. Uang harian	6,530,000	0	6,450,000	0	6,450,000	98.77 %	80,000
000430. Biaya transportasi	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 2 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260,000	0	260,000	100,00	0
000017. Uang harian Fullboard	260,000	0	260,000	100,00	0
<b>EBA.962 Layanan Umum</b>	<b>145,130,000</b>	<b>0</b>	<b>137,883,730</b>	<b>145,044,030 99.94 %</b>	<b>85,970</b>
112 Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan	145,130,000	0	137,883,730	145,044,030 99.94 %	85,970
112.0A TANPA SUB KOMPONEN	145,130,000	0	137,883,730	145,044,030 99.94 %	85,970
521211 Belanja Bahan	14,300,000	0	7,733,600	14,233,900 99.54 %	66,100
000002. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	12,025,000	0	5,459,000	11,959,300 99.45 %	65,700
000003. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,275,000	0	2,274,600	2,274,600 99.98 %	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	125,691,000	0	125,690,130	125,690,130 100,00	870
000005. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	54,645,000	0	54,644,837	54,644,837 100,00	163
000006. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	9,777,000	0	9,776,561	9,776,561 100,00	439
000397. Dalam rangka koordinasi (Pimpinan)	61,269,000	0	61,268,732	61,268,732 100,00	268
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,079,000	0	3,400,000	4,060,000 99.53 %	19,000
000007. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	4,079,000	0	3,400,000	4,060,000 99.53 %	19,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000 100,00	0
000009. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Peremuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0 0.00 %	0
000010. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000 100,00	0
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>340,000,000</b>	<b>0</b>	<b>325,422,052</b>	<b>339,747,431 99.93 %</b>	<b>252,569</b>
<b>EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>240,000,000</b>	<b>0</b>	<b>238,047,914</b>	<b>239,774,293 99.91 %</b>	<b>225,707</b>
111 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	240,000,000	0	238,047,914	239,774,293 99.91 %	225,707
111.0A TANPA SUB KOMPONEN	240,000,000	0	238,047,914	239,774,293 99.91 %	225,707
521211 Belanja Bahan	11,340,000	0	10,021,800	11,121,300 98.07 %	218,700
000042. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	8,306,000	0	6,988,500	8,088,000 97.38 %	218,000
000043. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	3,034,000	0	3,033,300	3,033,300 99.98 %	700
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228,660,000	0	228,026,114	228,652,993 100,00	7,007

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 3 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
000045. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	74,192,000	0	74,192,000	100.00	0
000046. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	13,198,000	0	13,197,625	100.00	375
000047. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	21,456,000	0	21,449,900	99.97 %	6,100
000398. Dalam rangka monev pelaksanaan kegiatan (PPK)	8,100,000	0	7,473,121	100.00	0
000399. Dalam rangka monev pelaksanaan kegiatan (Pimpinan)	111,714,000	0	111,713,468	100.00	532
<b>EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>87,374,138</b>	<b>99,973,138 99.97 %</b>	<b>26,862</b>
<b>112 Pelaksanaan Perbendaharaan Internal</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>87,374,138</b>	<b>99,973,138 99.97 %</b>	<b>26,862</b>
112.0A TANPA SUB KOMPONEN	100,000,000	0	87,374,138	99,973,138 99.97 %	26,862
521211 Belanja Bahan	26,200,000	0	14,286,300	26,185,300 99.94 %	14,700
000031. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	22,332,000	0	10,418,700	22,317,700 99.94 %	14,300
000032. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	3,868,000	0	3,867,600	3,867,600 99.99 %	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,800,000	0	73,087,838	73,787,838 99.98 %	12,162
000034. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	42,690,000	0	42,690,000	100.00	0
000035. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	9,627,000	0	9,626,238	9,626,238 99.99 %	762
000388. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	21,483,000	0	20,771,600	21,471,600 99.95 %	11,400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0 0.00 %	0
000038. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0 0.00 %	0
WA.4577 Pengelablaan Data, Informasi dan Kehumasan	55,399,956,000	0	28,283,018,227	13,515,134,680 41,798,152,907 75.45 %	13,601,803,093
<b>AEA Koordinasi</b>	<b>125,000,000</b>	<b>0</b>	<b>116,190,975</b>	<b>124,989,975 99.99 %</b>	<b>10,025</b>
<b>AEA.111 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan</b>	<b>125,000,000</b>	<b>0</b>	<b>116,190,975</b>	<b>124,989,975 99.99 %</b>	<b>10,025</b>
<b>111 Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan</b>	<b>125,000,000</b>	<b>0</b>	<b>116,190,975</b>	<b>124,989,975 99.99 %</b>	<b>10,025</b>
111.0A TANPA SUB KOMPONEN	125,000,000	0	116,190,975	124,989,975 99.99 %	10,025
521211 Belanja Bahan	9,720,000	0	1,173,000	9,712,000 99.92 %	8,000
000408. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	7,080,000	0	765,000	7,072,000 99.89 %	8,000
000409. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,640,000	0	408,000	2,640,000 100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

**Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

Hal 4 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,630,000	0	109,628,975	0	1,025
	000411. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	74,926,000	0	74,925,250	0	750
	000412. Satuan biaya transportasi Jakarta ke kota bogor	9,608,000	0	9,607,725	0	275
	000413. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	25,096,000	0	25,096,000	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,961,000	0	1,700,000	260,000	1,000
	000414. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,961,000	0	1,700,000	260,000	1,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,350,000	0	2,350,000	0	0
	000417. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	850,000	0	850,000	0	0
	000431. Uang Harian Fulliday	1,500,000	0	1,500,000	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,339,000	0	1,339,000	0	0
	000418. Uang harian Fullboard	1,040,000	0	1,040,000	0	0
	000419. Satuan biaya transportasi Jakarta ke kota bogor	299,000	0	299,000	0	0
	<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>25,547,065,000</b>	<b>0</b>	<b>21,506,865,252</b>	<b>3,902,421,829</b>	<b>137,777,919</b>
	<b>EBA.963 Layanan Data dan Informasi</b>	<b>4,627,371,000</b>	<b>0</b>	<b>3,777,401,349</b>	<b>807,091,427</b>	<b>42,878,224</b>
	<b>111 Perencanaan Data dan Sistem Informasi</b>	<b>169,444,000</b>	<b>0</b>	<b>169,442,590</b>	<b>0</b>	<b>1,410</b>
111.0A	Koordinasi awal kegiatan	169,444,000	0	169,442,590	0	1,410
521211	Belanja Bahan	2,800,000	0	2,800,000	0	0
	000140. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,800,000	0	2,800,000	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,800,000	0	3,800,000	0	0
	000142. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II)	3,800,000	0	3,800,000	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162,844,000	0	162,842,590	0	1,410
	000390. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	75,769,000	0	75,768,444	0	556
	000391. Uang penginapan perjalanan dinas dalam negeri	38,946,000	0	38,945,644	0	356
	000392. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	48,129,000	0	48,128,502	0	498
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 5 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode
	000145. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Peremuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0,00 %
112	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	3,467,034,000	0	2,863,111,066	561,168,597	3,424,279,663	98,77 %
112.0A	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	342,728,000	0	324,089,621	18,614,600	342,704,221	99,99 %
521211	Belanja Bahan	35,455,000	0	34,386,000	1,062,000	35,448,000	99,98 %
	000146. Mekan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	24,453,000	0	24,453,000	0	24,453,000	100,00 %
	000147. Shack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	10,296,000	0	9,933,000	360,000	10,293,000	99,97 %
	000148. Penggandaan Buku Laporan Akhir	706,000	0	0	702,000	702,000	99,43 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296,903,000	0	279,333,621	17,562,600	296,886,221	99,99 %
	000152. Uang Harian	121,825,000	0	121,825,000	0	121,825,000	100,00 %
	000153. penginapan	86,406,000	0	86,405,276	0	86,405,276	100,00 %
	000154. Biaya transport	0	0	0	0	0	0,00 %
	000372. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	88,672,000	0	71,103,345	17,562,600	88,655,945	99,98 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,370,000	0	10,370,000	0	10,370,000	100,00 %
	000155. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	10,370,000	0	10,370,000	0	10,370,000	100,00 %
112.0B	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Peternakan dan Perkebunan	342,855,000	0	316,599,053	25,816,100	342,415,153	99,87 %
521211	Belanja Bahan	34,851,000	0	34,510,000	240,000	34,750,000	99,71 %
	000160. Penggandaan Buletin Analisis Data Perkebunan dan Peternakan	4,988,000	0	4,974,000	0	4,974,000	99,72 %
	000161. Mekan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	21,717,000	0	21,691,000	0	21,691,000	99,88 %
	000162. Shack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	7,896,000	0	7,845,000	0	7,845,000	99,35 %
	000163. Penggandaan laporan akhir	250,000	0	0	240,000	240,000	96,00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	0	900,000	0	900,000	100,00 %
	000164. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	900,000	0	900,000	0	900,000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	286,699,000	0	261,024,053	25,576,100	286,600,153	99,97 %
	000166. Biaya transport	55,431,000	0	48,788,053	6,560,100	55,348,153	99,85 %
	000167. Biaya penginapan	68,298,000	0	61,496,000	6,788,000	68,284,000	99,98 %

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses ulsan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 6 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
	000168. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	162,970,000	0	150,740,000	12,228,000 100.00	2,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000 100.00	0
	000169. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000 100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,705,000	0	18,465,000	18,465,000 98.72 %	240,000
	000173. Uang Harian Fulliday	2,945,000	0	2,905,000	2,905,000 98.64 %	40,000
	000174. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	4,760,000	0	4,760,000	4,760,000 100.00	0
	000175. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0 0.00 %	0
	000373. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	11,000,000	0	10,800,000	10,800,000 98.18 %	200,000
112.0C	Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Sosial, Prasarana dan Sarana Pertanian	434,475,000	0	345,089,131	89,364,700 100.00	21,169
521211	Belanja Bahan	31,383,000	0	27,453,000	31,366,700 99.95 %	16,300
	000176. Penggantian Laporan Akhir	1,347,000	0	0	1,346,700 99.98 %	300
	000177. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	22,572,000	0	20,003,000	22,570,000 99.99 %	2,000
	000178. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	7,464,000	0	7,450,000	7,450,000 99.81 %	14,000
522151	Belanja Jasa Profesi	108,400,000	0	50,650,000	108,400,000 100.00	0
	000179. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	23,400,000	0	16,650,000	23,400,000 100.00	0
	000498. Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	85,000,000	0	34,000,000	85,000,000 100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	261,880,000	0	234,919,131	261,875,131 100.00	4,869
	000181. Uang Harian	201,134,000	0	174,177,611	201,133,611 100.00	389
	000182. Penginapan	0	0	0	0 0.00 %	0
	000183. Biaya transportasi	30,768,000	0	30,765,520	30,765,520 99.99 %	2,480
	000374. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	29,978,000	0	29,976,000	29,976,000 99.99 %	2,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000	0	9,520,000	10,200,000 100.00	0
	000184. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	10,200,000	0	9,520,000	10,200,000 100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,110,000	0	21,045,000	21,110,000 100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 7 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %		
000186. Uang Harian Fullday	8,360,000	0	8,295,000	65,000	8,360,000 100.00	0
000187. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000 100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,502,000	0	1,502,000	0	1,502,000 100.00	0
000194. Uang Harian Fullday	855,000	0	855,000	0	855,000 100.00	0
000196. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	647,000	0	647,000	0	647,000 100.00	0
112.0D Pelaksanaan Pengelolaan Statistik Data Ekonomi Pertanian	343,870,000	0	318,614,610	25,189,500	343,804,110 99.98 %	65,890
521211 Belanja Bahan	26,940,000	0	22,242,000	4,650,000	26,892,000 99.82 %	48,000
000197. Penggantian Laporan Akhir	1,254,000	0	0	1,250,000	1,250,000 99.68 %	4,000
000200. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	19,908,000	0	16,956,000	2,920,000	19,876,000 99.84 %	32,000
000201. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	5,778,000	0	5,286,000	480,000	5,766,000 99.79 %	12,000
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000 100.00	0
000203. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000 100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	286,510,000	0	268,812,610	17,679,500	286,492,110 99.99 %	17,890
000205. Uang Harian	152,748,000	0	152,745,000	0	152,745,000 100.00	3,000
000206. Penginapan	0	0	0	0	0 0.00 %	0
000207. Transport	84,160,000	0	66,480,010	17,679,500	84,159,510 100.00	490
000375. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	49,602,000	0	49,587,600	0	49,587,600 99.97 %	14,400
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000 100.00	0
000209. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000 100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,370,000	0	14,310,000	1,060,000	15,370,000 100.00	0
000215. Uang Harian Fullday	5,510,000	0	5,130,000	380,000	5,510,000 100.00	0
000217. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	9,860,000	0	9,180,000	680,000	9,860,000 100.00	0
112.0E Pelaksanaan Pelayanan dan Publikasi Data Pertanian	344,665,000	0	330,998,915	13,609,977	344,608,892 99.98 %	56,108
521211 Belanja Bahan	92,530,000	0	78,864,900	13,609,977	92,474,877 99.94 %	55,123
000223. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	27,888,000	0	24,733,900	3,129,600	27,863,500 99.91 %	24,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 8 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
				Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
	000224. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	63,952,000	0	54,131,000	9,796,377	63,927,377	99.96 %	24,623
	000225. Penggandaan Laporan	690,000	0	0	684,000	684,000	99.13 %	6,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000228. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	247,420,000	0	247,419,015	0	247,419,015	100.00	985
	000230. Uang Harian	124,000,000	0	123,999,790	0	123,999,790	100.00	210
	000231. Penginapan	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	100.00	0
	000232. Transport	39,940,000	0	39,939,225	0	39,939,225	100.00	775
	000233. Biaya tiket	30,980,000	0	30,980,000	0	30,980,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,915,000	0	2,915,000	0	2,915,000	100.00	0
	000237. Uang Harian Fullday	1,045,000	0	1,045,000	0	1,045,000	100.00	0
	000238. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000239. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	100.00	0
112.0F	Dukungan Data dan Dashboard AWR	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000244. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000245. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000246. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000247. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000248. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000249. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
112.0G	Pembinaan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000255. Uang harian perjalanan dinas	0	0	0	0	0	0.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 9 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	
				%	
000256. Uang penginapan	0	0	0	0	0.00 %
000257. Biaya transportasi	0	0	0	0	0.00 %
000258. Tiket PP	0	0	0	0	0.00 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0.00 %
000259. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0.00 %
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0	0.00 %
000260. Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	0	0	0	0	0.00 %
000261. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0.00 %
000262. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0.00 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0	0.00 %
000263. Uang harian Fullboard	0	0	0	0	0.00 %
000264. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat)	0	0	0	0	0.00 %
000265. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	0	0	0	0	0.00 %
112.0H Satu Data Pertanian dan EPSS	368,953,000	0	358,141,420	10,746,000	368,887,420 99.98 %
521211 Belanja Bahan	55,105,000	0	44,343,200	10,746,000	55,089,200 99.97 %
000267. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	14,520,000	0	14,510,200	0	14,510,200 99.93 %
000268. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	39,585,000	0	29,833,000	9,750,000	39,583,000 99.99 %
000269. Pengadaan	1,000,000	0	0	996,000	996,000 99.60 %
522151 Belanja Jasa Profesi	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000 100.00 %
000270. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000 100.00 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201,308,000	0	201,288,220	0	201,288,220 99.99 %
000272. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	26,010,000	0	26,001,966	0	26,001,966 99.97 %
000273. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	43,140,000	0	43,137,533	0	43,137,533 99.99 %
000274. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	37,620,000	0	37,620,000	0	37,620,000 100.00 %
000275. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Bismis JAKARTA - JOGJAKARTA	0	0	0	0	0 0.00 %

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

**Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

Hal 10 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
				Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
	000378. Biaya tiket	94,538,000	0	94,528,721	0	94,528,721	99.99 %	9,279
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,160,000	0	8,160,000	0	8,160,000	100.00	0
	000276. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	8,160,000	0	8,160,000	0	8,160,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	94,480,000	0	94,450,000	0	94,450,000	99.97 %	30,000
	000278. Uang Harian Fullday	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000279. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000280. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000379. Uang Harian Fullday	14,475,000	0	14,475,000	0	14,475,000	100.00	0
	000380. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	54,540,000	0	54,510,000	0	54,510,000	99.94 %	30,000
	000381. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	25,465,000	0	25,465,000	0	25,465,000	100.00	0
112.01	Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer	308,683,000	0	267,423,746	41,038,800	308,462,546	99.93 %	220,454
521211	Belanja Bahan	37,400,000	0	26,434,100	10,957,300	37,391,400	99.98 %	8,600
	000281. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	25,707,000	0	18,240,000	7,460,500	25,700,500	99.97 %	6,500
	000282. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	10,824,000	0	8,194,100	2,628,000	10,822,100	99.98 %	1,900
	000283. Pengandaan laporan akhir	869,000	0	0	868,800	868,800	99.98 %	200
522151	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	0	12,465,000	0	12,465,000	98.93 %	135,000
	000284. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	12,600,000	0	12,465,000	0	12,465,000	98.93 %	135,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	248,968,000	0	219,659,646	29,231,500	248,891,146	99.97 %	76,854
	000286. Uang harian perjalanan dinas	182,320,000	0	164,450,000	17,800,000	182,250,000	99.96 %	70,000
	000287. Uang penginapan	12,084,000	0	12,078,000	0	12,078,000	99.95 %	6,000
	000288. Biaya transportasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000382. Biaya transportasi	54,564,000	0	43,131,646	11,431,500	54,563,146	100.00	854
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,800,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	100.00	0
	000290. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	6,800,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,915,000	0	2,915,000	0	2,915,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 11 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %			
000292. Uang Harian Fullday	1,045,000	0	1,045,000	0	100.00	0	
000295. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,870,000	0	1,870,000	0	100.00	0	
112.0J Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi	512,367,000	0	329,687,807	141,541,200	471,229,007	91.97 %	41,137,993
521211 Belanja Bahan	35,525,000	0	24,795,700	10,679,700	35,475,400	99.86 %	49,600
000299. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	23,219,000	0	16,457,700	6,718,500	23,176,200	99.82 %	42,800
000300. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	11,218,000	0	8,338,000	2,880,000	11,218,000	100.00	0
000301. Penggandaan Laporan	1,088,000	0	0	1,081,200	1,081,200	99.38 %	6,800
522131 Belanja Jasa Konsultansi	271,650,000	0	146,000,000	85,000,000	231,000,000	85.04 %	40,650,000
000302. Fullstack - Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	175,650,000	0	100,000,000	39,000,000	139,000,000	79.13 %	36,650,000
000303. Pengembangan Aplikasi Simotandi	47,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000	97.87 %	1,000,000
000496. Pengembangan Aplikasi SI PDPS	49,000,000	0	0	46,000,000	46,000,000	93.88 %	3,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	14,400,000	0	8,600,000	5,400,000	14,000,000	97.22 %	400,000
000304. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	14,400,000	0	8,600,000	5,400,000	14,000,000	97.22 %	400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187,822,000	0	147,322,107	40,461,500	187,783,607	99.98 %	38,393
000306. Uang harian perjalanan dinas	139,320,000	0	105,710,000	33,572,500	139,282,500	99.97 %	37,500
000307. Biaya penginapan	4,857,000	0	4,857,000	0	4,857,000	100.00	0
000308. Biaya transportasi	43,645,000	0	36,755,107	6,889,000	43,644,107	100.00	893
000310. Uang harian perjalanan dinas	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000311. Biaya penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000312. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510,000	0	510,000	0	510,000	100.00	0
000313. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	510,000	0	510,000	0	510,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	100.00	0
000314. Uang Harian Fullday	855,000	0	855,000	0	855,000	100.00	0
000317. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 12 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
				Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
112.0K	Pengelolaan SPBE Kementan	200,608,000	0	147,475,283	52,990,500	200,465,783	99.93 %	142,217
521211	Belanja Bahan	81,008,000	0	43,018,000	37,925,500	80,943,500	99.92 %	64,500
	000321. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	55,534,000	0	28,247,000	27,244,500	55,491,500	99.92 %	42,500
	000322. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	24,288,000	0	14,771,000	9,499,000	24,270,000	99.93 %	18,000
	000323. Penggandaan dokumentasi kegiatan	1,186,000	0	0	1,182,000	1,182,000	99.66 %	4,000
522151	Belanja Jasa Profesi	19,600,000	0	6,300,000	13,300,000	19,600,000	100.00	0
	000326. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II)	9,000,000	0	6,300,000	2,700,000	9,000,000	100.00	0
	000327. Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	10,600,000	0	0	10,600,000	10,600,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,880,000	0	96,037,283	1,765,000	97,802,283	99.92 %	77,717
	000329. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000330. Uang penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000331. Biaya transportasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000383. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	71,780,000	0	70,280,000	1,460,000	71,740,000	99.94 %	40,000
	000385. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	26,100,000	0	25,757,283	305,000	26,062,283	99.86 %	37,717
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	100.00	0
	000332. Uang harian Fullboard	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000333. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000334. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000386. Uang harian	760,000	0	760,000	0	760,000	100.00	0
	000387. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
112.0L	Kebijakan Satu Peta Pertanian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000341. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000342. Penginapan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
	000343. Biaya transportasi	0	0	0	0	0	0.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 13 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 000344. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0 0.00 %	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 000346. Uang harian Fullboard 000347. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 000348. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 000350. Uang Harian Fullday 000351. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) 000352. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0 0.00 %	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 000354. Uang harian Fullboard 000355. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) 000356. Satuan biaya transportasi jakarta ke kota bogor	0	0	0	0 0.00 %	0
112.0N	Pengelolaan Keamanan Siber	79,750,000	0	59,991,476	79,518,376 99.71 %	231,624
521211	Belanja Bahan 000432. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 000433. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 000434. Penggandaan laporan akhir	12,900,000	0	8,194,000	12,872,000 99.78 %	28,000
522151	Belanja Jasa Profesi 000435. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	7,923,000	0	4,264,000	7,912,000 99.86 %	11,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000437. Uang harian perjalanan dinas 000438. Uang penginapan 000439. Biaya transportasi	3,936,000	0	3,930,000	3,930,000 99.85 %	6,000
		1,041,000	0	1,030,000	1,030,000 98.94 %	11,000
		9,000,000	0	4,400,000	8,900,000 98.89 %	100,000
		9,000,000	0	4,400,000	8,900,000 98.89 %	100,000
		57,850,000	0	47,397,476	57,746,376 99.82 %	103,624
		26,867,000	0	24,945,000	26,765,000 99.62 %	102,000
		8,950,000	0	8,263,126	8,949,126 99.99 %	874
112.00	Pengelolaan Pelindungan Data Pribadi	22,033,000	0	14,189,350	22,032,250 100.00	750
		188,080,000	0	122,730,320	187,730,324 99.81 %	349,676

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 14 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode
521211	Belanja Bahan	50,655,000	0	14,990,521	35,565,420	50,555,941 99.80 %	99,059
	000440. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	43,434,000	0	10,558,521	32,875,420	43,433,941 100.00	59
	000441. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	6,000,000	0	4,432,000	1,560,000	5,992,000 99.87 %	8,000
	000442. Pengandaan dokumentasi kegiatan	1,221,000	0	0	1,130,000	1,130,000 92.55 %	91,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000 100.00	0
	000443. Sertifikasi ISO 27001:2022	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000 100.00	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000 100.00	0
	000444. Konsultan individu ISO 27001:2022	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000 100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	13,500,000	0	2,700,000	10,700,000	13,400,000 99.26 %	100,000
	000445. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	13,500,000	0	2,700,000	10,700,000	13,400,000 99.26 %	100,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,925,000	0	47,309,483	25,464,900	72,774,383 99.79 %	150,617
	000451. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	54,295,000	0	29,620,000	24,525,400	54,145,400 99.72 %	149,600
	000452. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri	2,024,000	0	2,023,500	0	2,023,500 99.98 %	500
	000453. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	16,606,000	0	15,665,983	939,500	16,605,483 100.00	517
113	Evaluasi dan Pelaporan Data dan Sistem Informasi	990,893,000	0	744,847,693	245,922,830	990,770,523 99.99 %	122,477
113.0A	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	990,893,000	0	744,847,693	245,922,830	990,770,523 99.99 %	122,477
521211	Belanja Bahan	205,713,000	0	67,247,600	138,462,830	205,710,430 100.00	2,570
	000361. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	186,528,000	0	48,065,000	138,462,830	186,527,830 100.00	170
	000362. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	19,185,000	0	19,182,600	0	19,182,600 99.99 %	2,400
522151	Belanja Jasa Profesi	170,600,000	0	136,200,000	34,300,000	170,500,000 99.94 %	100,000
	000364. Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II)	30,000,000	0	28,500,000	1,400,000	29,900,000 99.67 %	100,000
	000454. Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Professional Kegiatan di Dalam Negeri	140,600,000	0	107,700,000	32,900,000	140,600,000 100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	489,255,000	0	427,891,870	61,350,000	489,241,870 100.00	13,130
	000394. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri	148,305,000	0	148,304,518	0	148,304,518 100.00	482
	000395. Uang penginapan perjalanan dinas dalam negeri	159,464,000	0	159,463,080	0	159,463,080 100.00	920
	000396. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri	181,486,000	0	120,124,272	61,350,000	181,474,272 99.99 %	11,728

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 15 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu		Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Ini	s.d. Periode	Periode Ini	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33,885,000	0	22,070,000	11,810,000	33,880,000	99.99 %	5,000
000365. Uang harian Fullboard	20,745,000	0	20,745,000	0	20,745,000	100.00	0
000366. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	13,140,000	0	1,325,000	11,810,000	13,135,000	99.96 %	5,000
000367. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	91,440,000	0	91,438,223	0	91,438,223	100.00	1,777
000505. Uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar negeri	34,389,000	0	34,388,165	0	34,388,165	100.00	835
000508. Biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri	57,051,000	0	57,050,058	0	57,050,058	100.00	942
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>20,919,694,000</b>	<b>0</b>	<b>17,729,463,903</b>	<b>3,095,330,402</b>	<b>20,824,794,305</b>	<b>99.55 %</b>	<b>94,899,695</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>8,463,044,000</b>	<b>0</b>	<b>7,605,728,837</b>	<b>786,445,846</b>	<b>8,392,174,683</b>	<b>99.16 %</b>	<b>70,869,317</b>
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8,463,044,000	0	7,605,728,837	786,445,846	8,392,174,683	99.16 %	70,869,317
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	5,569,504,000	0	5,158,819,200	410,683,480	5,569,502,680	100.00	1,320
000054. Belanja Gaji Pokok PNS	4,779,465,000	0	4,368,781,000	410,683,480	4,779,464,480	100.00	520
000055. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	396,292,000	0	396,291,900	0	396,291,900	100.00	100
000056. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	393,747,000	0	393,746,300	0	393,746,300	100.00	700
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,000	0	69,764	4,871	74,635	93.29 %	5,365
000057. Belanja Pembulatan Gaji PNS	68,000	0	59,306	4,871	64,177	94.38 %	3,823
000058. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	6,000	0	5,320	0	5,320	88.67 %	680
000059. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	6,000	0	5,138	0	5,138	85.63 %	862
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	392,862,000	0	365,051,988	27,809,032	392,861,020	100.00	980
000060. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	337,077,000	0	309,267,508	27,809,032	337,076,540	100.00	460
000061. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	28,218,000	0	28,217,480	0	28,217,480	100.00	520
000062. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	27,567,000	0	27,567,000	0	27,567,000	100.00	0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	91,683,000	0	85,218,670	6,463,018	91,681,688	100.00	1,312
000063. Belanja Tunj. Anak PNS	78,481,000	0	72,017,248	6,463,018	78,480,266	100.00	734
000064. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	6,631,000	0	6,630,820	0	6,630,820	100.00	180

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

**Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL**  
**Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

Hal 16 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	
511123	000065. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	6.571,000	0	6.570,602	0	398
	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0	58,630,000	4.510,000	0
	000066. Belanja Tunj. Struktural PNS	54,120,000	0	49,610,000	4.510,000	0
	000067. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	4,510,000	0	4,510,000	0	0
	000068. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	4,510,000	0	4,510,000	0	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	896,494,000	0	820,568,000	65,926,000	10,000,000
	000069. Belanja Tunj. Fungsional PNS	771,722,000	0	695,796,000	65,926,000	10,000,000
	000070. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	62,386,000	0	62,386,000	0	0
	000071. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	62,386,000	0	62,386,000	0	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	86,280,000	0	84,563,162	1,715,838	1,000
	000072. Belanja Tunj. PPh PNS	23,165,000	0	21,448,845	1,715,838	317
	000073. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	31,923,000	0	31,922,366	0	634
	000074. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	31,192,000	0	31,191,951	0	49
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	248,852,000	0	230,730,120	18,121,100	780
	000075. Belanja Tunj. Beras PNS	248,852,000	0	230,730,120	18,121,100	780
511129	Belanja Uang Makan PNS	686,959,000	0	517,808,000	110,144,000	59,007,000
	000076. Belanja Uang Makan PNS	686,959,000	0	517,808,000	110,144,000	59,007,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	62,740,000	0	58,130,000	4,610,000	0
	000077. Belanja Tunjangan Umum PNS	53,880,000	0	49,270,000	4,610,000	0
	000078. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,430,000	0	4,430,000	0	0
	000079. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,430,000	0	4,430,000	0	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	154,384,000	0	109,124,000	45,232,800	27,200
	000080. Belanja Gaji Pokok PPPK	135,162,000	0	89,902,400	45,232,800	26,800
	000081. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	9,611,000	0	9,610,800	0	200
	000082. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	9,611,000	0	9,610,800	0	200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	1,977	667	4,356

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 17 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
	000083. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	1,769	667	2,436 48.72 %
	000084. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	104	0	104 10.40 %
	000085. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	104	0	104 10.40 %
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,726,000	0	8,349,520	2,375,660	10,725,180 99.99 %
	000086. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	9,444,000	0	7,068,080	2,375,660	9,443,740 100.00
	000087. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	641,000	0	640,720	0	640,720 99.96 %
	000088. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	641,000	0	640,720	0	640,720 99.96 %
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,149,000	0	2,504,856	641,680	3,146,536 99.92 %
	000089. Belanja Tunj. Anak PPPK	2,763,000	0	2,120,424	641,680	2,762,104 99.97 %
	000090. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	193,000	0	192,216	0	192,216 99.59 %
	000091. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	193,000	0	192,216	0	192,216 99.59 %
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	22,160,000	0	18,360,000	3,800,000	22,160,000 100.00
	000092. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	18,920,000	0	15,120,000	3,800,000	18,920,000 100.00
	000093. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000 100.00
	000094. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000 100.00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,705,000	0	7,169,580	2,534,700	9,704,280 99.99 %
	000095. Belanja Tunj. Beras PPPK	9,705,000	0	7,169,580	2,534,700	9,704,280 99.99 %
511628	Belanja Uang Makan PPPK	27,503,000	0	14,985,000	11,256,000	26,241,000 95.41 %
	000096. Belanja Uang Makan PPPK	27,503,000	0	14,985,000	11,256,000	26,241,000 95.41 %
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000 100.00
	000511. Tunjangan Umum PPPK	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000 100.00
512211	Belanja Uang Lembur	122,976,000	0	62,026,000	60,430,000	122,456,000 99.58 %
	000455. Uang Lembur Golongan II	6,528,000	0	3,840,000	2,684,000	6,524,000 99.94 %
	000456. Uang Lembur Golongan III	77,760,000	0	37,920,000	39,768,000	77,688,000 99.91 %
	000457. Uang Lembur Golongan IV	29,484,000	0	15,660,000	13,752,000	29,412,000 99.76 %
	000458. Uang Makan PNS Golongan I dan II	595,000	0	350,000	175,000	525,000 88.24 %

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 18 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %		
000459. Uang Makan PNS Golongan III	6,477,000	0	3,108,000	3,067,000	6,175,000 95.34 %	302,000
000460. Uang Makan PNS Golongan IV	2,132,000	0	1,148,000	984,000	2,132,000 100.00	0
512212 Belanja Uang Lembur PPPK	12,400,000	0	3,619,000	8,747,000	12,366,000 99.73 %	34,000
000461. Uang Lembur Golongan III	7,982,000	0	3,360,000	4,608,000	7,968,000 99.82 %	14,000
000462. Uang Makan ASN Golongan II	962,000	0	259,000	683,000	942,000 97.92 %	20,000
000510. Uang Lembur Golongan II	3,456,000	0	0	3,456,000	3,456,000 100.00	0
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>12,456,650,000</b>	<b>0</b>	<b>10,123,735,066</b>	<b>2,308,884,556</b>	<b>12,432,619,622 99.81 %</b>	<b>24,030,378</b>
002.0A Operasional Perkantoran	10,444,535,000	0	9,104,933,052	1,336,850,480	10,441,783,532 99.97 %	2,751,468
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	9,982,035,000	0	8,682,294,477	1,297,410,480	9,979,704,957 99.98 %	2,330,043
000097. keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DKI Jakarta)	168,720,000	0	149,257,481	19,313,200	168,570,681 99.91 %	149,319
000100. Layanan dukungan Operasional Fasilitas Kelistrikan Pusat Komputasi Kementerian	196,000,000	0	147,000,000	49,000,000	196,000,000 100.00	0
000101. Layanan dukungan Operasional Fasilitas Pemadam Kebakaran dan Fasilitas Pendukung Lainnya Pusat Komputasi Kementerian	93,500,000	0	70,125,000	23,375,000	93,500,000 100.00	0
000102. Layanan dukungan Operasional Fasilitas Sistem Pendingin Pusat Komputasi Kementerian	183,500,000	0	137,625,000	45,875,000	183,500,000 100.00	0
000103. Layanan Petugas Operasional Pusat Komputasi Kementerian	379,200,000	0	316,000,000	63,200,000	379,200,000 100.00	0
000105. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta)	169,630,000	0	169,630,000	0	169,630,000 100.00	0
000106. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (D.K.I. Jakarta)	10,332,000	0	10,220,000	0	10,220,000 98.92 %	112,000
000107. Pakaian Kerja Satpam (D.K.I. Jakarta)	6,340,000	0	6,000,000	0	6,000,000 94.64 %	340,000
000108. Honorarium Satpam dan Pengemudi D.K.I. Jakarta	192,000,000	0	182,000,000	10,000,000	192,000,000 100.00	0
000109. Bahan Cetakan	142,673,000	0	16,930,000	125,440,000	142,370,000 99.79 %	303,000
000110. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.K.I. Jakarta	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000 100.00	0
000111. Layanan koneksi internet (ISP-1)	1,950,000,000	0	1,625,000,000	325,000,000	1,950,000,000 100.00	0
000112. Layanan koneksi internet (ISP-2)	1,942,200,000	0	1,618,500,000	323,700,000	1,942,200,000 100.00	0
000113. Layanan koneksi cloud service	1,485,000,000	0	1,237,500,000	247,500,000	1,485,000,000 100.00	0
000114. Layanan koneksi Jaringan Intra Pemerintah	46,010,000	0	0	46,007,280	46,007,280 99.99 %	2,720

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 19 dari 22

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
				Periode Laju	Periode Ini		s.d. Periode	%
521115	000115. Pengadaan Lisensi Infrastruktur TIK Layanan Publik dan Prioritas Kementan	2,581,100,000	0	2,580,999,996	0	2,580,999,996	100.00	100,004
	000428. Lisensi Tableau	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000	100.00	0
	000463. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	8,450,000	0	7,397,000	0	7,397,000	87.54 %	1,053,000
	000464. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	1,380,000	0	1,110,000	0	1,110,000	80.43 %	270,000
	000513. Lisensi Canva	19,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	100.00	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	107,400,000	0	88,060,000	19,340,000	107,400,000	100.00	0
	000117. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	25,600,000	0	21,000,000	4,600,000	25,600,000	100.00	0
	000118. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	24,880,000	0	20,400,000	4,480,000	24,880,000	100.00	0
	000119. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	11,640,000	0	9,500,000	2,140,000	11,640,000	100.00	0
	000120. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	10,120,000	0	8,260,000	1,860,000	10,120,000	100.00	0
	000121. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	22,440,000	0	18,300,000	4,140,000	22,440,000	100.00	0
	000122. Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	2,400,000	0	2,000,000	400,000	2,400,000	100.00	0
	000123. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
	000124. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	2,160,000	0	1,800,000	360,000	2,160,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	264,000,000	0	263,578,575	0	263,578,575	99.84 %	421,425
	000125. ATK dan BOK PUSDATIN	264,000,000	0	263,578,575	0	263,578,575	99.84 %	421,425
522141	Belanja Sewa	91,100,000	0	71,000,000	20,100,000	91,100,000	100.00	0
	000126. Sewa mesin fotocopi (2 unit)	91,100,000	0	71,000,000	20,100,000	91,100,000	100.00	0
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	9,200,000	0	8,090,594	917,332	9,007,926	97.91 %	192,074
522112	Belanja Langganan Telepon	9,200,000	0	8,090,594	917,332	9,007,926	97.91 %	192,074
	000127. Pembayaran telpon	9,200,000	0	8,090,594	917,332	9,007,926	97.91 %	192,074
002.0C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,380,225,000	0	498,185,474	870,889,880	1,369,075,354	99.19 %	11,149,646
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,380,225,000	0	498,185,474	870,889,880	1,369,075,354	99.19 %	11,149,646

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 20 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %		
000128. Pemeliharaan Inventaris Kantor	8,880,000	0	5,318,264	3,400,000	8,718,264 98.18 %	161,736
000129. Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	49,640,000	0	23,195,200	18,459,000	41,654,200 83.91 %	7,985,800
000130. Pemeliharaan Printer	10,350,000	0	4,710,000	2,820,000	7,530,000 72.75 %	2,820,000
000131. Pemeliharaan AC Split	6,710,000	0	3,550,000	2,980,000	6,530,000 97.32 %	180,000
000132. Pemeliharaan sarana perkantoran	632,418,000	0	217,704,300	414,713,160	632,417,460 100.00	540
000133. Biaya pemeliharaan jaringan komunikasi data	340,625,000	0	143,652,310	196,971,720	340,624,030 100.00	970
000134. Pemeliharaan perangkat data center	331,602,000	0	100,055,400	231,546,000	331,601,400 100.00	600
002.0D Perawatan Kendaraan Bermotor	622,690,000	0	512,525,946	100,226,864	612,752,810 98.40 %	9,937,190
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	622,690,000	0	512,525,946	100,226,864	612,752,810 98.40 %	9,937,190
000135. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (D.K.I. Jakarta)	42,490,000	0	41,045,969	1,411,235	42,457,204 99.92 %	32,796
000136. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta)	481,000,000	0	402,703,611	78,015,899	480,719,510 99.94 %	280,490
000137. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta)	99,200,000	0	68,776,366	20,799,730	89,576,096 90.30 %	9,623,904
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1,771,255,000</b>	<b>0</b>	<b>132,152,000</b>	<b>1,412,158,850</b>	<b>1,544,310,850 87.19 %</b>	<b>226,944,150</b>
<b>EBB.951 Layanan Sarana Internal</b>	<b>1,671,255,000</b>	<b>0</b>	<b>132,152,000</b>	<b>1,315,572,000</b>	<b>1,447,724,000 86.62 %</b>	<b>223,531,000</b>
112 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,671,255,000	0	132,152,000	1,315,572,000	1,447,724,000 86.62 %	223,531,000
112.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,671,255,000	0	132,152,000	1,315,572,000	1,447,724,000 86.62 %	223,531,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,671,255,000	0	132,152,000	1,315,572,000	1,447,724,000 86.62 %	223,531,000
000369. Laptop	31,320,000	0	31,320,000	0	31,320,000 100.00	0
000426. Video Mixer Switcher	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000 100.00	0
000427. Laptop	418,135,000	0	0	413,808,000	413,808,000 98.97 %	4,327,000
000499. PC Unit	320,000,000	0	0	309,024,000	309,024,000 96.57 %	10,976,000
000500. LCD TV Monitor	680,000,000	0	0	592,740,000	592,740,000 87.17 %	87,260,000
000501. Video Processor	200,000,000	0	79,032,000	0	79,032,000 39.52 %	120,968,000
<b>EBB.971 Layanan Prasarana Internal</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,586,850</b>	<b>96,586,850 96.59 %</b>	<b>3,413,150</b>
111 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	0	96,586,850	96,586,850 96.59 %	3,413,150

\*Lock Pagu adalah Jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 21 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %		
111.0A TANPA SUB KOMPONEN	100,000,000	0	0	96,586,850	96.59 %	3,413,150
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	0	96,586,850	96.59 %	3,413,150
000512. Renovasi ruangan untuk coworker space	100,000,000	0	0	96,586,850	96.59 %	3,413,150
<b>FAB Sistem Informasi Pemerintahan</b>	<b>27,956,636,000</b>	<b>0</b>	<b>6,527,810,000</b>	<b>8,191,755,001</b>	<b>52.65 %</b>	<b>13,237,070,999</b>
<b>FAB.001 Sistem Informasi Pertanian</b>	<b>27,956,636,000</b>	<b>0</b>	<b>6,527,810,000</b>	<b>8,191,755,001</b>	<b>52.65 %</b>	<b>13,237,070,999</b>
111 Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	734,220,000	0	0	701,049,500	95.48 %	33,170,500
111.0A TANPA SUB KOMPONEN	734,220,000	0	0	701,049,500	95.48 %	33,170,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	150,000,000	0	0	147,574,500	98.38 %	2,425,500
000400. Pengembangan Aplikasi SIPOR PHLN	150,000,000	0	0	147,574,500	98.38 %	2,425,500
536111 Belanja Modal Lainnya	584,220,000	0	0	553,475,000	94.74 %	30,745,000
000401. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kehadiran Pegawai ASN Kementan	186,000,000	0	0	174,270,000	93.69 %	11,730,000
000402. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Pegawai ASN Kementan	0	0	0	0	0.00 %	0
000403. Pengembangan Aplikasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian	100,000,000	0	0	88,800,000	88.80 %	11,200,000
000404. Pengembangan Fitur Aplikasi BASTBANPEM	0	0	0	0	0.00 %	0
000470. Pengembangan Aplikasi JDJH	98,720,000	0	0	94,350,000	95.57 %	4,370,000
000471. Pengembangan Aplikasi Si-BIMA	199,500,000	0	0	196,055,000	98.27 %	3,445,000
112 Pemeliharaan Sistem Informasi Pertanian	149,210,000	0	66,500,000	81,140,000	98.95 %	1,570,000
112.0A TANPA SUB KOMPONEN	149,210,000	0	66,500,000	81,140,000	98.95 %	1,570,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	149,210,000	0	66,500,000	81,140,000	98.95 %	1,570,000
000405. Pemeliharaan Aplikasi Banpem Web	50,000,000	0	0	48,840,000	97.68 %	1,160,000
000406. Pemeliharaan Aplikasi E-Klinik	19,210,000	0	0	19,000,000	98.91 %	210,000
000407. Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Publik Berbasis Elektronik/Web	80,000,000	0	66,500,000	13,300,000	99.75 %	200,000
114 Peralatan Elektronik dan Komunikasi	27,073,206,000	0	6,461,310,000	7,409,565,501	51.23 %	13,202,330,499
114.0A TANPA SUB KOMPONEN	22,068,015,000	0	6,028,410,000	4,851,293,001	49.30 %	11,188,311,999
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,068,015,000	0	6,028,410,000	4,851,293,001	49.30 %	11,188,311,999

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 411925 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Hal 22 dari 22

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %		
000370. Perangkat Manajemen dan Keamanan Jaringan Internet	4,757,460,000	0	4,757,460,000	0	4,757,460,000 100.00	0
000371. Infrastruktur Jaringan Intra Kementan	1,270,950,000	0	1,270,950,000	0	1,270,950,000 100.00	0
000469. Perangkat Next Generation Firewall dan DNS Proxy	16,039,605,000	0	0	4,851,293,001	4,851,293,001 30.25 %	11,188,311,999
114.0B Keamanan Siber Kementan	5,005,191,000	0	432,900,000	2,558,272,500	2,991,172,500 59.76 %	2,014,018,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,005,191,000	0	432,900,000	2,558,272,500	2,991,172,500 59.76 %	2,014,018,500
000423. Layanan Keamanan Anti Malware dan Anti DDOS	1,179,749,000	0	0	1,004,272,500	1,004,272,500 85.13 %	175,476,500
000424. Layanan Security Operation Center (SOC)	2,985,133,000	0	432,900,000	865,800,000	1,298,700,000 43.51 %	1,686,433,000
000425. Sistem Pra Production Sistem Elektronik Kementan	840,309,000	0	0	688,200,000	688,200,000 81.90 %	152,109,000


\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir


**LAMPIRAN 5**  
**Survei Kepuasan Pengguna Layanan**  
**Pusdatin Tahun 2025**




# LAPORAN

## KEGIATAN SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUSDATIN TAHUN 2025

 Jl, Harsono RM No.3 Gedung D Lantai 4  
Jakarta Selatan 12550

 [pusdatin.setjen.pertanian.go.id](http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id)

 (021) 7822638, 7822803

## KATA PENGANTAR

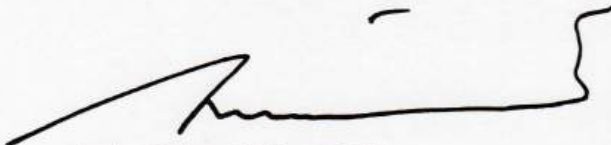
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, penyusunan laporan Tahun 2025 kegiatan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin ini dapat diselesaikan. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan survei dan hasil analisis survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan tahun 2025 ini masih belum sempurna, baik dari segi materi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu dalam rangka penyempurnaan laporan di masa depan, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang berperan serta memberikan bantuan dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga laporan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Pertanian.

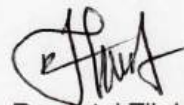
Jakarta, Desember 2025

Mengetahui  
Kepala Bagian Umum



Andry Polos, S.Kom, M.Si  
NIP. 19811106 200910 1 004

Yang Melaporkan  
Ketua Tim Kerja Pelayanan  
dan Publikasi Data



Roydatul Zikria, S.Si, M.S.E  
NIP. 19870227 200912 2 006

Menyetujui,  
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian,



Intan Rahayu, S. Si, MT  
NIP. 19711021 199110 2 001

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **A. Latar belakang**

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan metodologi yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur, Lembaga atau institusi pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Jika tidak ditangani dengan benar, keluhan tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

### **B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin adalah :**

- 1) Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin;
- 2) Mengetahui unsur-unsur pelayanan Pusdatin yang perlu ditingkatkan;
- 3) Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin terhadap publik; dan
- 4) Merumuskan upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan Pusdatin secara berkelanjutan.

### C. Metodologi

**Metode kuantitatif** melalui pengukuran dengan menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pengguna layanan pusdatin terhadap jenis layanan Pusdatin dengan mempertimbangkan:

- Karakteristik populasi;
- Keterwakilan anggota sampel;
- Jumlah responden;
- Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan; dan
- Jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.

### D. Hasil Survei

**Hasil Survei Kepuasan Pengguna** dilakukan dengan analisis statistika deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Statistika Deskriptif Survei Kepuasan Masyarakat

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Responden	368	464
Nilai Indeks	3,52	3,60
Nilai IKM	87,98	90,00
<b>Kinerja Pusdatin</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>

Nilai IKM tahun 2024 adalah 87,98. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Pusdatin **Baik**. Nilai ini meningkat dengan nilai IKM tahun 2025 sebesar 90,00 nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Pusdatin **Sangat Baik**.

Tabel 2. Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025

No.	Unsur	Tahun 2025		
		Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur	Nilai Indeks
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	1.560	3,36	0,37
2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	1.611	3,47	0,39
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1.611	3,47	0,39
4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	1.856	4,00	0,44
5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	1.562	3,37	0,37
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	1.856	4,00	0,44
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	1.576	3,40	0,38
8	Penanganan Pengaduan	1.761	3,80	0,42
9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	1.640	3,53	0,39
<b>Nilai Indeks</b>				<b>3,60</b>
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				<b>90,00</b>
<b>Kinerja Pusdatin</b>				<b>(A) Sangat Baik</b>

### E. Kesimpulan

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator kinerja organisasi pemerintahan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Walidata sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian, dan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022, yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan bertanggung jawab memberikan pelayanan serta

publikasi data dan informasi pertanian pada Kementerian Pertanian melalui situs Kementerian Pertanian, media cetak, media elektronik, dan media publikasi resmi lainnya.

Hasil survei memberikan manfaat yang signifikan bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Pusdatin. Temuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan perlu atau tidaknya kebijakan dari pimpinan Pusdatin untuk menindaklanjuti umpan balik yang diterima, sekaligus mengidentifikasi skala prioritas serta kebutuhan alokasi anggaran. Selanjutnya, hasil survei juga digunakan untuk merencanakan langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran. Selain itu, survei berperan dalam mendukung evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator kinerja organisasi. Pusdatin juga dapat melakukan *monitoring* dan pengendalian atas sistem dan prosedur pelayanan yang berjalan, serta melaksanakan kaji ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, baik terkait produk maupun kecepatan layanan yang diberikan.

#### **F. Rekomendasi Tindaklanjut**

Hasil survei sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Pusdatin termasuk kebijakan dari pimpinan Pusdatin dalam menindaklanjuti umpan balik, dan mengidentifikasi skala prioritas, kemudian dengan rencana tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengulas standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan data pertanian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan data;
- 2) Mengevaluasi secara berkala alur proses pelayanan data dan informasi dan mengkomunikasikannya kepada pengguna melalui media komunikasi yang tersedia baik daring maupun luring;
- 3) Meninjau semua SOP terkait pelayanan data dan informasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- 4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam pelayanan pengguna, sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- 5) Memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan akses layanan dan kenyamanan pengguna, termasuk pengembangan aplikasi Simpeldatin yang mudah dan nyaman diakses untuk mengajukan permohonan data dan sistem informasi;
- 6) Melakukan *monitoring* dan pengendalian pada sistem dan prosedur pelayanan Pusdatin serta melakukan kaji ulang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna baik untuk produk maupun kecepatan layanan; dan

- 7) Melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna yang terkait dengan kebijakan yang sifatnya strategis.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
EKSEKUTIF SUMMARY.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	1
1.3 Sasaran .....	2
1.4 Acuan dan Normatif Standar.....	2
1.5 Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan .....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI .....	9
2.1 Pertimbangan Isu, Risiko, dan Peluang.....	9
2.2 Langkah-Langkah Survei .....	10
2.3 Pengumpulan Hasil Survei.....	11
2.4 Pengolahan Data Hasil Survei .....	11
2.5 Analisis Data Hasil Survei .....	12
BAB III HASIL SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUSDATIN TAHUN 2025.....	13
3.1 Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	13
3.2 Responden Survei Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025 .....	14
3.3 Perbandingan Jumlah Responden, Nilai Indeks dan IKM Semester I & II Tahun 2025 ..	18
BAB IV REKOMENDASI TINDAK LANJUT.....	19
4.1 Rangkuman dan Evaluasi .....	19
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	20
4.3 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan .....	20
4.4 Publikasi Hasil Survei.....	22
4.5 Pemantauan dan Evaluasi .....	22
4.6 Penutup .....	22
LAMPIRAN .....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur atau lembaga/institusi pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

### 1.2 Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan berdasarkan persepsi dari pengguna;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok dan bagian secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan Pusdatin yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing kelompok dan bagian yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan;
4. Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pusdatin dan Sekretariat Jenderal;
5. Peningkatan kualitas pelayanan Pusdatin secara berkelanjutan.

Sedangkan bagi pengguna layanan Pusdatin dapat diketahui gambaran tentang kinerja Pusdatin dan melalui kegiatan survei kepuasan pengguna dapat memberikan masukan untuk tujuan peningkatan layanan sesuai harapan pengguna pada umumnya.

### 1.3 Sasaran

1. Mendorong partisipasi pengguna layanan Pusdatin dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pusdatin;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan di Pusdatin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan di Pusdatin menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan pengguna layanan Pusdatin terhadap pelayanan publik.

### 1.4 Acuan dan Normatif Standar

- 1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian;
- 6) Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8) Permentan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

### 1.5 Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan

1. **Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan** secara swakelola dengan membentuk Tim Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin melalui SK Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Nomor 446 Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Jabatan pada Tim	Nama	Tim Kerja/Bagian
1.	Pengarah	Intan Rahayu, S.SI, M.T	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
2.	Penanggung Jawab	Andry Polos, S.Kom, M.Si	Kepala Bagian Umum
3.	Ketua	Roydatul Zikria, S.Si, M.S.E	Ketua Tim Kerja PPD
4.	Wakil Ketua	Iswadi	Tim Kerja PPD
5.	Sekretaris	Dhanang Susatyo, S.E.	Tim Kerja PPD
6.	Anggota	Ketua Tim Kerja Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tim Kerja Data Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.	Anggota	Ketua Tim Kerja Data Perkebunan dan Peternakan	Tim Kerja Data Perkebunan dan Peternakan
8.	Anggota	Ketua Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian	Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian
9.	Anggota	Ketua Tim Kerja Data Sosial, Sarana dan Prasarana Pertanian	Tim Kerja Data Sosial, Sarana dan Prasarana Pertanian
10.	Anggota	Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi	Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi
11.	Anggota	Ketua Tim Kerja Jaringan Komputer	Tim Kerja Jaringan Komputer
12.	Anggota	Ketua Tim Kerja Keamanan Siber	Tim Kerja Keamanan Siber
13.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi	Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi
14.	Anggota	Apriadi Setiawan, S.Kom, M.M.	Tim Kerja PPD
15.	Anggota	Didik Pratama, S.Kom.	Tim Kerja PPD
16.	Anggota	Rahma Andany, S.Kom	Tim Kerja PPD
17.	Anggota	M. Eko Darwanto, S.Kom	Tim Kerja PPD

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin, dilakukan dengan memperhatikan:

a. Prinsip Transparan

Hasil survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

b. Prinsip Partisipatif

Dalam melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin harus melibatkan peran serta pengguna dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang akurat dan obyektif.

c. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

d. Berkesinambungan

Survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

e. Keadilan

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin harus menjangkau semua pengguna layanan Pusdatin tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

f. Netralitas

Dalam melakukan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin, pihak surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

**2. Penetapan Metode Kualitatif** melalui pengukuran dengan menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pengguna layanan pusdatin terhadap jenis layanan Pusdatin dengan mempertimbangkan:

- a. Karakteristik populasi;
- b. Keterwakilan anggota sampel;
- c. Jumlah responden;
- d. Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan; dan
- e. Jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.

**3. Penetapan Teknik Survei** melalui pengisian sendiri yang dikirimkan melalui *email* pribadi atau kantor dan WhatsApp, dengan pilihan disesuaikan terhadap target responden.

Untuk pengguna umum atau masyarakat umum dan lingkup kementerian pertanian yang terdata sebagai pengguna layanan data dan sistem informasi pertanian, pengisian kuesioner melalui:

- a. *E-form* kuesioner survei kepuasan pengguna layanan data dan sistem informasi pertanian secara manual atau;
- b. Pengisian langsung pada layanan data melalui tautan <http://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id> atau survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin melalui <https://bit.ly/surveipusdatin>.

**4. Penyiapan Bahan Survei** dilakukan mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung kegiatan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin selain anggaran dan SDM atau tim survei yang telah ditunjuk oleh Kapusdatin sebagai pelaksana kegiatan.

a. Dalam mendistribusikan *e-form* survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin kepada pengguna dibutuhkan media komunikasi yang efektif yaitu melalui aplikasi WhatsApp, dan *email* mengingat lokasi responden yang banyak tersebar di luar kota Jakarta, ketersediaan waktu responden, dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

Sarana yang dibutuhkan adalah

- Komputer dengan akses internet yang cepat untuk mengakomodasi *email* dengan alamat [survei.pusdatin@gmail.com](mailto:survei.pusdatin@gmail.com) untuk mendistribusikan kuesioner kepada pengguna dan menyimpan, mentabulasi, dan mengolah data kuesioner atau hasil survei.
  - Ponsel dengan nomor penyedia jasa telekomunikasi selular GSM yang dilengkapi paket data yang cepat dan memadai untuk mendistribusikan dan menerima kuesioner atau hasil survei.
- b. Penyusunan kuesioner-kuesioner yang disesuaikan dengan jenis layanan yang akan disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis layanan dan unit layanan di bawah ini dengan format yang telah ditetapkan oleh Permentan Nomor 19 Tahun 2018 yang mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik melalui penilaian 9 (sembilan) unsur yang akan dikaji dan relevan dengan kualitas pelayanan, yaitu:
- Unsur ke-1 adalah persyaratan administratif dan teknis;
  - Unsur ke-2 adalah sistem, mekanisme, dan prosedur berupa tata cara yang dibakukan oleh masing-masing kelompok dan penggunanya;
  - Unsur ke-3 adalah waktu penyelesaian, berupa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan di masing-masing Kelompok;
  - Unsur ke-4 adalah biaya atau tarif layanan yang tidak dikenakan oleh Pusdatin kepada pengguna untuk mendapatkan layanan data dan informasi, dan sistem informasi yang dibutuhkannya;
  - Unsur ke-5 adalah produk spesifikasi jenis pelayanan berupa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
  - Unsur ke-6 adalah kompetensi pelaksana berupa kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman;
  - Unsur ke-7 adalah perilaku pelaksana berupa sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

- Unsur ke-8 adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan berupa tata cara atau prosedur pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- Unsur ke-9 adalah sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya pelayanan bagi Pengguna baik yang datang langsung ke Pusdatin maupun melalui *email* atau situs Kementan.

Penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur-unsur di atas untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pengguna layanan Pusdatin yaitu layanan data dan informasi pertanian, dengan memberikan nilai sangat baik/puas diberi nilai persepsi 4, baik/puas diberi nilai persepsi 3, kurang baik/puas diberi nilai persepsi 2, dan tidak baik/puas diberi nilai persepsi 1.

**5. Penetapan Jumlah Responden** dengan menggunakan rumus dan tabel sampel Morgan dan Krejcie yaitu dengan mengidentifikasi jumlah populasi pengguna layanan Pusdatin atau responden sebesar 464 (empat ratus enam puluh empat) responden yang telah diverifikasi untuk mendapatkan target responden yang valid dan jumlah sampelnya.

**6. Lokasi Pengumpulan Data** tidak dapat ditetapkan mengingat lokasi responden tersebar di beberapa lokasi di luar kota Jakarta sehingga membutuhkan anggaran transportasi yang cukup besar untuk melakukan metode tatap muka. Pengumpulan data dilakukan secara acak berdasarkan data responden yang telah diverifikasi atau teridentifikasi valid mengingat teknik survei menggunakan proses pengisian *e-form* kuesioner secara mandiri oleh pengguna yang dikirimkan melalui nomor ponsel atau *email* yang valid oleh tim survei.

#### **7. Penetapan Waktu Pengumpulan Data**

- a. Pemilihan calon responden dimulai dengan menetapkan kriteria yang berasaskan ketidakberpihakan dan memiliki nomor ponsel dan *email* yang valid;
- b. Kemudian ditetapkan waktu pengumpulan dan pengolahan data pada bulan Januari sampai dengan bulan November 2025 untuk mendapatkan masukan dari responden dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan dan perbaikan yang diperlukan.

#### **8. Penetapan Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Pengguna,**

##### **A. Melalui Aplikasi Simpeldatin**

- Untuk mengajukan permohonan data, silakan kunjungi alamat berikut: <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id>;
- Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun Simpeldatin dengan memilih tombol Masuk/Daftar;

- Silakan lengkapi seluruh kolom yang tersedia sesuai dengan data yang diminta untuk menyelesaikan proses pendaftaran akun. Jika seluruh kolom telah diisi dengan benar, selanjutnya klik tombol Daftar untuk melanjutkan;
- Namun, apabila Anda telah memiliki akun, silakan klik tombol Masuk yang terletak di bawah tombol Daftar. Kemudian, masukkan alamat *email* dan kata sandi yang telah didaftarkan, lalu klik tombol Masuk untuk mengakses *system*;
- Setelah mengisi seluruh kolom pendaftaran, Pemohon Data akan menerima *email* berisi tautan untuk aktivasi akun. Silakan buka *email* tersebut dan klik tautan aktivasi guna mengaktifkan akun SIMPELDATIN;
- Setelah mengklik tautan yang dikirimkan melalui *email*, silakan lanjutkan dengan menekan tombol "Aktifkan" untuk mengaktifkan akun Anda;
- Setelah proses pendaftaran dan aktivasi akun selesai dilakukan, Pemohon Data dapat mengajukan permohonan data dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia. Formulir permohonan data dapat diakses melalui tombol yang terdapat pada halaman *Dashboard* maupun melalui menu yang tersedia di *Sidebar*;
- Lengkapi seluruh isian pada formulir permohonan data sesuai dengan kebutuhan permohonan Anda. Setelah semua kolom terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol Submit untuk mengajukan permohonan data secara resmi;
- Untuk memantau proses permohonan data yang telah diajukan, silakan akses halaman *Dashboard*, kemudian lihat pada bagian Riwayat Permohonan Data. Pada bagian ini, Pemohon Data dapat melihat status serta perkembangan dari setiap permohonan yang telah dikirimkan;
- Apabila permohonan data telah diselesaikan, Pemohon Data akan diminta untuk mengisi **survei kepuasan** dan memberikan penilaian (*rating*) terlebih dahulu sebagai bagian dari evaluasi layanan. Setelah survei dan penilaian selesai diisi, barulah data dapat diunduh.

#### **B. Secara manual melalui tautan <https://bit.ly/surveipusdatin>**

- *Pengiriman e-form* kuesioner pada tautan <https://bit.ly/surveipusdatin> ke nomor ponsel pengguna layanan Pusdatin dengan aplikasi WhatsApp atau melalui *email*;
- Pengiriman pesan "*reminder*" melalui nomor ponsel pengguna layanan Pusdatin dengan aplikasi WhatsApp atau melalui *email* dilampirkan *e-form* kuesioner pada tautan <https://bit.ly/surveipusdatin> untuk mengingatkan responden agar memberikan respon dengan mengisi e-form kuesioner pada tautan tersebut.

**9. Pengolahan Data** menggunakan pedoman survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik lingkup kementerian pertanian sesuai lampiran III pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018.

**10. Analisis Hasil Survei Kepuasan Pengguna** dilakukan dengan analisis deskriptif, sebagai berikut:

- a. Deskripsi nilai indeks per unsur layanan pusdatin, dimana terdapat 9 unsur layanan yang dinilai;
- b. Jumlah responden, nilai indeks dan nilai IKM;
- c. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan.

**11. Penetapan Rencana Tindak Lanjut** dilakukan dengan prioritas perbaikan dimulai dari unsur yang mendapatkan nilai rendah, khususnya 3 unsur dengan nilai terendah. Rencana tindak lanjut disusun dengan format yang memuat prioritas perbaikan/peningkatan terkait unsur penilaian, program atau kegiatan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab pelaksana.

**12. Pelaporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna**, sebagai berikut

- a. Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, tujuan kegiatan survei kepuasan pengguna, metode survei, tim survei, dan jadwal pelaksanaan;
- b. Analisis, yang memuat data kuesioner, perhitungan dan deskripsi analisis; dan
- c. Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI

### 1.1 Pertimbangan Isu, Risiko, dan Peluang

Pertimbangan Isu, Risiko, dan Peluang Dalam pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin untuk tujuan pencapaian hasil atau respon yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

No	Deskripsi
1.	Isu: Data pengguna riil (data mentah) yang telah diverifikasi tidak selalu dilengkapi dengan kontak nomor ponsel dan <i>email</i> yang dibutuhkan untuk menghubungi atau mengingatkan responden.
a.	Risiko: Data pengguna riil tanpa kontak nomor ponsel dan <i>email</i> / tidak dapat diakses sehingga berisiko jumlah target responden menjadi kecil.
b.	Peluang: Melakukan verifikasi data pengguna yang memiliki nomor ponsel dan <i>email</i> sebagai target responden dalam pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin.
c.	Tindakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus ditetapkan format tabel dan prosedur perekaman/pencatatan data pengguna layanan data dan informasi serta sistem informasi dilengkapi dengan nomor ponsel dan <i>email</i> agar dalam pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin pada periode berikutnya mendapatkan jumlah responden sesuai populasi survei yang dipersyaratkan;</li> <li>2) Harus disepakati bahwa pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin Tahun Anggaran 2025 menggunakan data valid yang memiliki nomor ponsel dan <i>email</i> mengingat waktu dan sumber daya yang terbatas.</li> </ol>
2.	Isu: Jika respon dari responden/pengguna tidak sesuai harapan walaupun di dalam surat pengantar disebutkan batas waktu respon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
a.	Risiko: Jumlah hasil survei yang diterima sangat kecil tidak memenuhi minimal sampel.
b.	Peluang: Melakukan tindakan untuk mengingatkan responden melalui nomor ponsel dengan aplikasi WhatsApp.
c.	Tindakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirimkan pesan melalui nomor ponsel dengan aplikasi WhatsApp sebagai <i>reminder</i> kepada responden bahwa Pusdatin telah mengirimkan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin dan masih diberikan waktu untuk merespon atau memberikan <i>feedback</i> pada <i>e-form</i> kuesioner yang telah dikirimkan;</li> <li>• Jika responden masih tetap tidak mengisi <i>e-form</i> kuesioner, maka harus ditetapkan apakah penilaian atau <i>feedback</i> bagi responden yang tidak merespon dianggap memberikan nilai 4 (empat) atau sangat puas sesuai yang tertulis di dalam surat pengantar.</li> </ul>

## 1.2 Langkah-Langkah Survei

Berikut ini merupakan langkah yang dilakukan dalam melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin secara manual sebagai berikut :

**a) Pengiriman *E-form* Kuesioner** survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin melalui tautan <https://bit.ly/surveipusdatin> ke nomor ponsel pengguna yang telah diverifikasi dengan aplikasi WhatsApp, dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengiriman *e-form* kuesioner dan surat pengantar pertama melalui nomor ponsel pengguna dengan dengan aplikasi WhatsApp untuk tujuan mendapatkan respon yang cepat dan tepat;
- Pengiriman *e-form* kuesioner dan surat pengantar kedua melalui nomor ponsel Pengguna dengan dengan aplikasi WhatsApp melalui pesan *reminder*, dengan tujuan mengkonfirmasi dan mengingatkan responden bahwa Pusdatin telah mengirimkan *e-form* kuesioner untuk tujuan peningkatan pelayanan kepada responden, jika pengguna belum mengisi *e-form* kuesioner;
- Mengisi berita pada sesuai teks yang telah dibakukan, sebagai berikut:

*Selamat pagi Bapak/Ibu Pengguna Layanan Pusdatin Pertanian yth,*

*Salah satu upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan adalah mendapatkan umpan balik dari Bapak/Ibu sebagai pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Pertanian melalui Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna periode layanan Januari - November 2025.*

*Kami berharap Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi kuesioner kepuasan pengguna layanan pusdatin Tahun Anggaran 2025 ini dengan memberikan penilaian secara obyektif agar tujuan dari kegiatan survei kepuasan pengguna ini tercapai dan akan memberikan manfaat bagi kami dan pengguna layanan Pusdatin lainnya. Kami menjamin kerahasiaan identitas dan masukan yang diberikan oleh Bapak/ibu.*

*Silahkan Bapak/Ibu mengakses tautan <https://bit.ly/surveipusdatin>, dan jika ada pertanyaan, dapat menghubungi kami melalui email [survei.pusdatin@gmail.com](mailto:survei.pusdatin@gmail.com) .*

*Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kegiatan survei ini*

*Hormat kami,*

*Tim Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Pertanian*

- Memasukkan nomor-nomor ponsel responden yang telah divalidasi paling banyak 5 (lima) nomor untuk 1 (satu) kali pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp;
- Klik *SEND* untuk mengirim pesan WhatApp, jika telah sesuai.

**b) Pengiriman *e-form* kuesioner** survei kepuasan layanan Pusdatin melalui tautan <https://bit.ly/surveipusdatin> ke *email* pengguna.

### 1.3 Pengumpulan Hasil Survei

Langkah-Langkah dalam pengumpulan data hasil survei pengguna layanan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin adalah sebagai berikut :

- Unduh data hasil survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin dengan format MS Excel dari tautan <https://bit.ly/surveipusdatin> dan <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id>.
- Simpan *file* yang diunduh ke *folder* khusus dan berikan identifikasi nama dan tanggal dan bulan saat diunduh pada file tersebut agar mudah ditelusuri.

### 1.4 Pengolahan Data Hasil Survei

Pengolahan data hasil survei dengan menggunakan pedoman survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian sesuai Lampiran III pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018.

- Menggunakan pengukuran dengan skala *likert*;
- Pengolahan data hasil survei secara manual:
  - Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam tabel dengan format MS Excel mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 9 (U9);
  - Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:
    - Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi;
    - Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang;
    - Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.
- Perhitungan Nilai Indeks merupakan jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang dari setiap Unsur Pelayanan (U1 sampai dengan U9) dikalikan dengan Angka Penimbang yang sama yaitu 11 atau 0,111 untuk setiap unsur:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

- Untuk memperoleh Nilai IKM/IKU dari masing-masing kelompok di Pusdatin, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus:

$$\text{IKM} \times \text{Nilai Dasar 25}$$

- Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

### 1.5 Analisis Data Hasil Survei

Penetapan analisis univariat untuk memaparkan hasil survei yang memuat data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis dengan memberikan data statistik, tabulasi, dan serta perhitungan deskriptif dari masing-masing 9 (sembilan) unsur yang disurvei.

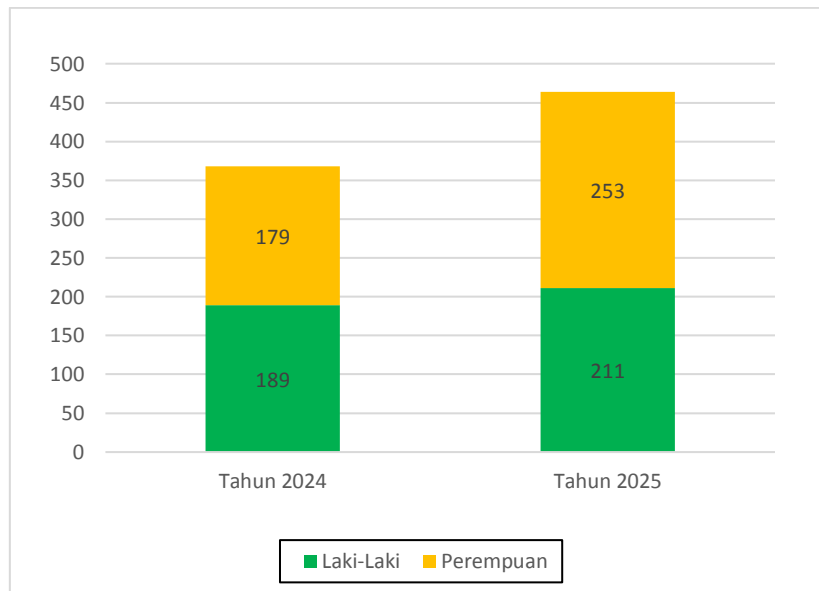
# BAB III

## HASIL SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PUSDATIN TAHUN 2025

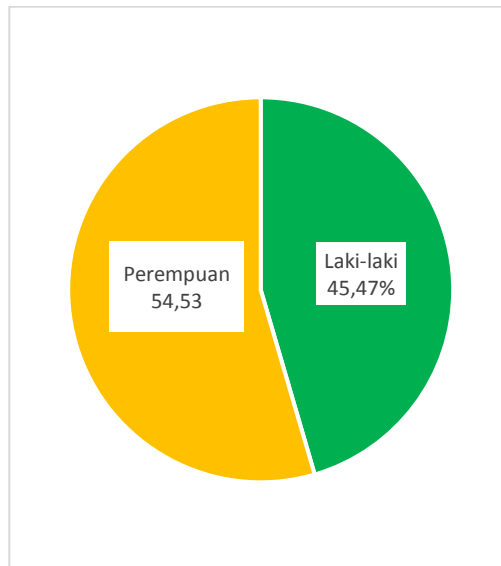
### 3.1 Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Tabel 1. Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun 2024	Tahun 2025	Persentase Tahun 2025 (%)
Laki-laki	189	211	45,47
Perempuan	179	253	54,53
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>464</b>	<b>100</b>



Gambar 1. Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

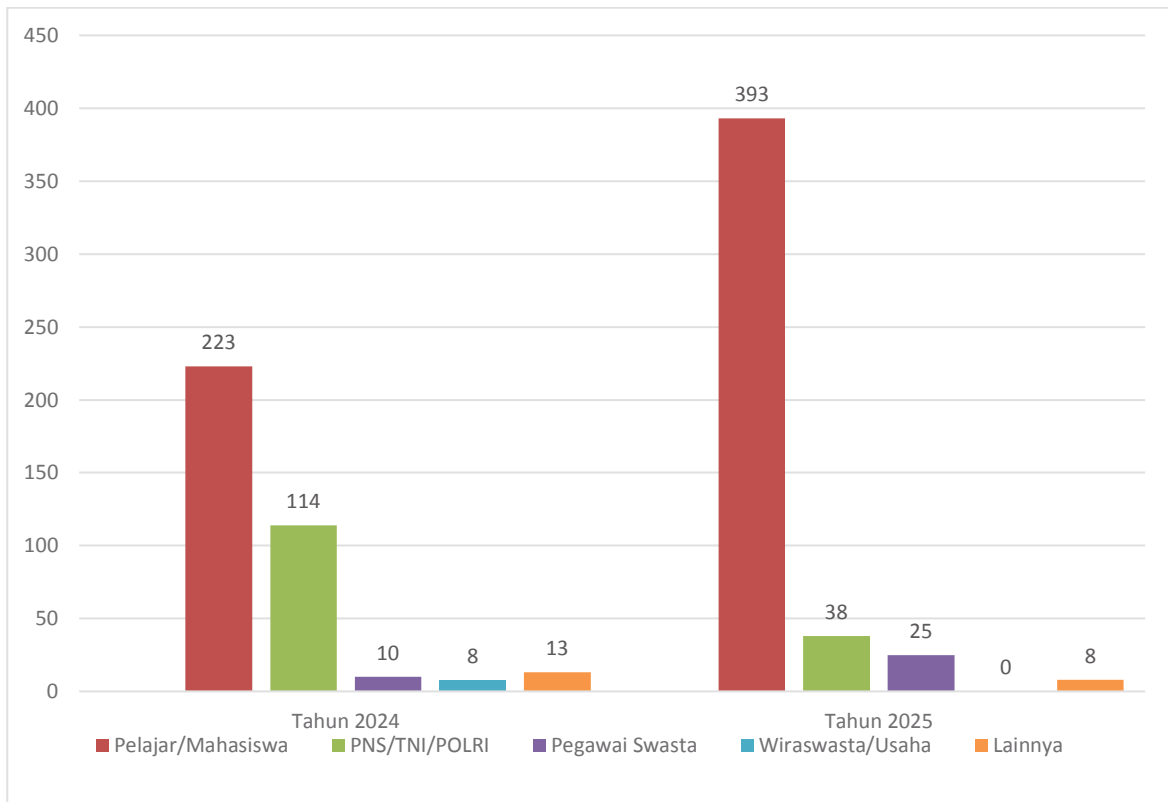


Gambar 2. Persentase Responden Survei Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

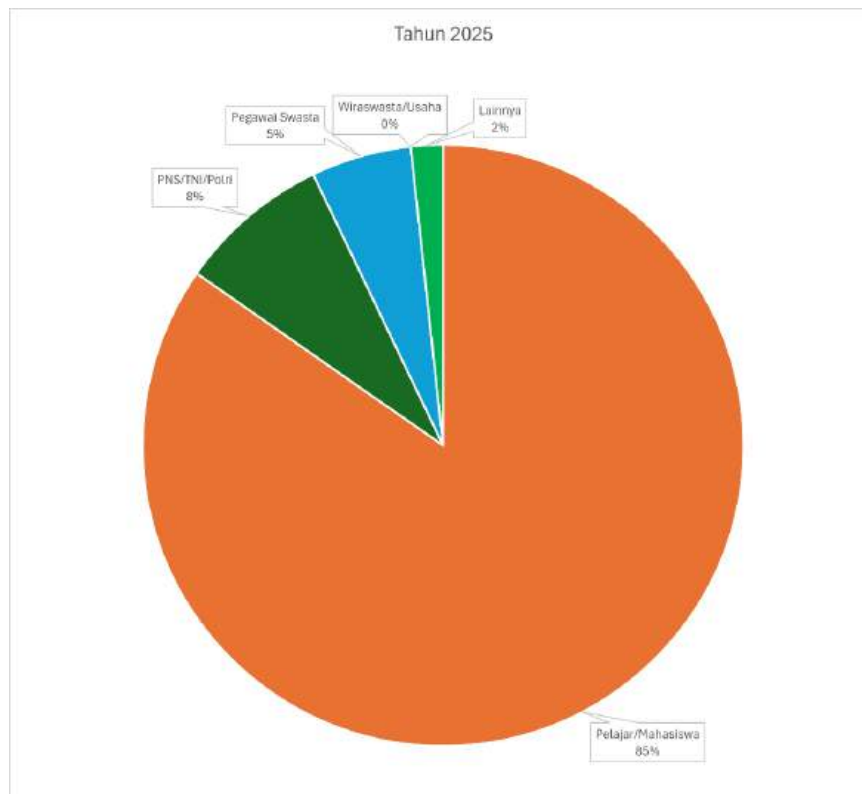
### 3.2 Responden Survei Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025

Tabel 2. Responden Survei Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025

Pekerjaan	Tahun 2024	Tahun 2025	Persentase Tahun 2025
			%
Pelajar/Mahasiswa	223	393	84,70
PNS/TNI/POLRI	114	38	8,19
Pegawai Swasta	10	25	5,39
Wiraswasta/Usaha	8	0	0,00
Lainnya	13	8	1,72
<b>Grand Total</b>	<b>368</b>	<b>464</b>	<b>100,00</b>



Gambar 3. Responden Survei Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025

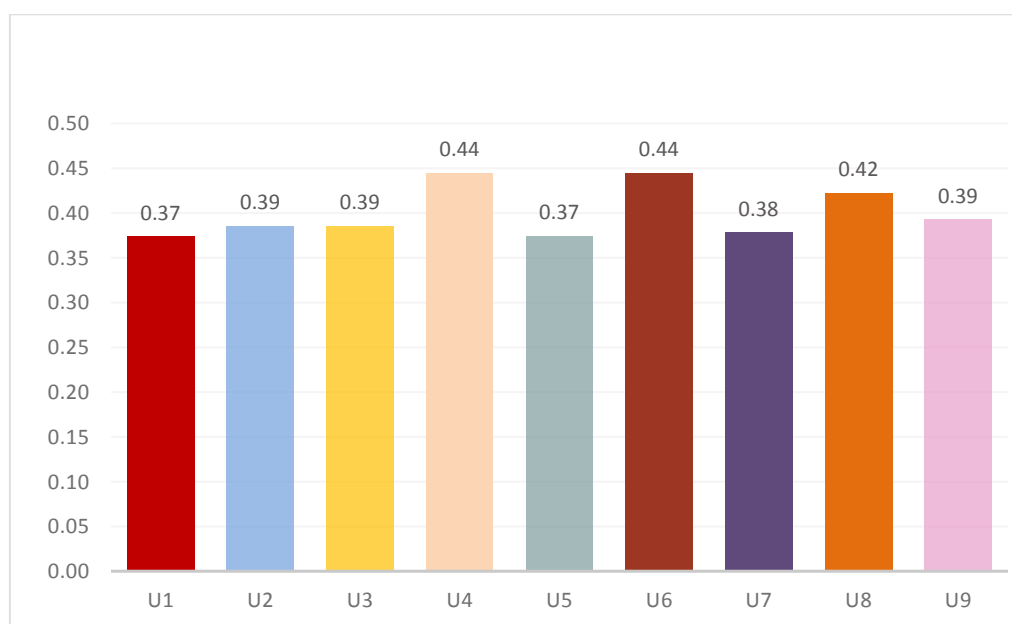


Gambar 4. Persentase Responden Survei Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025

### 3.2.1 Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025

Tabel 3. Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025

No.	Unsur	Tahun 2025		
		Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur	Nilai Indeks
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	1.560	3,36	0,37
2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	1.611	3,47	0,39
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1.611	3,47	0,39
4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	1.856	4,00	0,44
5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	1.562	3,37	0,37
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	1.856	4,00	0,44
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	1.576	3,40	0,38
8	Penanganan Pengaduan	1.761	3,80	0,42
9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	1.640	3,53	0,39
<b>Nilai Indeks</b>				<b>3,60</b>
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				<b>90,00</b>
<b>Kinerja PUSDATIN</b>				<b>(A) Sangat Baik</b>

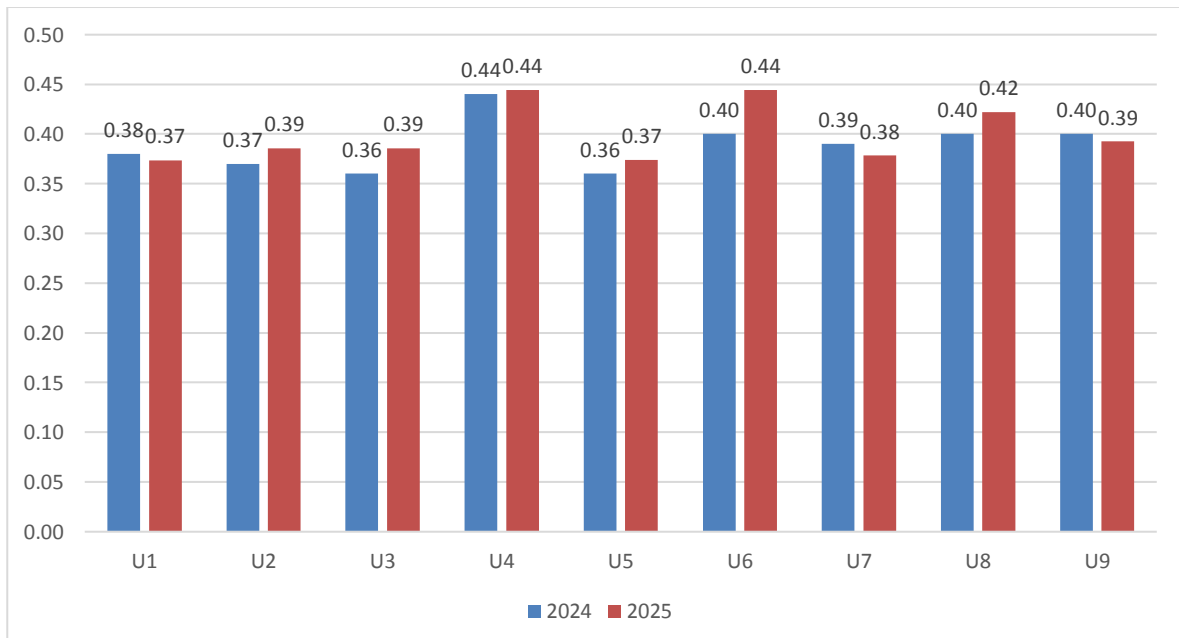


Gambar 5. Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2025

### 3.2.2 Perbandingan Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2024 dan 2025

Tabel 4. Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2024 dan 2025

No.	Unsur	Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan		Nilai Rata-Rata Per Unsur		Nilai Indeks	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	1.272	1.560	3,46	3,36	0,38	0,37
2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	1.230	1.611	3,34	3,47	0,37	0,39
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1.176	1.611	3,20	3,47	0,36	0,39
4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	1.472	1.856	4,00	4,00	0,44	0,44
5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	1.195	1.562	3,25	3,37	0,36	0,37
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	1.341	1.856	3,64	4,00	0,40	0,44
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	1.288	1.576	3,50	3,40	0,39	0,38
8	Penanganan Pengaduan	1.341	1.761	3,64	3,80	0,40	0,42
9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	1.340	1.640	3,64	3,53	0,40	0,39
Nilai Indeks						3,52	3,60
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat						87,98	90,00
<b>Kinerja PUSDATIN</b>						<b>(B) Baik</b>	<b>(A) Sangat Baik</b>



Gambar 6. Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2024 dan 2025

### 3.3 Perbandingan Jumlah Responden, Nilai Indeks dan IKM Tahun 2024 dan 2025

Tabel 5. Jumlah Responden, Nilai Indeks dan IKM Tahun 2024 dan 2025

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>
Responden	368	464
Nilai Indeks	3,52	3,60
Nilai IKM	87,98	90,00
<b>Kinerja Pusdatin</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

#### **4.1 Rangkuman dan Evaluasi**

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator kinerja organisasi pemerintahan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Walidata sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian, dan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022, yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan bertanggung jawab memberikan pelayanan serta publikasi data dan informasi pertanian pada Kementerian Pertanian melalui situs Kementerian Pertanian, media cetak, media elektronik, dan media publikasi resmi lainnya.

Tujuan dan manfaat Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin adalah :

- 5) Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin;
- 6) Mengetahui unsur-unsur pelayanan Pusdatin yang perlu ditingkatkan;
- 7) Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin terhadap publik; dan
- 8) Merumuskan upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan Pusdatin secara berkelanjutan.

Hasil survei sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Pusdatin termasuk perlu atau tidaknya kebijakan dari pimpinan Pusdatin dalam menindaklanjuti umpan balik tersebut dan mengidentifikasi skala prioritas serta alokasi anggaran, kemudian dengan merencanakan tindak lanjutnya.

Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan untuk meningkatkan penerapan penyelenggaraan pelayanan publik, yang secara langsung tentunya akan meningkatkan IKM sebagai indikator kinerja organisasi.

Melakukan *monitoring* dan pengendalian pada sistem dan prosedur pelayanan Pusdatin serta melakukan kaji ulang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna baik untuk produk maupun kecepatan layanan.

#### **4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut**

Hasil survei sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Pusdatin termasuk kebijakan dari pimpinan Pusdatin dalam menindaklanjuti umpan balik, dan mengidentifikasi skala prioritas, kemudian dengan rencana tindakan sebagai berikut :

1. Mengulas standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan data pertanian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan data;
2. Mengevaluasi secara berkala alur proses pelayanan data dan informasi dan mengkomunikasikannya kepada pengguna melalui media komunikasi yang tersedia baik daring maupun luring;
3. Mereviu semua SOP terkait pelayanan data dan informasi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun;
4. Peningkatan kompetensi SDM yang terlibat di dalam pelayanan pengguna, sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
5. Memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan akses layanan dan kenyamanan pengguna, termasuk pengembangan aplikasi Simpeldatin yang mudah dan nyaman diakses untuk mengajukan permohonan data dan sistem informasi;
6. Melakukan *monitoring* dan pengendalian pada sistem dan prosedur pelayanan Pusdatin serta melakukan kaji ulang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna baik untuk produk maupun kecepatan layanan; dan
7. Melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna yang terkait dengan kebijakan yang sifatnya strategis.

#### **4.3 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan, sebagai berikut:

**Tabel Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Pusdatin Tahun 2025**

Unsur		2025
U1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	0.37
U5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	0.37
U7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	0.38
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	0.39
U2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	0.39
U9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	0.39
U8	Penanganan Pengaduan	0.42
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	0.44
U4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	0.44

Berdasarkan tabel diatas, maka prioritas perbaikan kualitas layanan yang diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sebagai berikut :

**Tabel Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Pusdatin Tahun 2025**

Unsur		2025
U1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	0.37
U5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	0.37
U7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	0.38

**1. Unsur Ke-1: Kemudahan Persyaratan Administrasi**

- Menganalisis penyebab kesulitan persyaratan administrasi dan mengembangkan solusi yang efektif.
- Meningkatkan komunikasi dengan pengguna layanan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait persyaratan administrasi.

**2. Unsur Ke-5: Layanan Yang Sesuai Kebutuhan**

- Melakukan pemutakhiran katalog layanan data pada Simpeldatin.
- Meningkatkan komunikasi dengan pengguna layanan melalui chat bantuan pada Simpeldatin untuk memahami kebutuhan data sesuai layanan.

- Pengembangan aplikasi Simpeldatin untuk penyajian katalog layanan yang *user friendly*.

### **3. Unsur Ke-7: Kesopanan dan Keramahan Petugas**

- Membuat template untuk balasan chat bantuan, balasan email dan formulir penyampaian data dengan bahasa yang baik dan sopan.
- Melakukan pelatihan petugas untuk meningkatkan kesopanan dan keramahan mereka dalam berinteraksi dengan pengguna layanan.
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja petugas untuk memastikan bahwa mereka telah memberikan pelayanan yang sopan dan ramah.

#### **4.4 Publikasi Hasil Survei**

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dipublikasikan pada ruang layanan sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2018.

#### **4.5 Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dan rencana tindak lanjutnya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

#### **4.6 Penutup**

Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin merupakan bagian dari Standar Pelayanan Publik (SPP) yang menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi Pusdatin.

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin yang disajikan pada laporan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan Pusdatin Tahun 2025.

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2025  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2025**

**NILAI IKM**

**90,00**

**LAYANAN DAN PUBLIKASI  
DATA DAN INFORMASI PERTANIAN**

**DATA RESPONDEN**

Jumlah Responden	:	464	Orang
Laki-laki = 211			
Perempuan = 253			
Pekerjaan = Pelajar / Mahasiswa	:	393	Orang
PNS/TNI/POLRI	:	38	Orang
Swasta	:	25	Orang
Lainnya	:	8	Orang

Periode Survei : Januari s.d Desember 2025

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN,  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT  
KERJA KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN  
KUALITAS PELAYANAN KEPADA PENGGUNA / MASYARAKAT**



# LAMPIRAN

## Lampiran Hasil Penilaian Responden Terhadap Masing - Masing Unsur Layanan

**DATA RESPONDEN SURVEI TAHUN 2025  
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI  
PUSAT DATA DAN INFORMASI - SEKERTARIAT JENDERAL  
TAHUN 2025**

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	4	3	3	4
2	3	3	3	4	3	4	3	3	4
3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
4	3	4	4	4	3	4	3	3	4
5	3	4	4	4	3	4	3	3	4
6	3	4	4	4	3	4	3	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4
13	3	3	3	4	3	4	3	4	3
14	3	3	3	4	3	4	3	4	3
15	3	3	3	4	3	4	3	4	3
16	3	3	3	4	3	4	3	4	3
17	3	3	3	4	3	4	3	4	3
18	3	3	4	4	3	4	3	3	3
19	3	3	4	4	3	4	3	4	3
20	3	3	4	4	3	4	3	3	3
21	3	4	3	4	3	4	3	4	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	4	3	4	3	4	3
25	3	3	3	4	3	4	3	4	3
26	3	3	3	4	3	4	3	4	3
27	4	3	4	4	3	4	3	4	3
28	4	3	4	4	3	4	3	4	3
29	3	3	3	4	3	4	3	4	4
30	3	3	3	4	3	4	3	4	4
31	3	3	3	4	3	4	3	4	4
32	3	3	3	4	3	4	3	3	4
33	3	3	3	4	3	4	3	3	4
34	3	3	3	4	3	4	3	4	3

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
35	3	3	3	4	3	4	3	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	3	4	4	4	3	4	3	3	4
41	3	3	3	4	3	4	3	4	4
42	3	3	3	4	3	4	3	3	3
43	3	3	3	4	3	4	3	3	3
44	3	3	3	4	3	4	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	3	4	4	4	4	4	4
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	3	3	4	3	4	3	4	3
49	3	3	3	4	3	4	3	4	3
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	4	3	4	3	4	3	4	4
57	3	4	4	4	3	4	4	4	3
58	3	4	4	4	3	4	4	4	3
59	3	3	4	4	3	4	3	4	3
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	3	3	4	4	3	4	3	3	3
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	3	4	3	4	4
65	4	4	4	4	3	4	3	4	4
66	3	3	3	4	4	4	3	3	4
67	3	3	3	4	3	4	3	3	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	3	3	4	4	3	4	3	3	3
72	4	3	4	4	3	4	3	4	4
73	4	3	4	4	3	4	3	4	4
74	4	3	4	4	3	4	3	4	4
75	4	4	3	4	4	4	3	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	3	4	4	4	3	3	4
79	4	4	3	4	4	4	3	3	4
80	4	4	3	4	4	4	3	3	4

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
81	4	4	3	4	4	4	3	3	4
82	4	4	3	4	4	4	3	3	4
83	4	4	3	4	4	4	3	3	4
84	3	3	4	4	3	4	3	4	4
85	3	3	4	4	3	4	3	4	4
86	3	3	4	4	3	4	3	4	4
87	3	4	4	4	3	4	3	4	3
88	3	4	4	4	3	4	3	4	3
89	3	3	3	4	3	4	3	3	3
90	3	3	3	4	3	4	3	3	3
91	3	3	3	4	3	4	3	3	3
92	3	3	3	4	3	4	3	3	3
93	3	3	3	4	3	4	3	3	3
94	3	3	3	4	3	4	3	3	3
95	3	3	3	4	3	4	3	3	3
96	3	3	3	4	4	4	3	4	3
97	3	3	3	4	4	4	3	4	3
98	3	3	3	4	4	4	3	4	3
99	3	3	3	4	4	4	3	4	3
100	3	3	3	4	4	4	3	4	3
101	3	3	3	4	4	4	3	4	3
102	3	3	3	4	4	4	3	4	3
103	3	3	3	4	4	4	3	4	3
104	3	3	3	4	3	4	3	3	3
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	3	3	4	3	4	4	4	3
109	4	3	3	4	3	4	4	4	3
110	3	4	3	4	3	4	3	4	3
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	3	3	3	4	3	4	3	4	3
113	3	3	3	4	3	4	3	4	4
114	3	3	3	4	3	4	3	4	4
115	3	3	3	4	3	4	3	4	4
116	3	3	3	4	3	4	3	4	4
117	3	3	3	4	3	4	3	4	4
118	3	3	3	4	3	4	3	4	4
119	3	3	3	4	3	4	3	4	4
120	3	3	3	4	3	4	3	4	4
121	3	3	3	4	3	4	3	4	4
122	3	3	3	4	3	4	3	4	4
123	3	3	3	4	3	4	3	4	4
124	3	3	3	4	3	4	3	4	4
125	3	3	3	4	3	4	3	4	4
126	3	3	3	4	3	4	3	3	3

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
127	3	3	3	4	3	4	3	3	3
128	3	3	3	4	3	4	3	3	3
129	3	3	3	4	3	4	3	3	3
130	3	3	3	4	3	4	3	3	3
131	3	3	3	4	3	4	3	3	3
132	3	3	3	4	3	4	3	3	3
133	3	3	3	4	3	4	3	3	3
134	3	3	3	4	3	4	3	3	3
135	3	3	3	4	3	4	3	3	3
136	3	3	3	4	3	4	3	3	3
137	3	3	3	4	3	4	3	3	3
138	3	3	3	4	3	4	3	3	3
139	3	3	3	4	3	4	3	3	3
140	3	3	3	4	3	4	3	3	3
141	3	3	3	4	3	4	3	3	3
142	3	3	3	4	3	4	3	3	3
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	3	4	3	4	3
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	3	3	3	4	4	4	3	4	3
154	3	3	3	4	4	4	3	4	3
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	3	3	3	4	3	4	3	4	3
159	3	3	3	4	3	4	3	4	3
160	4	4	4	4	4	4	3	4	4
161	4	4	4	4	4	4	3	4	4
162	3	3	3	4	3	4	3	3	4
163	3	3	3	4	3	4	3	4	3
164	3	3	3	4	3	4	3	4	3
165	3	4	4	4	3	4	3	4	4
166	3	4	4	4	3	4	3	4	4
167	3	4	4	4	3	4	3	4	4
168	3	4	4	4	3	4	3	4	4
169	3	4	4	4	3	4	3	4	4
170	3	4	4	4	3	4	3	4	4
171	3	4	4	4	3	4	3	4	4
172	3	3	3	4	3	4	3	3	3

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
173	3	3	3	4	3	4	3	3	3
174	3	3	3	4	3	4	3	3	3
175	3	3	3	4	3	4	3	3	3
176	3	3	3	4	3	4	3	3	3
177	3	3	3	4	3	4	3	3	3
178	3	3	3	4	3	4	3	3	3
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	3	3	3	4	3	4	3	4	3
188	3	3	3	4	3	4	3	4	3
189	3	3	3	4	3	4	3	4	3
190	3	3	3	4	3	4	3	4	3
191	3	4	3	4	3	4	3	3	4
192	3	4	3	4	4	4	3	4	4
193	3	4	3	4	4	4	3	4	4
194	4	3	4	4	4	4	4	4	4
195	4	3	4	4	4	4	4	4	4
196	3	3	3	4	3	4	3	4	3
197	3	3	3	4	3	4	3	4	3
198	3	3	3	4	3	4	3	4	3
199	3	3	3	4	3	4	3	4	3
200	3	3	3	4	3	4	3	4	3
201	3	3	3	4	3	4	3	4	3
202	3	3	3	4	3	4	3	4	3
203	3	3	3	4	3	4	3	4	3
204	3	3	3	4	3	4	3	4	3
205	3	3	3	4	3	4	3	4	3
206	3	3	3	4	3	4	3	4	3
207	3	3	3	4	3	4	3	4	3
208	3	3	3	4	3	4	3	4	3
209	3	3	3	4	3	4	3	4	3
210	3	3	3	4	3	4	3	4	3
211	3	3	3	4	3	4	3	4	3
212	3	3	3	4	3	4	3	4	3
213	3	3	3	4	3	4	3	4	3
214	3	3	3	4	3	4	3	4	3
215	3	3	3	4	3	4	3	4	3
216	3	3	3	4	3	4	3	4	3

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
217	3	3	3	4	3	4	3	4	3
218	3	3	3	4	3	4	3	4	3
219	3	3	3	4	3	4	3	4	3
220	3	3	3	4	3	4	3	4	3
221	3	3	3	4	4	4	4	4	3
222	3	3	3	4	4	4	4	4	3
223	3	3	4	4	3	4	3	3	3
224	3	3	4	4	3	4	3	3	3
225	3	3	4	4	3	4	3	3	3
226	3	3	3	4	3	4	3	4	3
227	3	3	3	4	3	4	3	4	3
228	3	3	3	4	3	4	3	4	3
229	3	3	3	4	3	4	3	4	3
230	3	3	3	4	3	4	3	4	3
231	3	3	3	4	3	4	3	4	3
232	3	3	3	4	3	4	3	4	3
233	3	3	3	4	3	4	3	4	3
234	3	3	3	4	3	4	3	4	3
235	3	3	3	4	3	4	3	4	3
236	3	3	3	4	3	4	3	4	3
237	3	3	3	4	3	4	3	4	3
238	3	3	3	4	3	4	3	4	3
239	3	3	3	4	3	4	3	4	3
240	3	3	3	4	3	4	3	4	3
241	3	3	3	4	3	4	3	4	3
242	3	3	3	4	3	4	3	4	4
243	3	3	3	4	3	4	3	4	4
244	3	3	3	4	3	4	3	4	4
245	3	3	3	4	3	4	3	4	4
246	3	3	3	4	3	4	3	4	4
247	3	3	3	4	3	4	3	4	4
248	3	3	3	4	3	4	3	4	4
249	3	3	3	4	3	4	3	4	4
250	3	3	3	4	3	4	3	4	4
251	3	3	3	4	3	4	3	4	4
252	3	3	3	4	3	4	3	4	4
253	3	3	4	4	4	4	3	4	4
254	3	3	4	4	4	4	3	4	4
255	3	3	4	4	4	4	3	4	4
256	3	3	4	4	4	4	3	4	4
257	3	3	4	4	4	4	3	4	4
258	3	3	4	4	4	4	3	4	4
259	3	3	4	4	4	4	3	4	4

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
260	3	3	3	4	3	4	3	4	3
261	3	3	3	4	3	4	3	3	3
262	3	3	3	4	3	4	3	3	3
263	3	4	4	4	3	4	3	4	4
264	3	4	4	4	3	4	3	4	4
265	3	4	4	4	3	4	3	4	4
266	3	4	4	4	3	4	3	4	4
267	3	4	4	4	3	4	3	4	4
268	3	4	4	4	3	4	3	4	4
269	3	4	4	4	3	4	3	4	4
270	3	3	3	4	3	4	3	4	3
271	3	3	3	4	3	4	3	4	3
272	3	3	3	4	3	4	3	4	3
273	3	3	3	4	3	4	3	4	3
274	3	3	3	4	3	4	3	4	3
275	3	3	3	4	3	4	3	4	3
276	3	3	3	4	3	4	3	4	3
277	3	3	3	4	3	4	3	4	3
278	3	3	3	4	3	4	3	4	4
279	3	3	3	4	3	4	3	4	4
280	3	3	3	4	3	4	3	4	4
281	3	3	3	4	3	4	3	4	4
282	3	3	3	4	3	4	3	4	4
283	3	3	3	4	3	4	3	4	4
284	3	3	3	4	3	4	3	4	4
285	3	3	3	4	3	4	3	4	3
286	3	3	3	4	3	4	3	4	3
287	3	4	4	4	4	4	3	3	3
288	3	4	4	4	4	4	3	3	3
289	3	4	4	4	4	4	3	3	3
290	3	4	4	4	4	4	3	3	3
291	3	4	4	4	4	4	3	3	3
292	3	4	4	4	4	4	3	3	3
293	3	4	4	4	4	4	3	3	3
294	4	4	3	4	4	4	3	3	4
295	3	3	3	4	3	4	3	3	4
296	3	3	3	4	3	4	3	3	4
297	3	3	3	4	3	4	3	3	4
298	3	3	3	4	3	4	3	3	4
299	3	3	3	4	3	4	3	3	4
300	3	3	3	4	3	4	3	3	4
301	3	3	3	4	3	4	3	3	4
302	3	3	3	4	3	4	3	3	4

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
303	3	3	3	4	3	4	3	3	4
304	3	3	3	4	3	4	3	3	3
305	3	3	3	4	3	4	3	3	3
306	3	3	3	4	3	4	3	3	3
307	3	3	3	4	3	4	3	3	3
308	3	3	3	4	3	4	3	3	3
309	3	3	3	4	3	4	3	3	3
310	3	3	3	4	3	4	3	3	3
311	3	3	3	4	3	4	3	3	3
312	3	3	3	4	3	4	3	3	3
313	3	3	4	4	3	4	3	3	4
314	3	3	3	4	3	4	3	3	4
315	3	3	3	4	3	4	3	3	4
316	3	3	3	4	3	4	3	3	4
317	3	3	3	4	3	4	3	3	4
318	3	3	3	4	3	4	3	3	4
319	3	3	3	4	3	4	3	3	4
320	3	3	3	4	3	4	3	3	4
321	3	3	3	4	3	4	3	3	3
322	3	3	3	4	3	4	3	3	3
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325	4	4	4	4	4	4	4	4	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	4	4	4	4	4	4	4	4	4
329	4	4	4	4	4	4	4	4	4
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4
331	4	4	4	4	4	4	4	4	3
332	4	4	4	4	4	4	4	4	3
333	4	4	4	4	4	4	4	4	3
334	4	4	4	4	4	4	4	4	3
335	4	4	4	4	4	4	4	4	3
336	4	4	4	4	4	4	4	4	3
337	4	4	4	4	4	4	4	4	3
338	4	4	4	4	4	4	4	4	3
339	4	4	4	4	4	4	4	4	3
340	4	4	4	4	4	4	4	4	3
341	4	4	4	4	4	4	4	4	3
342	4	4	3	4	4	4	4	4	4
343	4	4	3	4	4	4	4	4	4
344	3	3	3	4	3	4	3	3	3
345	3	3	3	4	3	4	3	3	3

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4
347	4	4	4	4	4	4	4	4	4
348	3	4	4	4	3	4	3	4	3
349	3	4	4	4	3	4	3	4	3
350	4	4	3	4	3	4	3	4	3
351	4	4	3	4	3	4	3	4	3
352	3	3	4	4	3	4	4	4	3
353	3	3	4	4	3	4	4	4	3
354	4	4	4	4	4	4	3	4	4
355	4	4	4	4	4	4	3	4	4
356	3	3	3	4	3	4	3	4	3
357	3	3	3	4	3	4	3	4	3
358	3	3	3	4	3	4	3	4	3
359	3	3	3	4	3	4	3	4	3
360	3	3	3	4	3	4	3	4	3
361	3	3	3	4	3	4	3	4	3
362	3	3	3	4	3	4	3	4	3
363	3	3	3	4	3	4	3	4	3
364	3	3	3	4	3	4	3	4	3
365	3	3	3	4	3	4	3	4	3
366	3	3	3	4	3	4	3	4	3
367	3	3	3	4	3	4	3	4	3
368	3	3	3	4	3	4	3	4	3
369	3	3	3	4	3	4	3	4	3
370	3	3	3	4	3	4	3	4	3
371	3	3	3	4	3	4	3	4	3
372	3	3	3	4	3	4	3	4	3
373	3	3	3	4	3	4	3	4	3
374	3	3	3	4	3	4	3	4	3
375	3	3	3	4	3	4	3	4	3
376	3	3	3	4	3	4	3	4	3
377	3	3	3	4	3	4	3	4	3
378	3	3	3	4	3	4	3	4	3
379	3	3	3	4	3	4	3	4	3
380	3	3	3	4	3	4	3	4	3
381	3	3	3	4	3	4	3	4	3
382	3	3	3	4	3	4	3	4	3
383	3	3	3	4	3	4	3	4	3
384	3	3	3	4	3	4	3	4	3
385	3	3	3	4	3	4	3	4	3
386	3	3	3	4	3	4	3	4	3
387	3	3	3	4	3	4	3	4	3
388	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
389	4	4	4	4	4	4	4	4	4
390	4	4	4	4	4	4	4	4	4
391	4	4	3	4	3	4	3	4	3
392	4	4	4	4	4	4	4	4	4
393	4	4	3	4	4	4	4	4	4
394	4	4	4	4	4	4	4	4	4
395	3	3	3	4	3	4	3	4	3
396	4	4	4	4	4	4	4	4	4
397	3	3	3	4	3	4	3	4	3
398	4	4	4	4	4	4	4	4	4
399	3	3	2	4	2	4	2	2	2
400	4	4	4	4	3	4	4	4	3
401	4	4	4	4	4	4	4	4	4
402	4	4	4	4	4	4	4	4	4
403	3	3	2	4	2	4	3	3	2
404	4	4	3	4	3	4	4	4	4
405	3	4	3	4	3	4	4	4	4
406	4	4	4	4	4	4	4	4	4
407	4	4	4	4	4	4	4	4	4
408	4	4	4	4	4	4	3	4	4
409	3	3	2	4	3	4	3	4	3
410	3	4	3	4	3	4	4	4	4
411	4	4	4	4	4	4	4	4	4
412	4	4	4	4	4	4	4	4	4
413	3	3	3	4	2	4	2	2	2
414	3	3	2	4	2	4	3	2	2
415	4	4	3	4	3	4	4	4	3
416	4	3	3	4	3	4	3	3	3
417	4	4	4	4	4	4	4	4	4
418	4	3	4	4	4	4	3	4	4
419	3	3	3	4	3	4	3	3	3
420	2	2	2	4	2	4	2	2	2
421	2	2	2	4	2	4	4	2	2
422	4	4	4	4	4	4	4	4	4
423	3	3	3	4	3	4	3	4	3
424	3	4	4	4	4	4	3	4	4
425	3	4	3	4	4	4	3	4	4
426	3	3	3	4	3	4	4	4	3
427	3	3	3	4	3	4	3	4	3
428	3	3	3	4	3	4	3	4	3
429	4	4	4	4	4	4	4	4	4
430	4	4	4	4	4	4	4	4	4
431	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Responden	Unsur Layanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
432	4	4	4	4	3	4	4	4	4
433	4	4	4	4	4	4	4	4	4
434	4	4	4	4	3	4	4	4	3
435	4	4	3	4	4	4	4	4	4
436	4	4	4	4	4	4	4	4	4
437	4	4	4	4	3	4	4	4	3
438	4	4	4	4	3	4	4	4	4
439	4	4	4	4	3	4	4	4	4
440	4	4	4	4	3	4	4	4	4
441	4	4	4	4	3	4	4	3	4
442	4	4	4	4	4	4	4	3	4
443	4	4	4	4	4	4	4	4	4
445	4	4	4	4	4	4	4	4	4
446	4	4	4	4	4	4	4	4	4
447	4	4	4	4	3	4	4	4	4
448	4	4	4	4	4	4	4	4	4
449	4	4	4	4	3	4	4	4	4
450	4	4	3	4	3	4	4	4	4
451	4	4	3	4	3	4	4	4	4
452	4	4	4	4	4	4	4	4	4
453	4	4	4	4	4	4	4	4	4
454	4	4	4	4	4	4	4	4	4
455	4	4	4	4	4	4	4	4	4
456	4	4	4	4	4	4	4	4	4
457	4	4	4	4	4	4	4	4	4
458	4	4	4	4	4	4	4	4	4
459	4	4	4	4	4	4	4	4	4
460	4	4	4	4	4	4	4	4	4
461	4	4	4	4	4	4	4	4	4
462	4	4	4	4	4	4	4	4	4
463	4	4	4	4	4	4	4	4	4
464	4	4	4	4	4	4	4	4	4
458	4	4	4	4	4	4	4	4	4
459	4	4	4	4	3	4	4	4	4
460	4	4	4	4	4	4	4	4	4
461	4	4	4	4	3	4	4	4	3
462	4	4	3	4	4	4	4	4	4
463	4	4	4	4	4	4	4	4	4
464	4	4	4	4	3	4	4	4	3

Keterangan: *cut-off* data per 04 Desember 2025



# PUSDATIN

## Kementerian Pertanian


 Jl, Harsono RM No.3 Gedung D Lantai 4  
Jakarta Selatan 12550

 [pusdatin.setjen.pertanian.go.id](http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id)

 (021) 7822638, 7822803

**LAMPIRAN 6**  
**Capaian SLA layanan TIK Tahun 2025**



<b>LAPORAN PROGRES PENGUKURAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
<b>Nama Pranata Komputer</b>	Bayu Mulyana	<b>Tanggal</b>	1 Januari – 31 Desember 2025
<b>NIP</b>	196606251992031002	<b>Lokasi Pekerjaan</b>	Jakarta
<b>Pangkat/Golongan</b>	Pembina Utama Muda/ IV C		
<b>Jabatan Fungsional</b>	Pranata Komputer Madya/Ketua Kelompok Pengembangan Sistem Informasi		
<b>Indikator Kinerja Individu (IKI)</b>	Service Level Agreement (SLA) layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>Target IKI Tahunan</b>	95,00%
<b>Kegiatan Yang Terkait:</b>			
Telah dilakukan pengukuran capaian Service Level Agreement layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan data capaian SLA layanan TIK bulan Januari - Desember 2025, dimana capaian SLA bulanan tersebut dihitung berdasarkan:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemantauan Capaian Service Level Agreement (SLA) Layanan Sistem Jaringan Komputer</li> <li>2 Pemantauan Capaian Service Level Agreement (SLA) Layanan Aplikasi Sistem Informasi</li> </ol>			
<b>dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan:</b>			
1. Laporan Capaian Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2025 sebesar 99.39%. Capaian ini lebih tinggi dari target SLA tahun 2025 sebesar 95.00%			
<b>Keterangan:</b>			
Dokumen terlampir			
Jakarta, 31 Desember 2025 Pejabat Pranata Komputer  <u><b>Ir. Bayu Mulyana, M.M., IPU, ASEAN Eng.</b></u> NIP. 19660625 199203 1002			

# Laporan Progres Pengukuran Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ringkasan Eksekutif

## 1. Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 296, tugas Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) adalah melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Pusdatin menyediakan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari:

- a. Layanan Sistem Jaringan Komputer; dan
- b. Layanan Aplikasi Sistem Informasi.

## 2. Indikator Kinerja dan cara Pengukuran

*Service Level Agreement* (SLA) adalah jaminan yang diberikan Pusdatin kepada pengguna dalam penyediaan Layanan TIK. Untuk tahun 2025, target yang ditetapkan untuk SLA layanan TIK adalah sebesar 95,00%.

Berdasarkan hasil identifikasi telah ditentukan bahwa untuk pengukuran SLA Layanan TIK dihitung berdasarkan komponen:

- a. SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, yang terdiri dari:
  - 1) *Service Level Agreement* (SLA) Layanan Internet (%)
  - 2) *Service Level Agreement* (SLA) Layanan Data Center (%)
  - 3) Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%)
- b. SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, yang terdiri dari:
  - 1) Pemenuhan atas permintaan layanan subbidang Aplikasi Sistem Informasi (%)

- 2) Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%)
- 3) Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan (%)

Pengukuran SLA Layanan TIK diperoleh dari rata-rata pengukuran SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer dan SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, sebagaimana tabel berikut ini:

Layanan	Indikator Kinerja		Target 2025
<b>Layanan TIK</b>	<b>Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b>		<b>95.00%</b>
Layanan Sistem Jaringan Komputer	1.1	Service Level Agreement (SLA) Layanan Internet (%)	95.00%
	1.2	Service Level Agreement (SLA) Layanan Data Center (%)	95.00%
	1.3	Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%)	95.00%
<b>Service Level Agreement (SLA) Layanan Sistem Jaringan Komputer</b>			<b>95.00%</b>
Layanan Aplikasi Sistem Informasi	2.1	Pemenuhan atas permintaan layanan subbidang Aplikasi Sistem Informasi (%)	95.00%
	2.2	Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%)	95.00%
	2.3	Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan (%)	95.00%
<b>Service Level Agreement (SLA) Layanan Aplikasi Sistem Informasi</b>			<b>95.00%</b>



# 2

## PETUNJUK *CASCADING* UNTUK IKI

4

IKI		Target (%)		PENANGGUNG JAWAB IKI	METODE <i>CASCADING</i>
		2024	2025		
IKI01	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	94.17	95.00	Ketua Kelompok Pengembangan Sistem Informasi	Komponen Pembentuk
A	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) layanan Sistem Jaringan Komputer (%)	94.70	95.00	Ketua Tim Sistem Jaringan Komputer dan Pranata Komputer Muda pada Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer	Komponen Pembentuk
B	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) layanan Aplikasi Sistem Informasi (%)	93.50	95.00	Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi dan Pranata Komputer Muda pada Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi	Komponen Pembentuk

5

## 3



## MANUAL IKI

7

MANUAL INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	
Kode IKI	01
Indikator Kinerja Individu (IKI)	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Bukti realisasi/pemenuhan IKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Service Level Agreement (SLA) layanan Sistem Jaringan Komputer (%)</li> <li>• Capaian Service Level Agreement (SLA) layanan Aplikasi Sistem Informasi (%)</li> </ul>
Formula/Cara menghitung	V1 = Capaian Service Level Agreement (SLA) layanan Sistem Jaringan Komputer V2 = Capaian Service Level Agreement (SLA) layanan Aplikasi Sistem Informasi  $\frac{V1 + V2}{2}$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer dan Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi
Cara pengambilan data	• Hitung nilai SLA sesuai dengan formula.
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKI/sumber IKI	Ketua Kelompok Pengembangan Sistem Informasi

### 3. Hasil Pengukuran SLA

Pengukuran SLA dilakukan setiap bulan (Januari s.d Desember) untuk masing-masing komponen. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengukuran SLA Layanan TIK untuk bulan Januari - Desember 2025 dengan **SLA tahun 2025 adalah sebesar 99.39%**. Capaian ini **lebih tinggi dari target SLA tahun 2025 sebesar 95.00%**. Detil hasil pengukuran per triwulan adalah sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah.

Dengan telah dilakukan pengukuran SLA tersebut maka persentase progres pengukuran SLA Layanan TIK tahun 2025 adalah 100%.

Lampiran:

### CAPAIAN SLA LAYANAN TIK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian Triwulan 1 2025	Capaian Triwulan 2 2025	Capaian Triwulan 3 2025	Capaian Triwulan 4 2025	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya pengelolaan TIK yang andal	1.1 Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	95.00%	98.62%	99.47%	99.78%	99.69%	99.39%

### CAPAIAN SLA LAYANAN SISTEM JARINGAN KOMPUTER

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian Triwulan 1 2025	Capaian Triwulan 2 2025	Capaian Triwulan 3 2025	Capaian Triwulan 4 2025	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	1.1 Service Level Agreement (SLA) Layanan Internet (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		1.2 Service Level Agreement (SLA) Layanan Data Center (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		1.3 Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%)	95.00%	96.70%	99.22%	99.53%	99.64%	98.77%
<b>CAPAIAN SLA LAYANAN SISTEM JARINGAN KOMPUTER:</b>			<b>95.00%</b>	<b>98.90%</b>	<b>99.74%</b>	<b>99.84%</b>	<b>99.88%</b>	<b>99.59%</b>

### CAPAIAN SLA LAYANAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian Triwulan 1 2025	Capaian Triwulan 2 2025	Capaian Triwulan 3 2025	Capaian Triwulan 4 2025	Capaian Tahun 2025
2	Meningkatnya Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	2.1 Pemenuhan atas permintaan layanan subbidang Aplikasi Sistem Informasi (%)	95.00%	100.00%	100.00%	99.15%	98.48%	99.41%
		2.2 Rasio modul sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah modul sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		2.3 Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap 7/9 standar dokumentasi yang ditetapkan (%)	95.00%	95.00%	97.62%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>CAPAIAN SLA LAYANAN APLIKASI SISTEM INFORMASI:</b>			<b>95.00%</b>	<b>98.33%</b>	<b>99.21%</b>	<b>99.72%</b>	<b>99.49%</b>	<b>99.19%</b>



**LAMPIRAN 7**  
**Capaian SLA Layanan Kamsiber**  
**Tahun 2025**



# LAPORAN TAHUN 2025



LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI TAHUNAN			Hal 1 dari 1
<b>Nama</b>	Teuku Ardhianzah Dewantara Silang	<b>Bulan</b>	April-Desember
<b>NIP</b>	198703222009121002	<b>Lokasi Pekerjaan</b>	Pusdatin
<b>Pangkat/Golongan</b>	Penata/III.D	<b>Target</b>	1 Laporan
<b>Jabatan Fungsional</b>	Pranata Komputer Muda	<b>Capaian</b>	1 Laporan
<b>Indikator Kinerja Individu (IKI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase progres service level agreement (sla) pemenuhan permintaan layanankeamanan siber triwulan iv</li> <li>▪ Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Kementan Hasil Penilaian Mandiri</li> </ul>		
<b>Capaian Triwulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase progres service level agreement (sla) pemenuhan permintaan layanankeamanan siber triwulan iv</li> <li>▪ Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Kementan Hasil Penilaian Mandiri</li> </ul>		

Berikut merupakan hasil pengukuran performa TI. Kegiatan pendukung untuk melakukan pengukuran performa Keamanan Siber terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:

**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
2025**

**I. PENDAHULUAN**

Penilaian IKI prakom muda lingkup khususnya pada jabatan Ketua kelompok Keamanan Siber dan PDP yaitu empat poin:

Untuk pemenuhan masing-masing Indikator kinerja individu tersebut terdapat indicator turunan atau indikator penyusunya terdiri dari :

- IKI01 Service Level Agreement (SLA) Layanan Keamanan Siber dan PDP :

Layanan	Indikator Kinerja		Target	Capaian		
				Oktober	November	Desember
<b>Layanan Keamanan Siber</b>	<b>Service Level Agreement (SLA) Layanan Keamanan Siber</b>		<b>95.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Layanan Penanganan Keamanan Siber	1.1	SLA Layanan Penanganan Keamanan Siber (%)	95.00%	100%	100%	100%
Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber	1.2	SLA Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	100%	62%	100%

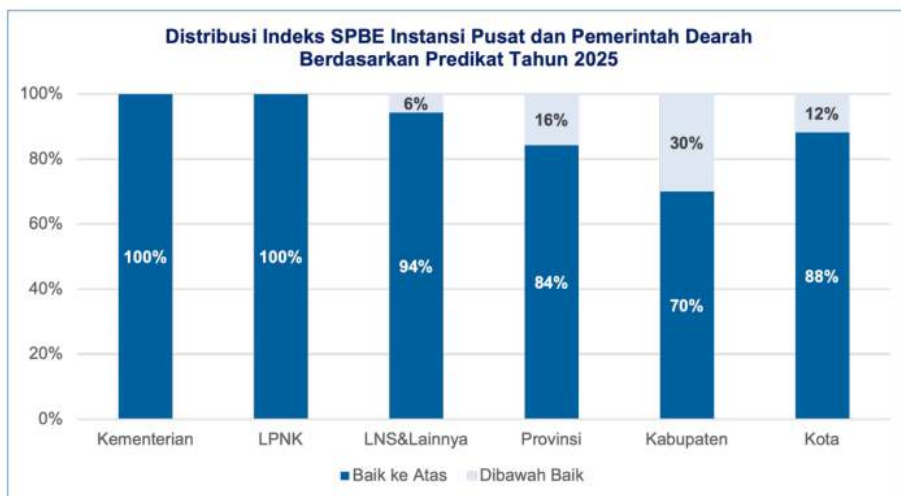
- Kesimpulan pada TW 4 terdapat keterlambatan dalam respon insiden yang terjadi pada bulan November sehingga secara capaian SLA dalam 1 tahun untuk layanan SLA pemenuhan permintaan layanan keamanan siber 87,33%
- IKI02 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Kementan Hasil Penilaian Desember

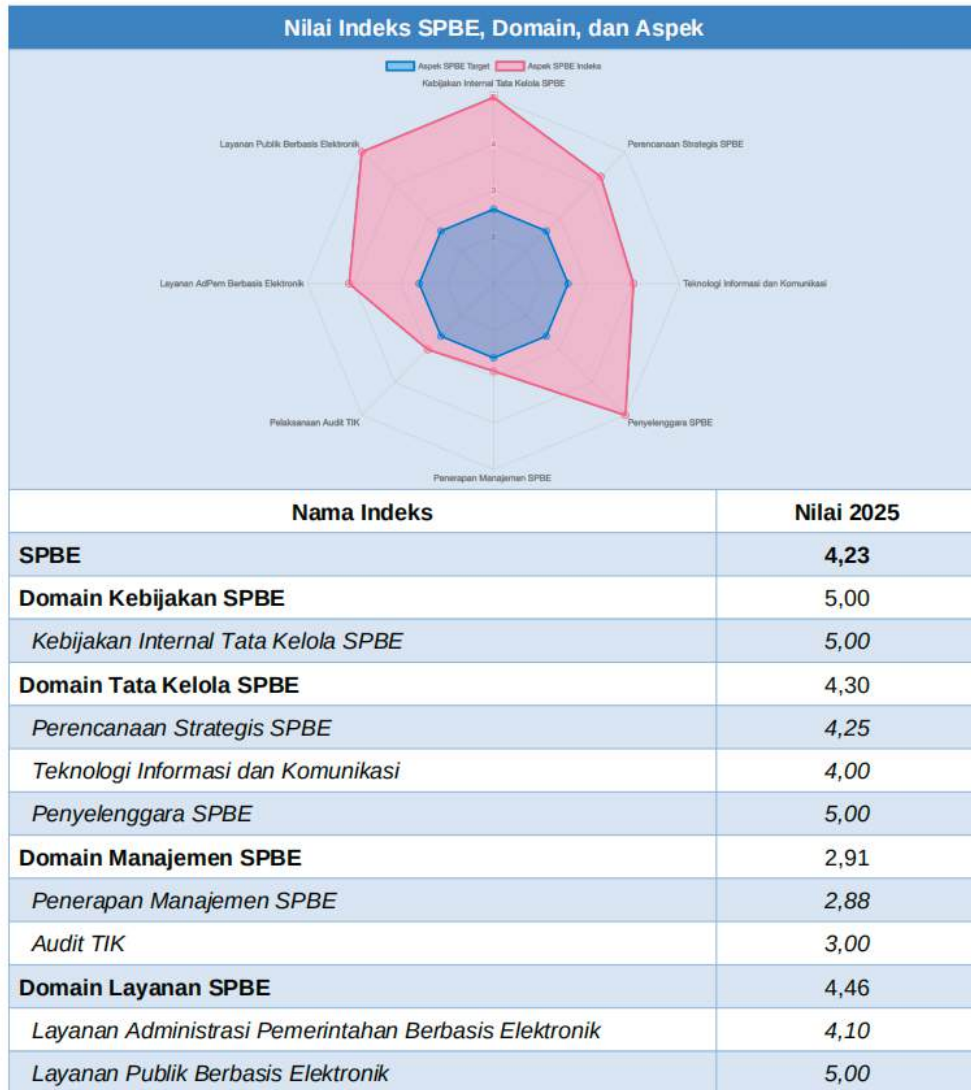
## PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
<b>Kebijakan Tata Kelola</b>	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
<b>Tata Kelola</b>	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
<b>Manajemen</b>	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
<b>Layanan SPBE</b>	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23





**Perencanaan Kinerja**

- SLA Bulan April – Desember

Berikut adalah hasil pengukuran SLA Layanan Kamsiber untuk bulan Oktober s.d Desember 2025 :

Target : 95.00%

Realisasi : Oktober (100%), November (95%), Desember (100%) dengan rincian sbb :

CAPAIAN SLA LAYANAN KEAMANAN SIBER TAHUN 2025

Dasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian April 2025	Capaian Mei 2025	Capaian Juni 2025	Capaian Juli 2025	Capaian Agustus 2025	Capaian September 2025	Capaian Oktober 2025	Capaian November 2025	Capaian Desember 2025	Rata-rata 2025	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya Service Level Agreement (SLA) Layanan Keamanan Siber (%)	Service Level Agreement (SLA) Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.89%	97.89%
	1. Service Level Agreement (SLA) Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.33%	97.33%
	2. Service Level Agreement (SLA) Layanan Penanganan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Analisis :

- a. Pencapaian SLA untuk Layanan Keamanan Siber melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan keamanan siber.
- b. Layanan Penanganan Keamanan Siber (%): Target ketersediaan layanan Penanganan Keamanan Siber adalah 97.89%. Dalam pemantauan bulan **April s.d Desember 2025**, ketersediaan layanan Penanganan Keamanan Siber juga

mencapai 100%, menunjukkan keamanan siber yang sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan.

- c. Pemenuhan atas permintaan layanan Tim Kerja Keamanan Siber (%): Target pemenuhan permintaan layanan keamanan Siber adalah 100%. namun pada triwulan 4 permintaan layanan tim kerja keamanan siber memperoleh 96,89%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan permintaan agar lebih baik lagi.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

- SLA Bulan Oktober – Desember

CAPAIAN SLA LAYANAN KEAMANAN SIBER TAHUN 2025

Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian April 2025	Capaian Mei 2025	Capaian Juni 2025	Capaian Juli 2025	Capaian Agustus 2025	Capaian September 2025	Capaian Oktober 2025	Capaian November 2025	Capaian Desember 2025	Rata-rata TMS 2025	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKI)	Service Level Agreement (SLA) Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.67%	87.93%
	Service Level Agreement (SLA) Pemenuhan Permintaan Layanan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.33%	86.79%
	Service Level Agreement (SLA) Layanan Penanganan Keamanan Siber (%)	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

- Hasil Penilaian Mandiri SPBE SPBE

Berikut merupakan hasil pengukuran performa TI. Kegiatan pendukung untuk melakukan pengukuran performa TI terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Kegiatan
1	Oktober - Desember	1) Perloehan Tingkat kematangan arsitektur 2025;

### Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

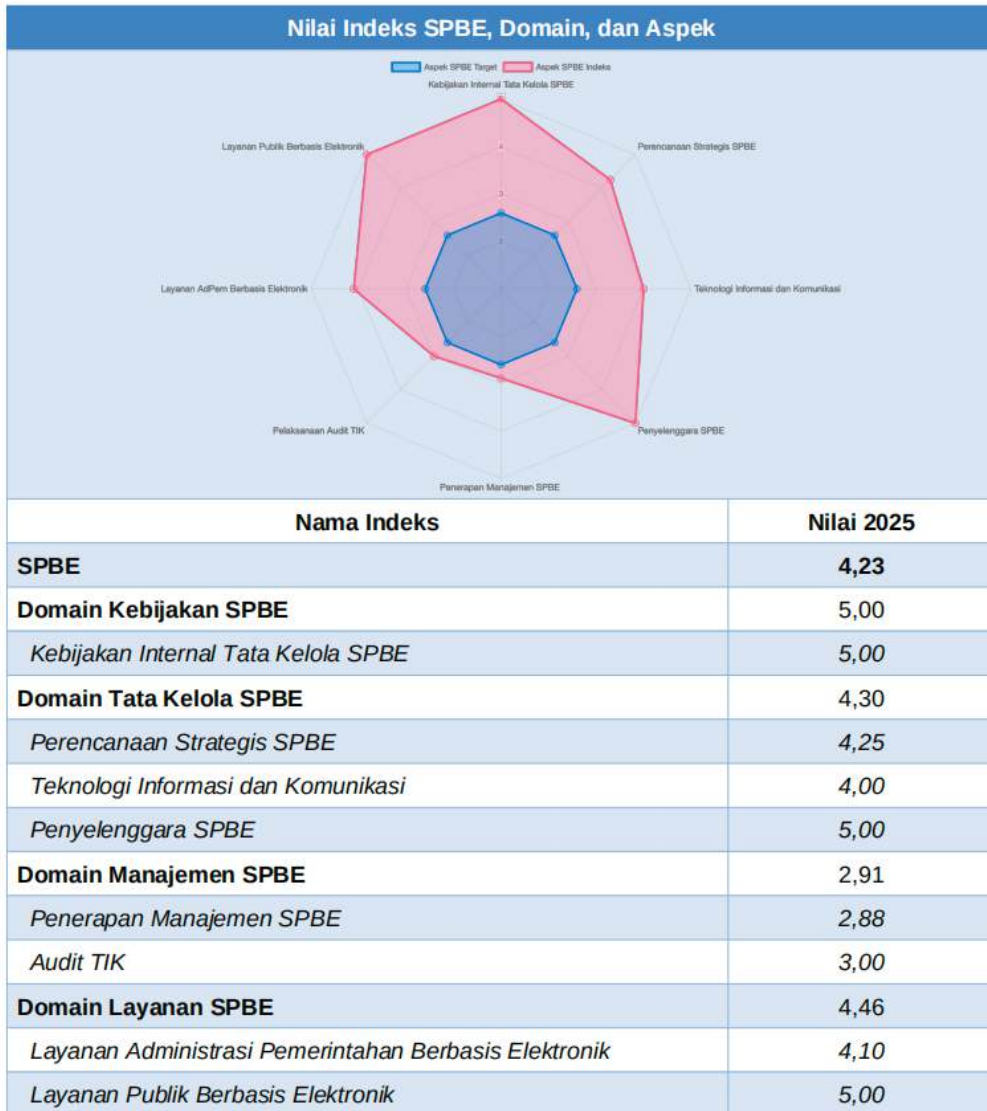
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

- Capaian arsitektur SPBE yang ditargetkan 4 di tahun 2025 pada hasil penilaian memperoleh **hasil 5**

No	Bulan	Kegiatan
1	Oktober - Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian SPBE 2025</li> </ul>

1. Kematangan SPBE sudah dilakukan penilaian SPBE di bulan desember dan hasil penilaian indeks yang diperoleh sebesar **4,23 dari target 4,26 dengan kata lain perolehan dengan target sebesar 99%**:





**LAMPIRAN 8**  
**Survei Layanan Internal Pusdatin**  
**Tahun 2025**





# LAPORAN LAYANAN

## TATA USAHA

Disusun oleh :  
**PUSDATIN**

T  
A  
H  
U  
N  
**20  
25**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Layanan Ketatausahaan Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola layanan ketatausahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam setiap upaya penyempurnaan layanan, evaluasi menjadi elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan. Evaluasi memberikan ruang bagi organisasi untuk memahami sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 telah dilaksanakan survei kepuasan layanan ketatausahaan yang melibatkan 93 pegawai dari 109 pegawai Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Pelaksanaan survei ini merupakan langkah strategis dalam menggali persepsi, harapan, serta masukan dari para pegawai sebagai pengguna layanan. Survei tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian, tetapi juga sebagai sarana untuk mendengarkan suara pegawai Pusdatin secara langsung. Hasil survei tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan ketatausahaan agar semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi serta mendukung terwujudnya pengelolaan informasi yang efektif dan efisien di lingkungan Pusdatin.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai Pusdatin yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan survei ini. Setiap masukan, saran, dan penilaian yang diberikan merupakan bahan berharga dalam upaya peningkatan mutu layanan ketatausahaan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Layanan Ketatausahaan Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian layanan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan langkah perbaikan dan inovasi layanan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pembuat Laporan

Ketua Tim kerja Tata Usaha



Gidion Bernad Lubis, S.M.  
NIP.199910052025051003



Wibisono S.E, MM  
NIP.196808211992031001

Kepala Bagian Umum



Andry Polos, S.Kom., M.Si  
NIP. 198111062009101004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Survei.....	2
BAB II METODOLOGI PENELITIAN .....	3
2.1 Jenis Penelitian.....	3
2.2 Populasi dan Sample .....	3
2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	3
2.4 Skala Pengukuran.....	3
2.5 Analisis Data.....	3
2.6 Demografi Responden .....	4
BAB III HASIL DAN ANALISIS .....	5
3.1 Tangible (Berwujud).....	5
3.2 <i>Reliability</i> (Keandalan) .....	6
3.3 Kesimpulan Hasil Survei Keseluruhan .....	7
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	8
4.1 Kesimpulan .....	8
4.2 Rekomendasi.....	8
LAMPIRAN .....	iv

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) memegang peranan strategis dalam menjadi penyedia data, dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya, untuk mendukung pembangunan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk memastikan peran tersebut berjalan secara optimal, diperlukan dukungan layanan ketatausahaan yang mencakup unsur perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pelaksanaan fungsi ketatausahaan pada Satuan Kerja Pusdatin dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Usaha, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian. Fungsi ini merupakan bagian integral dari tugas Bagian Umum Pusdatin dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melaksanakan Survei Kepuasan Layanan Tata Usaha. Survei ini mencakup unsur layanan dalam lingkup fungsi ketatausahaan yang meliputi layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta layanan persuratan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan pegawai Pusdatin terhadap layanan yang diberikan oleh tata usaha.

Survei kepuasan ini dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman pegawai sebagai pengguna layanan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai Pusdatin. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala penilaian tertentu guna memperoleh data yang objektif dan terukur terhadap kualitas layanan yang disediakan.

Hasil survei diharapkan dapat menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan perbaikan layanan ketatausahaan di masa mendatang. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pegawai, tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan agar semakin responsif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Laporan ini menyajikan hasil Survei Kepuasan Layanan Tata Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, disertai dengan analisis terhadap temuan-temuan utama serta rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas layanan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi berharga dalam pelaksanaan survei ini. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memiliki peran vital dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan kemajuan dalam penyediaan layanan terkait informasi.

## **1.2 Tujuan Survei**

Survei ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Pusdatin, sekaligus menggali aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pelayanan. Hasil survei tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan Pusdatin secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei yang dilakukan secara internal di lingkungan Pusdatin melalui media daring dengan menggunakan Google *Form* yang disebarakan kepada seluruh pegawai Pusdatin dan diisi melalui link: <https://forms.gle/ajzxubvUpXRWZMyA9>.

#### **2.2 Populasi dan Sample**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pusdatin yang terdiri dari 5 Kelompok Kerja dan 10 Tim Kerja. Karena jumlah populasi yang relatif kecil, maka seluruh populasi dijadikan sampel (sensus).

#### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada seluruh responden. Kuesioner tersebut memuat sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk menilai tingkat kepuasan responden terhadap berbagai aspek layanan yang diberikan oleh Pusdatin.

#### **2.4 Skala Pengukuran**

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan rentang sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Puas
- 2 = Tidak Puas
- 3 = Puas
- 4 = Sangat Memuaskan

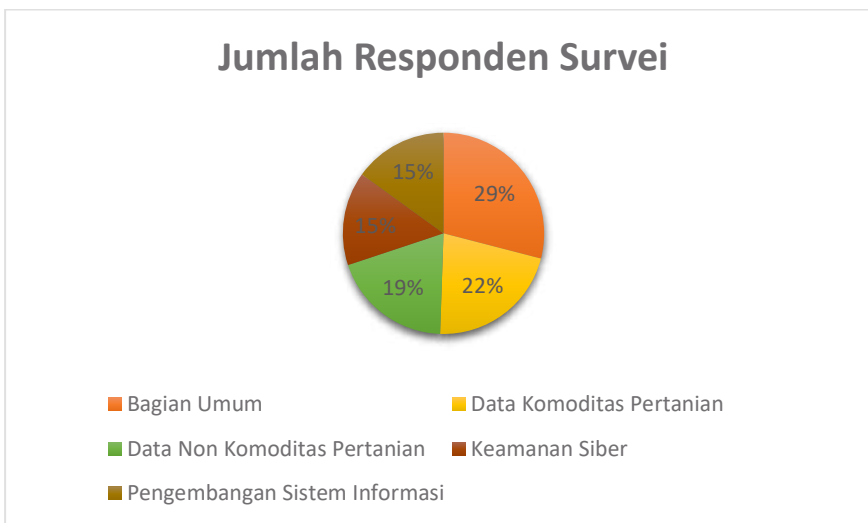
#### **2.5 Analisis Data**

Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif guna mengetahui distribusi frekuensi, persentase, serta nilai rata-rata pada setiap indikator yang diukur.

## 2.6 Demografi Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, sebanyak 93 orang pegawai dari 109 pegawai telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Responden berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Pusdatin, meliputi Kelompok Data Komoditas, Kelompok Data Non Komoditas, Kelompok Pengembangan Sistem Informasi, Kelompok Keamanan Siber serta Bagian Umum. Partisipasi tersebut menjadi sumber data utama dalam pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan ketatausahaan Pusdatin.

Adapun komposisi pengisian kuesioner yang dimaksud sebagai berikut:

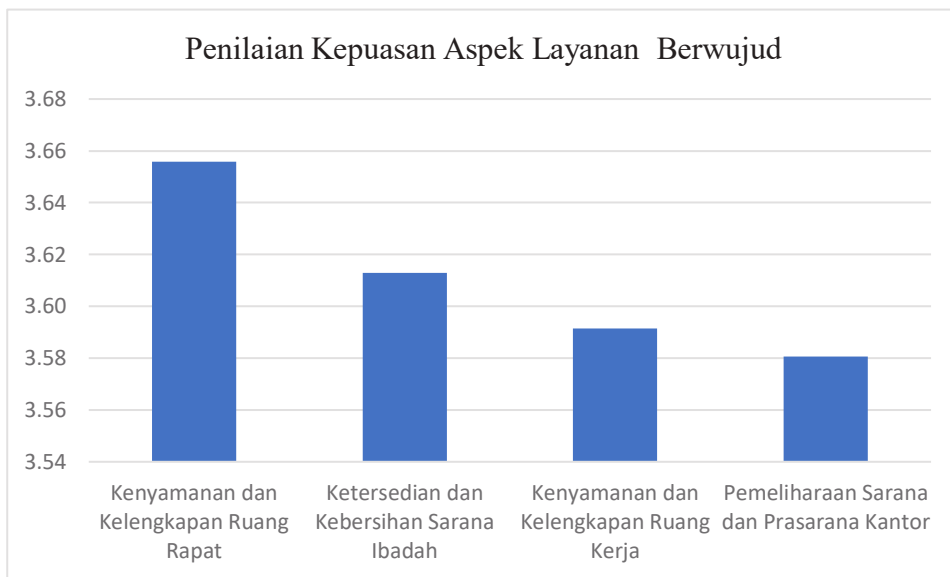


## BAB III HASIL DAN ANALISIS

Berikut ini adalah hasil dari pengisian survei oleh responden berdasarkan kategori dan indikator sebagai berikut ini:

### 3.1 Tangible (Berwujud)

Pengukuran pada aspek ini bertujuan untuk menilai kepuasan pegawai Pusdatin terhadap fasilitas fisik yang ada didalam lingkungan kerja.

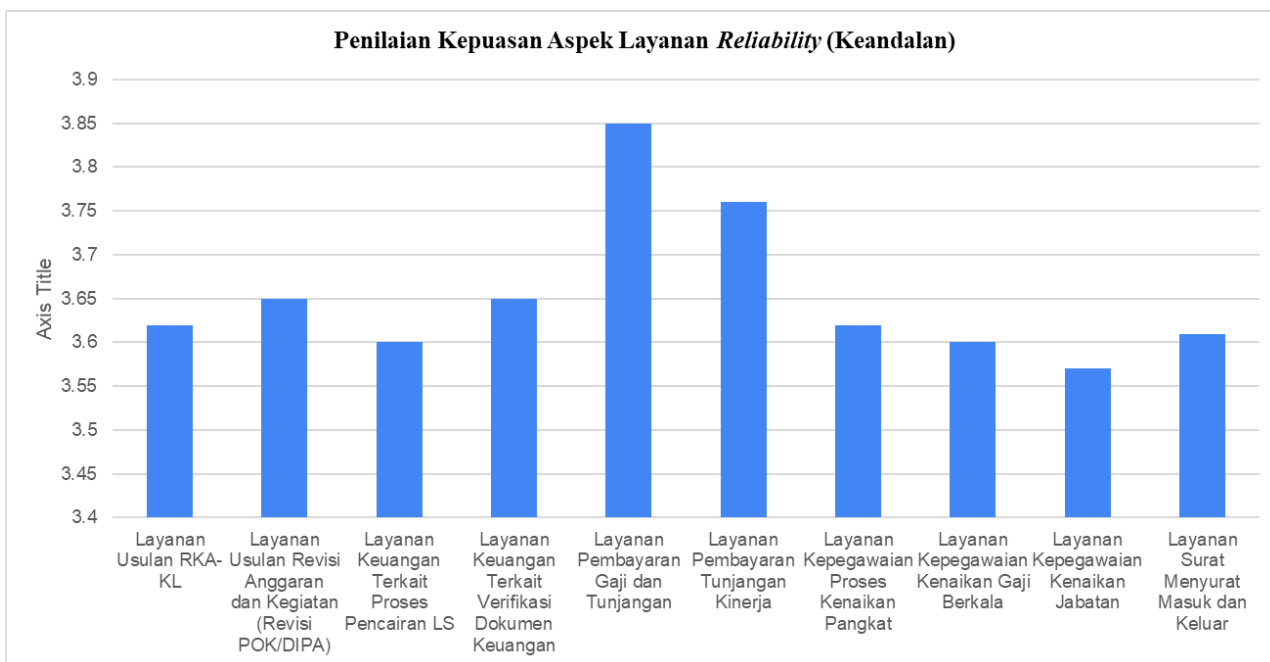


- **Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Rapat** mencatat nilai rata-rata 3.66, hal ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kondisi dan pemeliharaan ruang-ruang tersebut. Selain itu menjadi penilaian yang paling tinggi dari aspek layanan berwujud lainnya.
- **Ketersediaan dan Kebersihan Sarana Ibadah** mendapatkan nilai rata-rata 3.61, hal ini menunjukan bahwa penilaian pada aspek berwujud ini mendapatkan nilai yang cukup memuaskan dimata pegawai Pusdatin.
- Sementara **Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Kerja** mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.59 walaupun termasuk kedalam kategori yang memuaskan namun pada indicator ini skornya masih lebih rendah dibandingkan indikator lainnya dalam kategori *Tangible*, sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
- **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor** menjadi indikator dengan nilai yang paling rendah dibanding indikator lainnya yang ada didalam aspek tangible

namun secara nilai rata-rata cukup memuaskan yaitu di 3.58 sehingga potensi pada indikator ini harus ditingkatkan.

### 3.2 Reliability (Keandalan)

Aspek ini merupakan penilaian kepuasan pegawai Pusdatin terhadap layanan keandalan (Reliability)



- **Layanan Perencanaan terkait Usulan RKA-KL** mendapatkan nilai rata-rata 3.62, menunjukkan tingkat keandalan yang baik dan memuaskan dalam pengusulan RKA-KL.
- **Layanan Usulan Revisi Anggaran dan Kegiatan (Revisi POK/DIPA)**, mendapatkan skor penilaian rata-rata sebesar 3.65, menunjukan bahwa indikator ini memiliki output keandalan yang baik dan memuaskan oleh pegawai Pusdatin.
- **Layanan Keuangan Terkait Proses Pencairan LS** nilai rata-ratanya adalah 3.60, menunjukkan tingkat keandalan yang baik dan memuaskan dalam layanan keuangan.
- **Layanan Keuangan Terkait Verifikasi Dokumen Keuangan** mendapatkan nilai rata-rata 3.65, yang juga mengartikan tingkat keandalan yang memuaskan dilayanan verifikasi dokumen keuangan.
- **Layanan Keuangan Terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan** mendapatkan nilai rata-rata 3.85, memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yang berarti bahwa layanan dalam pembayaran gaji dan tunjangan memiliki keandalan yang sangat memuaskan bagi seluruh pegawai Pusdatin.

- **Layanan Keuangan Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja** mendapatkan nilai rata-rata 3.76, yang berarti bahwa tingkat keandalan yang baik dan memuaskan dalam layanan pembayaran tunjangan kinerja.
- **Layanan Kepegawaian Terkait Proses Kenaikan Pangkat** mendapatkan nilai rata-rata 3.62, yang menunjukkan tingkat keandalan yang baik dan memuaskan dalam layanan kepegawaian khususnya dalam proses kenaikan pangkat.
- **Layanan Kepegawaian Terkait Kenaikan Gaji Berkala** mendapatkan nilai rata-rata 3.60, menunjukkan tingkat keandalan yang baik dan memuaskan dalam layanan ini.
- **Layanan Kepegawaian Terkait Kenaikan Jabatan** nilai rata-rata indikator ini adalah 3.57, yang menunjukkan tingkat keandalan yang baik dan memuaskan.
- **Layanan Surat Menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar)** nilai rata-rata 3.61, menunjukkan juga bahwa tingkat keandalan layanan ini baik dan memuaskan.

### 3.3 Kesimpulan Hasil Survei Keseluruhan

Nilai rata-rata keseluruhan survei sebesar 3,64 menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan internal di lingkungan Pusdatin berada pada kategori puas hingga sangat puas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi fokus perbaikan ke depan, khususnya terkait pemeliharaan fasilitas toilet serta ketepatan dalam pemberian solusi atas permasalahan yang dihadapi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil survey ini memberikan gambaran positif mengenai tingkat kepuasan internal di Pusdatin, hal ini terlihat bahwa sebagian besar layanan telah mendapatkan penilaian yang baik. Aspek Reliability mendapatkan skor tertinggi yaitu 3.64, menunjukkan bahwa layanan yang diberikan umumnya handal dan tepat waktu.

Namun, terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kemudian kenyamanan dan kelengkapan ruang kerja, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna layanan menilai layanan yang disediakan secara positif. Rata-rata nilai kepuasan keseluruhan survei adalah 3.64, melebihi ambang batas yang telah ditetapkan sebesar 3.56, Hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam penyediaan layanan, namun tetap terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kepuasan pengguna

#### **4.2 Rekomendasi**

- **Perbaikan Fasilitas Kantor:** Melakukan peningkatan pada kenyamanan dan kelengkapan ruang rapat dan ruang kerja.
- **Peningkatan Proses Verifikasi Keuangan:** Memperbaiki proses verifikasi dokumen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas.
- **Pelatihan dan Pengembangan Karyawan:** Menyelenggarakan pelatihan bagi staf terkait untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap proses-proses penting yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- **Peningkatan Komunikasi dan Responsivitas:** Meningkatkan responsivitas terhadap surat masuk dan keluar serta memperjelas proses-proses kepegawaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat atau jabatan.
- **Tindak Lanjut** ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

## LAMPIRAN

### KUESIONER TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI PUSDATIN TERHADAP LAYANAN TATA USAHA TAHUN 2025

Form ini merupakan kuesioner untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan pegawai Pusdatin terhadap layanan yang dimiliki Bagian Umum khususnya Tim Kerja Tata Usaha

Nama Pegawai (Opsional)

Teks jawaban singkat

Kelompok Kerja \*

Bagian Umum

Data Komoditas Pertanian

Data Non Komoditas Pertanian

Pengembangan Sistem Informasi

Keamanan Siber

1. Layanan Perencanaan \*

1= Tidak Memuaskan  
2= Kurang Memuaskan  
3= Memuaskan  
4=Sangat Memuaskan

	1	2	3	4
Layanan Usulan R...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Layanan Usulan Re...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Layanan Keuangan \*

1= Tidak Memuaskan  
2= Kurang Memuaskan  
3= Memuaskan  
4=Sangat Memuaskan

	1	2	3	4
Layanan Keuangan...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Layanan Keuangan...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Layanan Pembaya...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Layanan Pembaya...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Layanan Kepegawaian \*

1= Tidak Memuaskan  
2= Kurang Memuaskan  
3= Memuaskan  
4=Sangat Memuaskan

	1	2	3	4
Proses Kenaikan P...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kenaikan Gaji Berk...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kenaikan Jabatan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Layanan Kerumahtanggaan \*

1= Tidak Memuaskan  
2= Kurang Memuaskan  
3= Memuaskan  
4=Sangat Memuaskan

4. Layanan Kerumahtangaan \*

- 1= Tidak Memuaskan
- 2= Kurang Memuaskan
- 3= Memuaskan
- 4=Sangat Memuaskan

	1	2	3	4
Layanan Ketersedi...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kenyamanan dan ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kenyamanan dan ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Layanan Pemeliha...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Layanan Surat Menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar)

	1	2	3	4	
Tidak Puas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Puas

Saran \*

Teks jawaban panjang

Timestamp	Kelompok Kerja	1. Layanan Perencanaan		2. Layanan Keuangan				3. Layanan Kepegawaian			4. Layanan Kerumahtanggaan				5. Layanan Surat Menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar)
		Layanan Usulan RKA-KL	Layanan Usulan Revisi Anggaran dan Kegiatan (Revisi POK/DIPA)	Layanan Keuangan Terkait Proses Pencatiran LS	Layanan Keuangan Terkait Verifikasi Dokumen Keuangan	Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan Pembayaran Tunjangan Kinerja	Proses Kenaikan Pangkat	Kenaiikan Gaji Berkala	Kenaiikan Jabatan	Layanan Ketersedian dan Kebersihan Sarana Ibadah	Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Rapat	Kenyamanan dan Kelengkapan Ruang Kerja	Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
12/17/2025 13:17:08	Bag Umum	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:18:31	Bag Umum	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
12/17/2025 13:18:46	Bag Umum	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
12/17/2025 13:19:27	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:20:37	Kam Siber	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:21:27	PSI	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3
12/17/2025 13:21:43	PSI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:23:20	Komoditas	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
12/17/2025 13:24:57	Non Komo	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3
12/17/2025 13:25:45	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:27:49	Bag Umum	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
12/17/2025 13:28:56	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:32:37	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:34:36	Non Komo	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
12/17/2025 13:36:58	PSI	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4
12/17/2025 13:39:33	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
12/17/2025 13:42:32	Non Komo	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4
12/17/2025 13:51:52	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 13:56:45	Kam Siber	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
12/17/2025 14:34:23	Kam Siber	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
12/17/2025 14:37:38	Bag Umum	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
12/17/2025 14:43:07	Non Komo	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3
12/17/2025 14:46:28	PSI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
12/17/2025 16:43:16	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/17/2025 17:50:31	Komoditas	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3
12/17/2025 18:45:48	Komoditas	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3
12/18/2025 4:50:37	Kam Siber	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
12/18/2025 5:29:38	Komoditas	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3
12/18/2025 8:59:40	Non Komo	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4
12/18/2025 13:08:48	Kam Siber	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
12/18/2025 13:13:02	Kam Siber	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
12/18/2025 13:38:19	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/19/2025 8:42:19	Kam Siber	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/19/2025 16:07:37	Komoditas	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
12/21/2025 16:30:56	PSI	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3



12/30/2025 10:49:55	Komoditas	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
12/30/2025 10:51:18	Komoditas	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
12/30/2025 10:56:31	Komoditas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4
12/30/2025 10:57:16	Non Komo	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
12/30/2025 10:59:52	Kam Siber	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
12/30/2025 11:06:59	Bag Umum	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/30/2025 11:07:44	Kam Siber	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
12/30/2025 11:09:02	Kam Siber	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
12/30/2025 11:22:32	Kam Siber	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
12/30/2025 11:34:46	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/30/2025 11:40:42	Kam Siber	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
12/30/2025 11:41:50	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/30/2025 14:36:08	Bag Umum	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3
12/30/2025 14:36:46	Bag Umum	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/30/2025 14:37:21	Komoditas	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3
12/30/2025 14:37:50	Bag Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12/30/2025 15:00:05	Bag Umum	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3
12/31/2025 10:57:28	Bag Umum	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai rata-rata		3.62	3.65	3.60	3.65	3.85	3.76	3.62	3.60	3.62	3.60	3.57	3.61	3.66	3.59	3.58	3.61	3.58	3.61
<b>RATA-RATA PENILAIAN KESELURUHAN ASPEK</b>		<b>3.64</b>																	



**LAMPIRAN 9**  
**Laporan Indeks Pembangunan Statistik**  
**Tahun 2025**



# LAPORAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

*PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL TAHUN 2025*  
KEMENTERIAN PERTANIAN

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	4
BAB II PENJELASAN UMUM EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL .....	6
BAB III HASIL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK TAHUN 2025 KEMENTERIAN PERTANIAN .....	7
BAB IV PENUTUP.....	15



## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 1. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan .....	6
Tabel 2. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain EPSS .....	9
Tabel 3. Nilai Indeks Aspek EPSS Daftar Indikator pada Domain Kualitas Data.....	10
Tabel 4. Tingkat Kematangan Indikator EPSS .....	11

## DAFTAR GAMBAR

*Halaman*

Gambar 1. Indeks Penilaian Setiap Domain EPSS .....	9
---	---

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan objektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan penilaian baik secara mandiri oleh Penilai di internal Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah maupun melalui verifikasi dan validasi oleh Penilai dari BPS selaku pembina data statistik atas pelaksanaan

penyelenggaraan Statistik Sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pedoman ini mengatur tentang persiapan dan pelaksanaan evaluasi.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- f. Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian.

## 1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah

- a. Menyampaikan progres penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2025 di Kementerian Pertanian
- b. Melakukan pengawasan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Kementerian Pertanian.
- c. Melakukan reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik lingkup Kementerian Pertanian.

## **BAB II**

### **PENJELASAN UMUM EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada K/L/D.

EPSS adalah proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Nilai IPS diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori sebagaimana berikut:

Tabel 2. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan

Nilai Indeks	Predikat
4,2 - 5,0	MEMUASKAN
3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK
2,6 - < 3,5	BAIK
1,8 - < 2,6	CUKUP
< 1,8	KURANG

## **BAB III**

### **HASIL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK TAHUN 2025 KEMENTERIAN PERTANIAN**

#### **3.1. Penilaian EPSS Tahun 2025**

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor: B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat, BPS selaku Pembina Data Statistik menginformasikan ke K/L/D beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, rencana Grand Design RB 2025-2045 dan Roadmap RB 2025-2029, kegiatan **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan.**
- b. Upaya Pembangunan statistic sektoral tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sectoral di masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan RPJMN tahun 2025-2029.
- c. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
- d. Sehubungan dengan angka 3, bagi Instansi Pemerintah yang baru terbentuk atau mengalami perubahan tugas dan fungsi di periode 2025-2029, maka pemenuhan target diserahkan ke masing-masing instansi

pemerintah dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Instansi Pemerintah saat ini dalam pemenuhan target. Penilaian EPSS periode selanjutnya akan tetap focus pada bukti dukung yang disampaikan saat itu, bukan pada hasil instansi sebelumnya.

- e. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
- f. Untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah dapat berkoordinasi dengan unit kerja di BPS yang berperan sebagai Pembina Statistik Sektoral masing-masing.

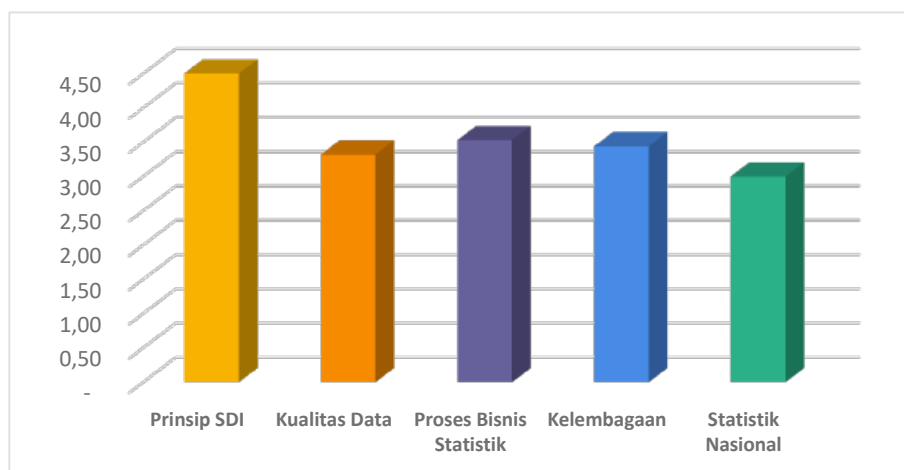
### 3.2. Hasil Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor: B-236/02000/TS.160/2025 tersebut serta mengacu pada Keputusan Kepala BPS Nomor 605 tahun 2024, maka hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 Kementerian menggunakan hasil IPS Tahun 2024. Berikut rincian hasil IPS tahun 2025 Kementerian Pertanian:

Kegiatan Statistik Sektoral dinilai pada Kementerian Pertanian mencakup Pendataan Data Hortikultura dan Pendataan Data Ternak. Berdasarkan serangkaian pelaksanaan EPSS, Kementerian Pertanian memperoleh capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **sebesar 3,67** dengan predikat "**Sangat Baik**". Atas capaian nilai tersebut menjadikan Kementerian Pertanian mendapatkan anugerah Anindhita Wistara Data, terbaik 1 untuk kategori Kementerian. Hasil penilaian EPSS ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024. Adapun rincian hasil indeks pembangun statistik dan nilai indeks domain hasil penilaian EPSS Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain EPSS

No	Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
1.	Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	4,50
2.	Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,32
3.	Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,53
4.	Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,44
5.	Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	3,00
<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b>		<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>3,67</b>



Gambar 1. Indeks Penilaian Setiap Domain EPSS

Berdasarkan hasil penilaian seperti pada Gambar 1, domain Prinsip SDI memiliki nilai Indeks penilaian tertinggi yaitu mencapai 4,50. Domain Proses Bisnis berada di posisi kedua dengan Indeks sebesar 3,53. Domain Kelembagaan berada di urutan ketiga dengan nilai indeks 3,44. Adapun Domain Kualitas Data dengan capaian indeks 3,32 berada di urutan keempat. Di sisi lain, domain Statistik Nasional memiliki nilai indeks terendah, yaitu sebesar 3,00. Meskipun secara umum indeks penilaian domain EPSS berada di atas 3,00, hasil ini menunjukkan adanya domain yang masih perlu ditingkatkan, khususnya

dalam domain Statistik Nasional dan Kualitas Data. Adapun rincian hasil penilaian pada masing-masing Aspek dan juga Indikator EPSS disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Nilai Indeks Aspek EPSS

Domain / Aspek	Bobot <sup>1</sup>	Nilai Indeks
<b>Domain Prinsip SDI</b>		
Standar Data Statistik	25%	5,00
Metadata Statistik	25%	5,00
Interoperabilitas Data	25%	4,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	4,00
<b>Domain Kualitas Data</b>		
Relevansi	21%	4,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3,00
<b>Domain Proses Bisnis Statistik</b>		
Perencanaan Data	32%	3,33
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	4,00
Penyebarluasan Data	21%	4,00
<b>Domain Kelembagaan</b>		
Profesionalitas	35%	3,25
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	4,00
<b>Domain Statistik Nasional</b>		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3,00

Keterangan: <sup>1</sup> Bobot aspek pembentuk indeks domain

Tabel 4. Tingkat Kematangan Indikator EPSS

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
<b>Prinsip Satu Data Indonesia</b>	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	5,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	5,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	4,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	4,00
<b>Kualitas Data</b>	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	60%	4,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	4,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	4,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3,00
<b>Proses Bisnis Statistik</b>	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	4,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	4,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	4,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	4,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	3,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	4,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi	25%	4,00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
		Penyelenggaraan Kegiatan Statistik		
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	4,00
<b>Statistik Nasional</b>	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	3,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	3,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	3,00

Keterangan: <sup>1</sup> Bobot indikator pembentuk indeks aspek

## **BAB IV PENUTUP**

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2025 ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan lingkup Kementerian Pertanian. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebagai hasil dari EPSS merupakan salah satu indikator yang berkontribusi dalam RB Kementerian Pertanian. Pusdatin selaku penanggung jawab EPSS lingkup Kementerian Pertanian selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh produsen data untuk mencapai nilai IPS yang lebih baik setiap tahun.

**LAMPIRAN 10**  
**Hasil Evaluasi SPBE Kementan**



Tabel 24 Hasil Evaluasi SPBE Kementan 2025

Kementerian Pertanian	
K/L/D	: Kementerian
Indeks SPBE	: 4.23
Predikat SPBE	: Memuaskan
Domain Kebijakan SPBE	: 5.00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 5.00
Domain Tata Kelola SPBE	: 4.30
Perencanaan Strategis SPBE	: 4.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 4.00
Penyelenggara SPBE	: 5.00
Domain Manajemen SPBE	: 2.91
Penerapan Manajemen SPBE	: 2.88
Pelaksanaan Audit TIK	: 3.00
Domain Layanan SPBE	: 4.46
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 4.10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 5.00



**LAMPIRAN 11**  
**Nilai Implementasi Arsitektur SPBE**



As-is						
Nama Instansi ↓	Proses Bisnis As-is	Layanan As-is	Data As-is	Aplikasi As-is	Infrastruktur As-is	Keamanan As-is
Kementerian Pekerjaan Umum &	6	284	537	134	33	476
Kementerian Pemberdayaan Pei	0	0	129	59	123	10
Kementerian Pemuda dan Olah	29	131	40	49	299	19
Kementerian Pendayagunaan Aj	3	24	5	12	10	9
Kementerian Pendidikan, Kebuc	2	494	1862	344	28	31
Kementerian Perdagangan	14	27	175	106	451	38
Kementerian Perencanaan Pemi	38	47	796	87	175	126
Kementerian Perhubungan	3	986	959	14	798	27
Kementerian Perindustrian	3	3	169	0	238	12
ma Instansi: Kementerian Pertanian	2	5	44	10	28	6
Kementerian Pertanian	14	164	46	212	506	20
Kementerian Sekretariat Negara	0	126	542	94	320	163
Kementerian Sosial	20	40	0	0	0	0

To-be							
Keamanan As-is	Proses Bisnis To-be	Layanan To-be	Data To-be	Aplikasi To-be	Infrastruktur To-be	Keamanan To-be	Peta Renc
476	0	39	128	102	0	7	V
10	0	0	0	0	0	0	
19	0	7	20	25	76	13	V
9	1	0	0	0	0	0	V
31	2	1	6	19	0	0	V
38	2	3	2	1	6	1	V
126	12	2	7	6	2	3	V
27	0	109	0	2	2	1	V
12	0	0	0	0	3	4	
6	2	9	14	4	3	10	V
20	0	1	1	6	0	0	V
163	0	5	71	55	19	6	V
0	0	0	0	0	0	0	

a To-be	Aplikasi To-be	Infrastruktur To-be	Keamanan To-be	Peta Rencana	Clearance	Evaluasi	Nilai Implementa...
128	102	0	7	V			3
0	0	0	0				
20	25	76	13	V			3
0	0	0	0	V			3
6	19	0	0	V			3
2	1	6	1	V			3
7	6	2	3	V			3
0	2	2	1	V			3
0	0	3	4				
14	4	3	10	V			
1	6	0	0	V			3
71	55	19	6	V			
0	0	0	0				

Nilai Implementasi Arsitektur SPBE: 3





